



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan

Laporan Keuangan disusun dengan maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban Bupati Kebumen atas pengelolaan keuangan beserta kinerja atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kebumen.

Tujuan laporan keuangan adalah:

- a. Menyediakan informasi yang andal dan relevan mengenai posisi keuangan serta seluruh transaksi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kebumen selama satu periode pelaporan;
- b. Untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan;
- c. Untuk menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensinya, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- d. Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:
 - 1) Menyediakan informasi mengenai penerimaan pada periode berjalan kaitannya dengan seluruh alokasi pengeluaran;
 - 2) Menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya disesuaikan dengan anggaran yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pembangunan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
 - 4) Menyediakan informasi mengenai cara-cara yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam rangka mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
 - 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kabupaten Kebumen berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak maupun pinjaman;
 - 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan;
 - 7) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- c. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- h. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- i. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- j. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- k. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- m. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

- u. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah;
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
- y. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- z. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- aa. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
- bb. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
- cc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- dd. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
- ee. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
- ff. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- gg. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- hh. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- ii. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 74 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- jj. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- kk. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

- Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 2.1 Gambaran Umum Kabupaten Kebumen
 - 2.2 Ekonomi Makro
 - 2.3 Arah dan Kebijakan Umum APBD
 - 2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
- Bab IV Kebijakan Akuntansi
- 4.1 Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah
 - 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
- Bab V Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan
- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - 5.3 Neraca
 - 5.4 Laporan Operasional
 - 5.5 Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.6 Laporan Arus Kas
 - 5.7 Catatan atas Laporan Keuangan
- Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan
- Bab VII Penutup



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2019

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Kebumen

a. Letak Geografis

Kabupaten Kebumen merupakan Kabupaten yang terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Tengah, yang secara geografis terletak diantara 7°27' – 7°50' lintang selatan dan 109°22' – 109°50' bujur timur. Wilayah Kabupaten Kebumen berbatasan langsung atau memiliki wilayah pantai dan pegunungan, sehingga ketinggiannya berkisar antara 0 – 997,5 meter di atas permukaan laut, dengan batas-batas:

Sebelah utara : Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo
Sebelah timur : Kabupaten Purworejo
Sebelah selatan : Samudera Indonesia
Sebelah barat : Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas

Luas wilayah Kabupaten Kebumen adalah 128.111,50 hektar yang terbagi dalam 26 kecamatan, terdiri dari 449 desa dan 11 kelurahan.

Gambar 1
Peta Kabupaten Kebumen



*) Sumber : Kebumen dalam Angka

Kabupaten Kebumen secara administratif terdiri dari 26 kecamatan dengan luas wilayah sebesar 128.111,50 hektar atau 1.281,115 km², dengan kondisi beberapa wilayah merupakan daerah pantai dan perbukitan, sedangkan sebagian besar merupakan dataran rendah.

b. Demografi

1) Penduduk

Penduduk Kabupaten Kebumen berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018 sebanyak 1.195.092 jiwa yang terdiri atas 595.003 jiwa penduduk laki-laki dan 600.089 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2017, penduduk Kabupaten Kebumen mengalami pertumbuhan



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

sebesar 0,26 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2018 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 99,15. Kepadatan penduduk di Kabupaten Kebumen tahun 2018 mencapai 933 jiwa/km².

2) Ketenagakerjaan

Jumlah Penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Kebumen pada Agustus 2018 adalah 894.326 orang, dengan jumlah Angkatan Kerja yaitu 586.034 orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada Agustus 2018 sebesar 65,53 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,52 persen.

c. Organisasi

Unsur Pemerintah Kabupaten Kebumen meliputi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Bupati/Wakil Bupati yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum. Dalam melaksanakan Pemerintahan Bupati/Wakil Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah (PD) yang dibentuk berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

1) DPRD

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) dan dilantik dalam masa jabatan lima tahun. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen untuk periode tahun 2019-2024 diketuai oleh H. Sarimun, S.Sy dengan wakil ketua Fuad Wahyudi, Agung Prabowo, dan Yuniarti Widayaningsih.

2) Bupati/Wakil Bupati

Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kebumen untuk periode tahun 2016-2021 dipimpin oleh K.H. Yazid Mahfudz dan Arif Sugiyanto, SH (menjabat Wakil Bupati sejak 2019).

3) Perangkat Daerah (PD)

Sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dalam melaksanakan tugas aparaturnya Kabupaten Kebumen melaksanakan kewenangan wajib yang terbagi dalam 22 Bidang Pemerintah, meliputi 56 Perangkat Daerah, terdiri dari: Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 16 Dinas, 5 Badan, 1 Kantor, 26 Kecamatan, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedirman dan RSUD Prembun, Inspektorat dan Satuan Polisi Pamong Praja, dengan susunan nomenklatur sebagai berikut.

Tabel Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen

No.	Kode SKPD	Nama SKPD
	1.01.	BIDANG PENDIDIKAN
1.	1.01.1	Dinas Pendidikan.
	1.02.	BIDANG KESEHATAN
2.	1.02.1	Dinas Kesehatan
3.	1.02.2	Rumah Sakit umum Daerah
	1.03	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	1.03.1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
5.	1.03.2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.04	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
6..	1.04.1	Dinas Perumahan dan Kawasasn Permukiman dan Lingkungan Hidup

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

No.	Kode SKPD	Nama SKPD
	1.05	BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
7.	1.05.1	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8.	1.05.2	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.06	BIDANG SOSIAL
9.	1.06.1	Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.01	BIDANG TENAGA KERJA
10.	2.01.1	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.06	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL
11.	2.06.1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.07	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
12.	2.07.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.09	BIDANG PERHUBUNGAN
13.	2.09.1	Dinas Perhubungan
	2.10	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
14.	2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.12	BIDANG PENANAMAN MODAL
15.	2.12.1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.13	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
16.	2.13.1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan pariwisata
	2.18	BIDANG KEARSIPAN
17.	2.18.1	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	3.01	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
18.	3.01.1	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.03	BIDANG PERTANIAN
19.	3.03.1	Dinas Pertanian dan Pangan
	3.06	BIDANG PERDAGANGAN
20.	3.06.1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	4.01	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
21.	4.01.1	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
22.	4.01.2	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
23.	4.01.3	Sekretariat Daerah
24.	4.01.4	Sekretariat DPRD
25.	4.01.5	Kecamatan Kebumen
26.	4.01.6	Kecamatan Alian
27.	4.01.7	Kecamatan Karangsambung
28.	4.01.8	Kecamatan Prembun
29.	4.01.9	Kecamatan Mirit
30.	4.01.10	Kecamatan Kutowinangun
31.	4.01.11	Kecamatan Ambal
32.	4.01.12	Kecamatan Buluspesantren
33.	4.01.13	Kecamatan Pejagoan
34.	4.01.14	Kecamatan Klirong
35.	4.01.15	Kecamatan Petanahan
36.	4.01.16	Kecamatan Sruweng
37.	4.01.17	Kecamatan Karanganyar
38.	4.01.18	Kecamatan Karanggayam
39.	4.01.19	Kecamatan Adimulyo
40.	4.01.20	Kecamatan Kuwarasan
41.	4.01.21	Kecamatan Puring
42.	4.01.22	Kecamatan Gombang
43.	4.01.23	Kecamatan Sempor
44.	4.01.24	Kecamatan Buayan
45.	4.01.25	Kecamatan Rowokele
46.	4.01.26	Kecamatan Ayah
47.	4.01.27	Kecamatan Sadang
48.	4.01.28	Kecamatan Poncowarno
49.	4.01.29	Kecamatan Padureso
50.	4.01.30	Kecamatan Bonorowo
	4.02	BIDANG PENGAWASAN
51.	4.02.1	Inspektorat
	4.03	BIDANG PERENCANAAN
52.	4.03.01	Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	4.04	BIDANG KEUANGAN
53.	4.04.1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
54.	4.04.2	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
	4.05	BIDANG KEPEGAWAIAN

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

No.	Kode SKPD	Nama SKPD
55.	4.05.1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

d. Kebijakan Pembangunan

Visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Kebumen tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, sebagai berikut:

1) Visi

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kebumen adalah “Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan”.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- a) Bersama : bermakna bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, seluruh komponen masyarakat dan pemerintah bergerak bersama-sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis;
- b) Menuju : bermakna bahwa dalam melaksanakan pembangunan senantiasa memiliki arah dan tujuan yang jelas dan terukur;
- c) Sejahtera : bermakna bahwa pembangunan harus diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa pangan, sandang, papan (perumahan), kesehatan, pendidikan dan sosial sehingga tercipta kemanusiaan yang adil dan beradab;
- d) Unggul : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu mengembangkan dan menciptakan potensi daerah menjadi produk unggulan daerah yang berdaya saing tinggi;
- e) Berdaya : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang memiliki kekuatan, kemampuan dan tenaga serta memiliki solusi terbaik dalam menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi;
- f) Agamis : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan mengedepankan potensi intelektual dan rohaniyah, yang dicirikan dengan sifat-sifat keimanan, ketakwaan, keadaban, keilmuan, kegigihan dalam kebaikan, kebenaran, dan persaudaraan;
- g) Berkelanjutan : bermakna bahwa seluruh pembangunan harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi dengan baik serta memiliki keberlangsungan terus-menerus (berkesinambungan) sehingga tercipta pembangunan yang bermanfaat, berdaya guna bagi masyarakat dan berwawasan lingkungan.

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

2) Misi

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

- a) Membangun sumberdaya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
- b) Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat;
- c) Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan;
- d) Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan;
- e) Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat; dan
- f) Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

2.2 Ekonomi Makro

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Nilai PDRB Kabupaten Kebumen atas dasar harga berlaku 2010 pada tahun 2018 mencapai 26.000.351,87 juta rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 1.927.579,37 juta rupiah dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 24.434.948,76 juta rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Kebumen pada tahun 2018 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Kebumen tahun 2018 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 18.773.833,50 juta rupiah. Angka tersebut naik dari 17.792.465,13 juta rupiah pada tahun 2017. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2018 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,52 persen, meingkat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,13 persen.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi yaitu sebesar 17,05 persen. Salah satu penyebabnya adalah peningkatan teknologi dan informasi yang cukup tinggi. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif. Sepuluh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif sebesar lima persen keatas. Sedangkan tujuh lapangan usaha lainnya berturut-turut tercatat mengalami pertumbuhan positif namun lebih rendah, yaitu kurang dari lima persen.

LAJU PERTUMBUHAN PDRB KABUPATEN KEBUMEN MENURUT LAPANGAN USAHA (PERSEN)

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,11	6,75	-5,84	0,43	3,10
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	3,26	7,23	-5,82	0,12	2,76
	1.1. Tanaman Pangan	1,85	13,08	-6,74	-2,25	2,75
	1.2. Tanaman Hortikultura	6,23	6,32	-9,57	0,22	3,21
	1.3. Perkebunan	3,36	-0,88	-2,28	2,34	0,03
	1.4. Peternakan	1,14	-3,42	2,96	6,64	5,12
	1.5. Jasa Pertanian dan Perburuan	4,59	5,26	4,67	3,33	1,15
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	-2,30	-22,24	0,67	0,18	1,46
	3 Perikanan	2,65	21,16	-12,81	17,04	20,15
B	Pertambangan dan Penggalian	5,65	2,12	-1,22	4,01	3,18
C	Industri Pengolahan	9,63	4,91	9,55	5,68	5,59
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,74	2,18	7,97	6,23	6,76
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	3,54	2,33	2,40	0,23	4,67
F	Konstruksi	4,91	3,47	13,43	4,40	2,74
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	3,23	7,35	8,67	7,10	6,09
H	Transportasi dan Pergudangan	10,00	10,95	12,47	7,31	5,66
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,40	7,25	10,42	8,73	8,20
J	Informasi dan Komunikasi	17,70	9,44	13,62	15,72	17,09
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,63	6,93	6,76	5,03	2,18
L	Real Estate	5,54	6,84	7,37	3,87	3,21
M,N	Jasa Perusahaan	7,39	8,62	11,08	11,06	8,19



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	0,21	4,70	5,03	2,39	4,43
P	Jasa Pendidikan	10,37	8,24	7,02	7,99	9,72
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,49	8,73	9,73	8,86	9,49
R,S,T,U	Jasa lainnya	9,29	3,81	11,98	11,02	9,33
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN		5,79	6,28	5,01	5,13	5,52

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

b. Struktur Ekonomi

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2014 - 2018) struktur perekonomian Kabupaten Kebumen didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kebumen.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kebumen pada tahun 2018 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 22,09 persen (angka ini menurun dari 23,23 persen di tahun 2017). Selanjutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 20,37 persen (naik dari 20,09 persen di tahun 2017), disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 15,03 persen (naik dari 14,87 persen di tahun 2017).

Di antara ketiga lapangan usaha tersebut, Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan peranannya berangsur-angsur menurun.

**PERANAN (DISTRIBUSI PROSENTASE) PDRB KABUPATEN KEBUMEN MENURUT
LAPANGAN USAHA (PERSEN)**

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26,79	27,45	24,67	23,23	22,69
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	25,67	26,42	23,75	22,28	21,69
	1.1. Tanaman Pangan	11,36	12,32	10,88	10,05	9,75
	1.2. Tanaman Hortikultura	8,11	8,34	7,32	6,79	6,65
	1.3. Perkebunan	3,33	3,13	2,96	2,84	2,70
	1.4. Peternakan	2,46	2,25	2,21	2,22	2,24
	1.5. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,40	0,38	0,38	0,37	0,35
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,67	0,52	0,49	0,46	0,44
	3 Perikanan	0,45	0,50	0,42	0,48	0,55
B	Pertambangan dan Pengalihan	5,05	5,31	5,06	5,08	5,00

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

C	Industri Pengolahan	19,23	18,78	19,85	20,09	20,37
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04
F	Konstruksi	6,83	6,73	7,19	7,17	6,90
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,35	14,07	14,57	14,87	15,03
H	Transportasi dan Pergudangan	3,59	3,77	3,96	4,04	4,07
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,95	1,93	2,03	2,08	2,11
J	Informasi dan Komunikasi	1,64	1,59	1,68	1,89	2,05
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,87	2,88	2,92	2,99	2,90
L	Real Estate	1,25	1,24	1,26	1,25	1,21
M,N	Jasa Perusahaan	0,29	0,30	0,32	0,35	0,36
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,44	3,40	3,49	3,43	3,39
P	Jasa Pendidikan	9,28	9,19	9,43	9,81	10,10
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,06	1,08	1,10	1,14	1,17
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,27	2,17	2,35	2,47	2,54
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

c. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor- faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Kebumen atas dasar harga berlaku sejak tahun 2014 hingga 2018 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 PDRB per kapita tercatat sebesar 15.789.242,90 rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2018 mencapai 21.755.941,69 rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

PDRB DAN PENDUDUK KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
PDRB ADHK Berlaku (Juta Rupiah)	18.645.422,21	20.779.286,13	22.434.948,76	24.072.772,50	26.000.351,87
PDRB ADHK Konstan 2010 (Juta Rupiah)	15.163.091,84	16.115.554,01	16.923.719,54	17.792.465,13	18.773.833,50
Penduduk Pertengahan Tahun (Orang)	1.180.894,00	1.184.882,00	1.188.603,00	1.192.007,00	1.195.092,00
PDRB Perkapita (Rupiah)	15.789.242,90	17.537.008,86	18.875.056,48	20.195.160,35	21.755.941,69

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

2.3 Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) memuat komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019 harus searah dengan RKPD, artinya harus memperhatikan keselarasan kebijakan perencanaan pembangunan nasional, dan perencanaan pembangunan provinsi Jawa Tengah. Melalui rangkaian proses penyusunan dimaksud, diharapkan dapat terwujud dokumen Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019 yang implementatif dan akuntabel.

RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2019 yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan bagian perencanaan tahapan pelaksanaan 5 (lima) tahun ke-4 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 Tahap III dan Tahap IV, dan pelaksanaan tahun ke-3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, dimana pembangunan pada tahap ini ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan di segala bidang dengan menekankan upaya penguatan daya saing dan pertumbuhan perekonomian melalui pengembangan ekonomi wilayah agar masyarakat dapat berproduksi dengan bertumpu pada pengembangan potensi wilayah dan desa.

Kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan RPJMD Tahun 2016-2021 menjadi landasan penentuan strategi pembangunan daerah Tahun 2019 yaitu peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat dengan memfokuskan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan potensi unggulan setiap wilayah (kecamatan). Hal ini dalam upaya menyelesaikan permasalahan kemiskinan dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yaitu pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat diantaranya dengan pencapaian pendapatan perkapita yang tinggi, indeks gini yang rendah (rendahnya kesenjangan masyarakat), angka pengangguran yang rendah hingga angka kemiskinan yang rendah.

Secara umum belanja pemerintah daerah dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berpedoman pada RKPD Tahun 2019, dimana RKPD Tahun 2019 akan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin sehingga akan lebih mampu secara ekonomi dan memiliki tingkat daya beli yang baik serta memperluas akses masyarakat miskin, meningkatkan daya saing daerah untuk mendukung pengembangan sektor-sektor ekonomi serta meningkatkan kapasitas produksi/output, dan juga untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah. Arah belanja pemerintah daerah ini sebagai upaya untuk mencapai target-target pembangunan daerah yang difokuskan pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang akan menciptakan pemerataan pendapatan masyarakat dan rendahnya kesenjangan sosial, penciptaan lapangan kerja, kualitas hidup yang lebih baik hingga mampu mengentaskan kemiskinan yang menjadi masalah utama dalam pembangunan daerah. Selain itu, arahan belanja pemerintah daerah juga telah memperhatikan faktor-faktor eksternal yang akan mempengaruhi aktivitas perekonomian daerah.

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2019

Berdasar hasil evaluasi pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sampai tahun 2021 serta permasalahan yang ada maka dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan tema pembangunan Kabupaten Kebumen tahun 2019 adalah “Penguatan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian Guna Peningkatan Dan Perluasan Kesejahteraan Masyarakat”. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan, ditetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan tahun 2019 antara lain:

- 1) Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung oleh pembangunan pertanian dan pariwisata;
- 2) Pengurangan kemiskinan dan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan;
- 3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat;
- 4) Peningkatan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas; dan
- 5) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kondusivitas wilayah.

Dengan mendasarkan beberapa hal diatas, untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Kebumen pada Tahun 2019 yang sudah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka pendanaan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan umum APBD dituangkan pada PPAS Tahun 2019 sesuai kemampuan keuangan daerah, dan selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Kapasitas keuangan daerah pada prinsipnya menggambarkan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Analisis berbagai objek penerimaan daerah dilakukan untuk memahami trend atau perilaku penerimaan selama kurun waktu tertentu. Sementara analisis belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Sehubungan dengan prioritas pembangunan diatas Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen menetapkan kebijakan umum anggaran sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab dapat terwujud apabila daerah otonom memiliki kemampuan untuk memenuhi dan melaksanakan segala kewenangannya dengan dukungan kemampuan pendanaan yang dimiliki. Arah dan kebijakan pendapatan daerah didasari kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai daerah otonom dalam mengelola, menggali dan mengembangkan potensi pendapatan daerah sebagai sumber penerimaan utama guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pendapatan daerah dalam struktur APBD merupakan elemen yang sangat penting, baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Tidak dipungkiri bahwa pendapatan daerah, hampir di semua Pemerintah



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2019

Kabupaten masih bergantung dengan adanya dana-dana transfer baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sangat berpengaruh terhadap pembiayaan belanja program dan kegiatan yang ada di daerah. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah yang bersumber dari dana transfer masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik.

Pokok kebijakan pendapatan daerah pada Tahun 2019 diarahkan untuk :

- 1) penggalan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian (karena sebagian besar sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan pengusaha/wajib pajak golongan kecil menengah);
- 2) optimalisasi dana perimbangan (DAU, DAK, bagi hasil pajak dan bukan pajak) sehingga lebih proporsional; serta
- 3) penggalan dan optimalisasi potensi pendapatan lain yang sah.

Melihat dari kondisi realisasi pendapatan daerah dari tahun-tahun sebelumnya, dimana komponen dana transfer dari dana perimbangan selama Tahun Anggaran 2016, 2017 tidak mencapai target karena adanya beberapa ketentuan yang mengatur dalam pelaksanaannya, maka berakibat total pendapatan daerah selama 2 tahun terakhir tidak mencapai target yang diharapkan. Sehingga formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan lebih difokuskan pada upaya untuk memobilisasi Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan daerah lainnya. Pertumbuhan komponen pajak daerah, retribusi daerah dan hasil perusahaan daerah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD nanti. Sedangkan untuk dana perimbangan, komponen bagi hasil pajak serta komponen bagi hasil bukan pajak dan bantuan keuangan provinsi adalah dua unsur yang cukup penting dalam mendorong pertumbuhan dana perimbangan yang akan diperoleh nantinya.

b. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan, fungsi penunjang urusan pemerintahan, program pendukung operasional PD, dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Salah satu aspek terpenting dalam pengelolaan keuangan daerah adalah bagaimana mengelola belanja daerah secara efisien dan efektif, sehingga dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan menyelenggarakan pembangunan agar hasilnya benar-benar dapat dirasakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah menggambarkan program-

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

program strategis daerah, dengan skala prioritas dan arah kebijakan yang jelas. Dengan adanya dokumen-dokumen tersebut, Pemerintah Daerah dapat menentukan dan melaksanakan kerjasama (sharing) untuk membiayai program strategis dan prioritas daerah yang telah ditetapkan.

Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi, mencakup berbagai aspek pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kelancaran koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Pusat dan provinsi dicerminkan melalui kerjasama dalam wujud program Budget Sharing, kegiatan atau dana pendamping di bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, ekonomi kerakyatan, infrastruktur dan lain-lain. Selain itu dilaksanakan juga koordinasi sinergis untuk upaya-upaya percepatan pengentasan kemiskinan.

Dewasa ini, salah satu isu strategis dalam perencanaan alokasi belanja daerah adalah efisiensi. Persoalan efisiensi menjadi hal yang krusial karena dampak yang sangat terasa pada beban APBD yang semakin meningkat. Efisiensi akan terjadi manakala pemerintah daerah mampu menekan sejumlah biaya yang tidak perlu dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Oleh sebab itu dalam pengalokasian anggaran Program/Kegiatan dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

1. Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja bunga, (c) Belanja Subsidi, (d) Belanja Hibah, (e) Belanja Bantuan Sosial, (f) Belanja Bagi Hasil, (g) Belanja Bantuan Keuangan, dan (h) Belanja Tidak Terduga.

Arah kebijakan belanja tidak langsung tahun 2019, antara lain:

1) Belanja Pegawai

- a) Mengalokasikan belanja gaji pokok dan tunjangan PNS yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok PNSD dan pemberian gaji ketiga belas serta THR gaji keempat belas
- b) Mengantisipasi kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 1,5% (satu koma lima perseratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- c) Mengalokasikan kebutuhan belanja pegawai untuk mengakomodir kebutuhan pengangkatan CPNS sesuai formasi pegawai tahun 2019;
- d) Penganggaran gaji pokok dan tunjangan, dan belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
- f) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- g) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan Kepala Daerah mendasari Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- i) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan alokasi paling tinggi sebesar 5%.
- j) Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019 melalui DAK Non Fisik.
- 2) Belanja Bunga Belanja bunga tidak dialokasikan karena Pemerintah Daerah tidak melakukan pinjaman.
- 3) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Belanja hibah dan bantuan sosial penganggaran yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah Nomor 40 Tahun 2017, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

4) Belanja Bagi Hasil

a) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.

b) Penganggaran belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pihak ketiga, merupakan belanja bagi hasil kepada Pihak Perhutani atas pengelolaan obyek wisata Pantai Logending, dan kepada Koperasi Proyek Induk Pengembangan Wilayah Serayu Bogowonto Sempor atas pengelolaan obyek wisata Waduk Sempor.

5) Belanja Bantuan Keuangan

a) Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa diantaranya bantuan Alokasi Dana Desa dialokasikan mendasari ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bantuan penerusan Dana Desa yang bersumber dari APBN, bantuan keuangan kepada Desa Berinovasi, bantuan keuangan penyelenggaraan Pilkades, bantuan keuangan pembangunan kawasan perdesaan, dan bantuan operasional TPQ.

b) Bantuan keuangan kepada partai politik dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2019. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

6) Belanja Tidak Terduga

Perencanaan anggaran belanja tidak terduga dilakukan untuk penyediaan kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019, maupun untuk penyediaan manakala terjadi kelebihan penyetoran pendapatan pada tahun anggaran sebelumnya.

2. Kebijakan Belanja Daerah berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kebijakan Belanja Daerah berdasarkan urusan pemerintahan dialokasikan pada Belanja Langsung, dimana belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja pegawai, (b) Belanja barang dan jasa, dan (c) Belanja modal.

Sedangkan belanja daerah pada rencana PPAS Tahun Anggaran 2019 berpedoman pada RKPD Tahun 2019, mendasari ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terbagi dalam 4 (empat) urusan yaitu urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan, urusan pemerintahan fungsi penunjang, maka Pemerintah Daerah menyusun program dan kegiatan prioritas yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya Secara umum kebijakan belanja daerah tahun 2019 diarahkan untuk fokus meningkatkan perekonomian daerah melalui pertanian dan pariwisata dalam rangka percepatan penurunan kemiskinan.

Kebijakan umum belanja daerah tahun 2019 didasarkan pada pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif. Untuk itu, upaya-upaya yang perlu dilaksanakan antara lain:

- 1) Memprioritaskan pengalokasian belanja daerah yang fokus pada upaya-upaya penanganan permasalahan dan isu strategis daerah;
- 2) Alokasi belanja daerah untuk setiap kegiatan dilakukan melalui analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan. Program dan kegiatan direncanakan dengan didasarkan pada kebutuhan riil dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis.
- 3) Memprioritaskan alokasi belanja yang menunjang efektivitas dan akselerasi pencapaian Indikator Kinerja Utama pembangunan daerah;
- 4) Memprioritaskan alokasi belanja yang menunjang efektivitas pencapaian Indikator Kinerja Utama dan pelaksanaan tugas fungsi PD dalam rangka

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah;

5) Efisiensi dan efektifitas alokasi belanja lokalitas (belanja rutin setiap PD), serta mengutamakan alokasi belanja untuk urusan wajib pemerintah daerah; Rencana program prioritas pembangunan daerah tahun 2019 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, dan 5 (lima) fungsi penunjang urusan pemerintahan.

c. Pembiayaan Daerah

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan asumsi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), dan penerimaan kembali pemberian pinjaman Dana Talangan Pangan yang digulirkan kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) berdasarkan Surat Ketetapan Bupati Kebumen.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pemberian pinjaman berupa dana talangan pangan yang diberikan kepada Gabungan Kelompok Tani. Pengeluaran pembiayaan dialokasikan pada hal-hal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dilakukan dengan melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah mendasari ketentuan.

2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

a. Pendapatan

Estimasi pendapatan daerah didasarkan pada potensi dan perhitungan riil atas pendapatan daerah baik Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah.

Adapun estimasi Pendapatan Daerah tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp406.995.982.000,00 atau 14,52% dari total Pendapatan, yang terdiri dari:
 - a) Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp103.886.758.000.000,00 atau 3,70% dari total Pendapatan;
 - b) Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp33.027.995.000,00 atau 1,18% dari total Pendapatan;
 - c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp12.920.000.000,00 atau sebesar 0,46% dari total Pendapatan;
 - d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp257.161.229.000,00 atau sebesar 9,17% dari total Pendapatan;

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

- 2) Pendapatan Transfer sebesar **Rp2.265.050.628.000,00** atau sebesar **80,67%** dari total pendapatan, yang terdiri dari:
 - a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar **Rp1.690.309.375.000,00** atau sebesar **60,20%** dari total Pendapatan.
 - b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya **Rp429.981.020.000,00** atau **15,31%** dari total Pendapatan;
 - c) Transfer Pemerintah Daerah Lainnya **Rp134.668.233.000,00** atau sebesar **4,79%** dari total Pendapatan;
 - d) Bantuan Keuangan **Rp10.092.000.000,00** atau **0,36%** dari total Pendapatan;
 - 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar **Rp135.747.800.000,00** atau sebesar **4,83%** dari total Pendapatan.
- b. Belanja

Belanja Daerah secara rinci diestimasikan sebagai berikut:

- 1) Belanja Operasi sebesar **Rp1.999.234.961.000,00** atau sebesar **82,03%** dari total Belanja, yang terdiri dari:
 - a) Belanja Pegawai sebesar **Rp1.245.392.328.000,00** atau sebesar **51,10%** dari total Belanja;
 - b) Belanja Barang dan Jasa sebesar **Rp609.719.173.000,00** atau sebesar **25,02%** dari total Belanja;
 - c) Belanja Hibah sebesar **Rp100.062.212.000,00** atau sebesar **4,11%** dari total Belanja;
 - d) Belanja Bantuan Sosial sebesar **Rp44.061.248.000,00** atau sebesar **1,81%** dari total Belanja;
- 2) Belanja Modal sebesar **Rp437.033.598.000,00** atau sebesar **17,93%** dari total Belanja, yang terdiri dari:
 - a) Belanja Modal Tanah sebesar **Rp46.322.767.000,00** atau sebesar **1,90%** dari total Belanja;
 - b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar **Rp115.857.044.000,00** atau sebesar **4,75%** dari total Belanja;
 - c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar **Rp95.792.838.000,00** atau sebesar **3,93%** dari total Belanja;
 - d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar **Rp163.548.059.000,00** atau sebesar **6,71%** dari total Belanja;
 - e) Belanja Modal Aset tetap lainnya sebesar **Rp14.933.469.000,00** atau sebesar **0,61%** dari total Belanja;
 - f) Belanja Modal Aset Tak Berwujud sebesar **Rp579.421.000,00** atau sebesar **0,02%** dari total Belanja;

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

3) Belanja Tak Terduga sebesar Rp1.000.000.000,00 atau sebesar 0,04% dari Total Belanja;

c. Transfer

Transfer dianggarkan sebesar Rp564.248.231.000,00, yang terdiri dari:

- 1) Transfer Bagi Hasil Pendapatan sebesar Rp15.635.657.000,00 atau sebesar 2,77% dari total Transfer;
- 2) Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp548.612.574.000,00 atau sebesar 97,23% dari total Transfer.

d. Pembiayaan

Pembiayaan dianggarkan untuk menutup selisih jumlah pendapatan dan belanja daerah. Pada APBD tahun 2019 pembiayaan dianggarkan sebesar Rp193.722.380.000,00 yang berarti sisa lebih perhitungan anggaran minimal diharapkan sebesar tersebut. Pembiayaan terdiri dari estimasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp203.192.380.000,00 sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp9.470.000.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen diukur dari realisasi atas Anggaran yang telah disepakati dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019.

a. Pendapatan Daerah

Estimasi Pendapatan Daerah didasarkan pada potensi dan perhitungan secara riil atas Pendapatan Daerah baik Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah untuk komponen Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan untuk Dana Transfer mengacu pada pagu definitif.

Secara umum dari pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp2.807.794.410.000,00 pencapaian di Tahun Anggaran 2019 sebesar 100,38% dengan realisasi sebesar Rp2.818.494.983.540,68. Dibandingkan dengan pencapaian tahun 2018 yang sebesar Rp2.639.814.864.397,90 maka terjadi kenaikan sebesar 6,77%%. Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang	(%)
1.	Pendapatan	2.807.794.410.000,00	2.818.494.983.540,68	10.700.573.540,68	100,38

Pendapatan Daerah tersebut secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel Anggaran dan Realisasi Rincian Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	406.995.982.000,00	409.163.433.329,68	2.167.451.329,68	100,53
	Pajak daerah	103.886.758.000,00	110.614.568.810,00	6.727.810.810,00	106,48
	Retribusi Daerah	33.027.995.000,00	27.141.726.792,00	(5.886.268.208,00)	82,18
	Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang Dipisahkan	12.920.000.000,00	14.210.376.188,00	1.290.376.188,00	109,99
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	257.161.229.000,00	257.196.761.539,68	35.532.539,68	100,01
2.	PENDAPATAN TRANSFER	2.265.050.628.000,00	2.271.833.440.199,00	6.782.812.199,00	100,30
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.690.309.375.000,00	1.688.387.155.843,00	(1.922.219.157,00)	99,89
	Pendapatan transfer Pemerintah Pusat Lainnya	429.981.020.000,00	429.981.020.600,00	600,00	100,00
	Pendapatan transfer Pemerintah Daerah Lainnya	134.668.233.000,00	143.529.063.756,00	8.860.830.756,00	106,58
	Bantuan keuangan	10.092.000.000,00	9.936.200.000,00	(155.800.000,00)	98,46
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	135.747.800.000,00	137.498.110.012,00	1.750.310.012,00	101,29
	Pendapatan Hibah	135.747.800.000,00	137.498.110.012,00	1.750.310.012,00	101,29
	Total	2.807.794.410.000,00	2.818.494.983.540,68	10.700.573.540,68	100,38



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui Target Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2019 sebesar Rp406.995.982.000,00 dan terealisasi sebesar Rp409.163.433.329,68 atau sebesar 100,53%. Realisasi ini diperoleh dari Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp110.614.568.810,00 dari target sebesar Rp103.886.758.000,00 atau sebesar 106,48%, realisasi Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp27.141.726.792,00 dari target sebesar Rp33.027.995.000,00 atau sebesar 82,18%, realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp14.210.376.188,00 atau sebesar 109,99% dari target Rp12.920.000.000,00, dan realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp257.196.761.539,68 dari target Rp257.161.229.000,00 atau sebesar 100,01%.

Penerimaan Transfer mencapai target yang ditetapkan, dengan realisasi sebesar Rp2.271.833.440.199,00 dari target sebesar Rp2.265.050.628.000,00 atau mencapai 100,30%. Pendapatan Transfer ini terdiri dari Pendapatan Transfer dari pemerintah Pusat yang realisasinya sebesar Rp1.688.387.155.843,00 atau 99,89%, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dengan realisasi sebesar Rp429.981.020.600,00 atau 100%, Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah lainnya terealisasi sebesar Rp143.529.063.756 atau 106,58% dan Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp9.936.200.000,00 atau 98,46%.

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2019 terealisasi sebesar Rp137.498.110.012,00. Pendapatan ini diperoleh dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah sebesar Rp7.208.963.041,00 dan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp130.289.146.971,00.

Dilihat dari kontribusi masing-masing jenis pendapatan pada tahun 2019, Pendapatan Transfer merupakan komponen pendapatan yang utama dalam Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan kontribusi sebesar 80,89% dari total realisasi pendapatan. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah menyokong Pendapatan Daerah sebesar 15,23% dan Lain-lain Pendapatan yang Sah memberikan kontribusi sebesar 3,88%.

b. Belanja Daerah

Belanja Daerah tahun anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp2.437.268.559.000,00 dengan realiasi 92,17% atau sebesar Rp2.246.525.240.727,00 apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yang sebesar Rp2.145.847.613.126,00 maka mengalami kenaikan sebesar 4,69%.

Realisasi tersebut terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp1.880.683.876.699,00, Belanja Modal sebesar Rp365.840.794.028,00 dan Belanja Tak Terduga sebesar Rp.570.000,00.

Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dirinci sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Operasi	1.999.234.961.000,00	1.880.683.876.699,00	94,07
	a. Belanja Pegawai	1.245.392.328.000,00	1.186.788.783.406,00	95,29
	b. Belanja Barang dan Jasa	609.719.173.000,00	561.475.416.983,00	92,09
	d. Belanja Hibah	100.062.212.000,00	91.027.595.845,00	90,97
	e. Belanja Bantuan Sosial	44.061.248.000,00	41.392.080.465,00	93,94
2.	Belanja Modal	437.033.598.000,00	365.840.794.028,00	83,71
	a. Belanja Tanah	46.322.767.000,00	33.834.086.638,00	73,04
	b. Belanja Peralatan dan Mesin	115.857.044.000,00	99.985.234.817,00	86,30
	c. Belanja Gedung dan Bangunan	95.792.838.000,00	73.764.387.734,00	77,00
	d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	163.548.059.000,00	143.814.601.168,00	87,93
	e. Belanja Aset tetap Lainnya	14.933.469.000,00	14.089.486.071,00	94,35
	f. Belanja Aset Tidak Berwujud	579.421.000,00	352.997.600,00	60,92
3.	Belanja tak terduga	1.000.000.000,00	570.000,00	0,06
	a. Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	570.000,00	0,06
	Jumlah Belanja	2.437.268.559.000,00	2.246.525.240.727,00	92,17

Berdasarkan data di atas, maka Belanja Daerah didominasi Belanja Operasi yaitu sebesar 83,72% dari total Belanja Daerah, kemudian Belanja Modal sebesar 16,28% dari total Belanja Daerah dan Belanja Tak Terduga sebesar 0,00% dari total Belanja Daerah.

c. Transfer

Transfer dianggarkan sebesar Rp564.248.231.000,00 terealisasi Rp563.024.203.900,00 atau 99,78% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yang sebesar Rp506.200.367.250,00 maka mengalami kenaikan sebesar 11,22%.

Realisasi Transfer Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut.

Tabel Anggaran dan Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	15.635.657.000,00	15.502.510.500,00	99,15
	a. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	10.008.676.000,00	9.981.797.400,00	99,73
	b. Transfer Bagi Hasil Pajak Pendapatan Lainnya	5.626.981.000,00	5.520.713.100,00	98,11
2.	Transfer Bantuan Keuangan	548.612.574.000,00	547.521.693.400,00	99,80
	a. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	546.668.667.000,00	546.159.768.400,00	99,91
	b. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.943.907.000,00	1.361.925.000,00	70,06
	Jumlah Transfer	564.248.231.000,00	563.024.203.900,00	99,78



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Berdasarkan data dari tabel diatas realisasi Transfer tahun anggaran 2019 didominasi oleh Transfer Bantuan Keuangan yang terealisasi sebesar Rp547.521.693.400,00 atau 97,25% dari realisasi Transfer. Sedangkan Transfer Bagi Hasil Pendapatan terealisasi sebesar Rp15.502.510.500,00 atau 2.75% dari realisasi Transfer.

d. Pembiayaan

Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019 disajikan sebagai berikut:

Tabel Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2019

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Penerimaan Pembiayaan			
a.	Penggunaan SILPA	201.692.380.000,00	201.692.379.502,50	100,00
b.	Penerimaan Kembali Piutang	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00
	Jml Penerimaan	203.192.380.000,00	203.192.379.502,50	100,00
2.	Pengeluaran Pembiayaan			
a.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	7.970.000.000,00	7.970.000.000,00	100,00
b.	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00
	Jml Pengeluaran	9.470.000.000,00	9.470.000.000,00	100,00
	Pembiayaan Netto	193.722.380.000,00	193.722.379.502,50	100,00

e. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Dari penjelasan komposisi realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan di atas, diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2019 sebesar Rp202.667.918.416,18

2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

a. Pendapatan Daerah

Adanya semangat Otonomi Daerah, mendorong daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari potensi pendapatan yang ada. Namun demikian potensi – potensi penerimaan daerah belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen, karena ada beberapa permasalahan:

- 1) Belum terintegrasinya sistem pengelolaan pendapatan daerah baik mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
- 2) Masih adanya tarif retribusi yang belum mencerminkan besaran wajar biaya operasional pelayanan;
- 3) Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah;
- 4) Pada kelompok penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah permasalahan yang selalu terjadi adalah kesulitan melakukan prediksi serta terlambatnya informasi atas penerimaan dan bagi hasil baik pajak maupun sumber daya alam dari pemerintah dan penerimaan dana bagi hasil dari provinsi;
- 5) Ketatnya persyaratan pencairan Dana transfer dari Pemerintah Pusat.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Adapun solusi yang diambil adalah:

- 1) Mengembangkan integrasi sistem pengelolaan pendapatan daerah, salah satu diantaranya melalui penyiapan sistem informasi manajemen pelaporan data Wajib pajak secara *online*;
- 2) Penyesuaian tarif retribusi dengan mempertimbangkan nilai kewajaran dan kepatuhan;
- 3) Mempersiapkan kualitas dan kompetensi tenaga pengelola pendapatan daerah seperti pemeriksa pajak daerah, penilai dan juru sita melalui pelatihan, bimbingan teknik dan *in house training*;
- 4) Melakukan sosialisasi di berbagai media, memberikan apresiasi kepada wajib pajak dan sosialisasi tatap muka dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pendapatan daerah, khususnya mengenai pajak daerah dan retribusi daerah agar dapat memenuhi kewajiban untuk membayar pajak secara tepat waktu dan tepat jumlah.

b. Belanja Daerah

Bahwa Anggaran Belanja Daerah sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai, komponen gaji dan tunjangan. Disisi lain dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat di bidang pembangunan mutlak diperlukan, sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang ada, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah berupaya maksimal untuk mengalokasikan kegiatan di bidang penyediaan fasilitas umum dan infrastruktur lainnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat.

Bahwa pendapatan tidak mencukupi untuk membiayai belanja daerah secara keseluruhan sehingga pelaksanaannya disesuaikan dengan skala prioritas dan tahapan pencapaian Rencana Strategi yang ada.

Solusi terhadap beban belanja pegawai yang relatif masih dominan, dan untuk belanja pelayanan publik yang relatif kecil maka dilakukan perencanaan dan pengalokasian anggaran berdasarkan visi, misi dan tujuan daerah, kebutuhan mendesak masyarakat serta dilakukannya penajaman skala prioritas.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Aliran Kas serta Catatan atas Laporan Keuangan berdasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Kebumen.

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah atau satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah atau organisasi lainnya menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Entitas Pelaporan pada Pemerintah Kabupaten Kebumen dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen yang menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen meliputi rekening-rekening Entitas Pemerintah Daerah secara keseluruhan yang tidak dipisah-pisahkan, termasuk seluruh unit kerja dalam organisasi Pemerintah Kabupaten Kebumen. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen merupakan hasil konsolidasi dari laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen selaku entitas akuntansi.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen tidak mengkonsolidasikan rekening-rekening yang merupakan entitas kekayaan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang dipisahkan baik berbentuk Perusahaan Daerah maupun Yayasan dan Entitas terpisah lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kebumen.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 adalah basis akrual, dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 menggunakan nilai perolehan historis dengan menggunakan mata uang rupiah sehingga transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

tukar kurs tengah Bank Indonesia. Angka-angka dalam laporan keuangan disajikan sampai dengan dua digit di belakang koma.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi akun yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Kebumen secara rinci dijelaskan sebagai berikut.

4.4.1. Kebijakan Akuntansi Aset

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar. Aset lancar meliputi Kas dan setara Kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Adapun aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan Aset Tak Berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

4.4.1.1. Aset Lancar

4.4.1.1.1. Kas dan Setara Kas

a. Definisi

- 1) Kas dan setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- 2) Kas meliputi seluruh Uang Persediaan (Sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan), Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran, dan uang tunai atau simpanan di bank yang belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Termasuk kas adalah:

- 1) pendapatan yang telah diterima Rekening Kas Umum Daerah;
- 2) penerimaan kas yang diterima oleh Bendahara Penerimaan sebagai pendapatan daerah yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan tanggal pelaporan keuangan;
- 3) penerimaan transitoris oleh Bendahara Umum Daerah yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Negara maupun pihak lain sampai dengan tanggal pelaporan keuangan;
- 4) potongan pajak oleh Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Negara sampai dengan tanggal pelaporan keuangan;
- 5) kas yang diterima dan digunakan langsung oleh SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah sebagai pendapatan Badan Layanan Umum Daerah;
- 6) kas yang diterima dan digunakan langsung oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang merupakan bagian dari entitas SKPD yang dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah untuk disahkan sebagai pendapatan; dan



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

- 7) hibah langsung yang diterima SKPD yang kemudian digunakan langsung oleh SKPD tanpa disetorkan terlebih dahulu ke Rekening Kas Umum Daerah dan dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah untuk diakui sebagai pendapatan daerah.

Kas terdiri dari:

- 1) Kas di Kas daerah;
- 2) Kas di Bendahara Penerimaan;
- 3) Kas di Bendahara Pengeluaran;
- 4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah; dan
- 5) Kas Lainnya.

Termasuk dalam setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek yaitu kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

b. Pengakuan

- 1) Kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.
- 2) Hibah Langsung yang diterima SKPD diakui pada saat dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah untuk disahkan sebagai pendapatan daerah.

c. Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

d. Penyajian

- 1) Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.
- 2) Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

e. Pengungkapan

Pengungkapan kas dan setara kas dalam CaLK antara lain mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) rincian kas dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;
- 2) rincian kas dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan seperti PPN/PPH yang dipungut tetapi belum disetorkan ke Kas Negara, Iuran Tunjangan Kesehatan/Taspen/Taperum/Jaminan Kecelakaan Kerja/Jaminan Kematian yang belum disetorkan dan lain-lain; dan
- 3) informasi lainnya yang dianggap penting.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

4.4.1.1.2. Investasi Jangka Pendek

a. Definisi

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana Pemerintah Daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas dan berisiko rendah serta dimiliki dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Investasi Jangka Pendek dapat berupa:

- 1) Deposito;
- 2) Surat Utang Negara; dan
- 3) Sertifikat Bank Indonesia.

b. Pengakuan

- 1) investasi jangka pendek diakui saat terdapat pengeluaran kas yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) memungkinkan Pemerintah Daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; dan
 - b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).
- 2) Penerimaan Kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan Pemerintah Daerah. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan (Pendapatan Asli Daerah).

c. Pengukuran

Pengukuran investasi jangka pendek sesuai dengan jenisnya, sebagai berikut:

- 1) Deposito Berjangka dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut;
- 2) Surat Utang Negara dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar; dan
- 3) Sertifikat Bank Indonesia dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar.

d. Penyajian

Investasi jangka pendek disajikan di Neraca sebagai bagian dari Aset Lancar.

e. Pengungkapan

Pengungkapan investasi jangka pendek dalam CaLK antara lain mengenai:

- 1) jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki;
- 2) penurunan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki; dan
- 3) perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (bila ada).



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

4.4.1.1.3. Piutang

a. Definisi

- 1) piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- 2) piutang diklasifikasikan berdasarkan peristiwa yang menimbulkan piutang, yaitu:
 - a) Piutang Pendapatan, meliputi:
 - (1) piutang berdasarkan pungutan Pendapatan Daerah, adalah hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul berdasarkan Undang-undang Pajak dan Retribusi daerah meliputi piutang pajak dan piutang retribusi, serta peraturan daerah yang berlaku di Kabupaten Kebumen meliputi Piutang lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
 - (2) piutang berdasarkan perikatan perjanjian, adalah hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain atau adanya transaksi dibayar di muka; dan
 - (3) piutang transfer antar pemerintahan, adalah hak Pemerintah Daerah untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan. Piutang ini dapat timbul karena perbedaan waktu antara timbulnya hak tagih dan saat dilaksanakannya pembayaran melalui transfer.
 - b) Piutang lainnya, meliputi:
 - (1) piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi, adalah hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena adanya peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang disebabkan karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputus/ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena adanya kerugian negara/daerah seperti Piutang Tuntutan Ganti Rugi; dan
 - (2) piutang berdasarkan peristiwa lainnya, adalah hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena adanya peristiwa lainnya selain peristiwa di atas, meliputi Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Uang Muka Belanja, Beban dibayar di muka, dan uang muka yang harus dipertanggungjawabkan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

b. Pengakuan

1) Piutang Pendapatan:

- a) Piutang berdasarkan pungutan Pendapatan Daerah dapat diakui sebagai piutang harus memenuhi kriteria:
 - (1) telah diterbitkan Surat Ketetapan, seperti Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan; dan
 - (2) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
- b) Piutang berdasarkan perikatan perjanjian dapat diakui sebagai piutang apabila memenuhi kriteria:
 - (1) didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - (2) jumlah piutang dapat diukur;
 - (3) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
 - (4) belum dilunasi sampai akhir periode pelaporan.
- c) Piutang transfer antar pemerintahan dapat diakui sebagai piutang apabila memenuhi kriteria:
 - (1) Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam diakui apabila telah diterima alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan;
 - (2) Piutang Dana Alokasi Umum diakui apabila telah diterima alokasi Dana Alokasi Umum yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden;
 - (3) Piutang Dana Alokasi Khusus diakui apabila telah diterima alokasi Dana Alokasi Khusus yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan;
 - (4) Piutang Dana Otonomi Khusus diakui apabila telah diterima alokasi Dana Otonomi Khusus yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur; dan
 - (5) Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari provinsi diakui apabila telah diterima alokasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.
- d) Piutang Lain-lain Pendapatan yang Sah dapat diakui apabila memenuhi kriteria:
 - (1) Piutang Pendapatan Hibah diakui apabila telah diterbitkan Naskah Perjanjian Hibah; dan
 - (2) Piutang Pendapatan dana Darurat diakui apabila telah diterima alokasi dana Darurat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

2) Piutang lainnya:

- a) Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi diakui apabila telah memenuhi kriteria:
 - (1) telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak; atau
 - (2) telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara kepada pihak yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.
- b) Piutang berdasarkan peristiwa lainnya dapat diakui apabila memenuhi kriteria:
 - (1) Uang Muka belanja/Uang Muka yang harus dipertanggungjawabkan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran untuk pembayaran uang muka belanja/panjar kegiatan; dan



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

(2) Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan pada saat pelaporan per tanggal Neraca, dengan menentukan jangka waktu pengembaliannya sesuai dengan perikatan dan/atau surat ketetapannya.

c. Pengukuran

- 1) Piutang dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) dengan memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.
- 2) Penyisihan kerugian piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang dan dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang.
- 3) Untuk menentukan besarnya penyisihan pada tiap akhir tahun piutang dikelompokkan menurut umurnya (*aging schedule*) terlebih dahulu sebagai dasar perhitungan. Besarnya penyisihan piutang pada tiap akhir tahun ditentukan berdasarkan umur piutang sebagai berikut:

Tabel Piutang Pajak

NO.	UMUR PIUTANG	% PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH
1.	1 s/d 2 tahun	30 %
2.	> 2 s/d 3 tahun	50 %
3.	> 3 s/d 5 tahun	75 %
4.	> 5 tahun	100 %

Tabel Piutang Retribusi Daerah

NO.	UMUR PIUTANG	% PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH
1.	1 s/d 2 tahun	30 %
2.	> 2 s/d 3 tahun	50 %
3.	> 3 s/d 5 tahun	75 %
4.	> 5 tahun	100 %

Tabel Piutang Lainnya Tuntutan Ganti Rugi

NO.	UMUR PIUTANG	% PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH
1.	1 s/d 6 bulan	20 %
2.	> 6 bl s/d 12 bulan	40 %
3.	> 12 bl s/d 18 bulan	60 %
4.	> 18 bulan s/d 24 bulan	80%
5.	>24 bulan	100%

Tabel Piutang Lainnya karena perikatan/perjanjian

NO.	UMUR PIUTANG	% PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH
1.	1 s/d 2 tahun	30 %
2.	> 2 s/d 3 tahun	50 %
3.	> 3 s/d 5 tahun	75 %
4.	> 5 tahun	100 %

- 4) Proses penghapusan piutang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 5) Jika terdapat pelunasan atas piutang-piutang yang telah dihapuskan sebagaimana dimaksud pada huruf d pelunasan tersebut dibukukan sebagai Pendapatan Lain-lain tahun berjalan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

d. Penyajian

Piutang disajikan di Neraca sebagai bagian dari Aset Lancar dengan menyajikan nilai penyesuaian.

e. Pengungkapan

- 1) Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - a) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - b) rincian jenis-jenis saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - c) penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
 - d) jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
- 2) Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

4.4.1.1.4. Persediaan

a. Definisi

- 1) persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Persediaan merupakan aset yang berupa:
 - a) barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
 - b) bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih;
 - c) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur; dan



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

- d) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
 - 3) Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.
- b. Pengakuan
- Persediaan diakui:
- 1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
 - 2) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
- c. Pengukuran
- 1) Persediaan disajikan sebesar:
 - a) biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
 - b) harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis;
 - c) nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
 - 2) persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar;
 - 3) persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Harga Pembelian Terakhir; dan
 - 4) persediaan dicatat dengan metode periodik, artinya fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan.
- d. Penyajian
- Persediaan disajikan di Neraca sebagai bagian dari aset lancar.
- e. Pengungkapan
- Pengungkapan persediaan dalam Laporan Keuangan antara lain:
- 1) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

- 2) penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- 3) jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.4.1.2. Aset Non Lancar

4.4.1.2.1. Investasi Jangka Panjang

a. Definisi

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

1) Investasi Nonpermanen

- a) investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

Investasi Non Permanen dapat berupa:

- (1) pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya;
 - (2) penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 - (3) dana yang disisihkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan
 - (4) investasi non permanen lainnya yang sifatnya tidak untuk dimiliki secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.
- b) Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
 - c) Dana Bergulir mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - (1) merupakan bagian dari Keuangan Daerah;
 - (2) tercantum dalam APBD dan atau laporan keuangan;
 - (3) dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - (4) merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat, ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir); dan



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

(5) Pemerintah Daerah dapat menarik kembali dana bergulir.

- d) Dana Bergulir dalam APBD dianggarkan pada Pengeluaran Pembiayaan, untuk pengembalian pokok Dana Bergulir dicatat pada Penerimaan Pembiayaan pos Penerimaan Kembali Pinjaman dan bagi hasil jasa usaha Dana Bergulir dicatat pada Pendapatan Asli Daerah-Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- e) Alokasi Anggaran Dana Bergulir berada di Bendahara Umum Daerah tetapi pelaksanaan pengelolaannya didelegasikan kepada SKPD yang membidangi.
- f) Dana Bergulir disajikan dalam LRA sebagai Pengeluaran Pembiayaan sebesar jumlah Kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan Dana Bergulir.
- g) Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir, tetapi secara periodik Pemerintah Daerah harus melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di Neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net realizable Value*). Penyesuaian tersebut berdasarkan data yang dilaporkan oleh SKPD yang membidangi atas pencatatan penatausahaan dana bergulir.
- h) Untuk memperoleh nilai bersih yang dapat direalisasikan, SKPD yang membidangi dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging scedule*), sehingga diketahui jumlah dana bergulir yang ‘benar-benar tidak dapat ditagih’, dana bergulir kategori ‘diragukan dapat ditagih’ dan dana bergulir yang ‘dapat ditagih’ yang ditentukan berdasarkan umur dana bergulir sejak jatuh tempo sebagai berikut:

Tabel Umur Dana Bergulir

No.	Umur Dana Bergulir	% Penyisihan Dana Bergulir	Kategori
1.	1 s/d 2 tahun	30 %	dapat ditagih
2.	>2 s/d 3 tahun	50 %	memungkinkan dapat ditagih
3.	>3 s/d 5 tahun	75 %	diragukan dapat ditagih
4.	> 5 tahun	100 %	tidak dapat ditagih

2) Investasi Permanen

- a) Investasi Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.
- b) Investasi Permanen dapat berupa:
 - (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara; dan
 - (2) Investasi Permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

- b. Pengakuan
- 1) Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) memungkinkan Pemerintah Daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
 - b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).
 - 2) Pengakuan hasil investasi dapat dilakukan dengan cara:
 - a) hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi; dan
 - b) apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang berupa deviden tunai yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah.
- c. Pengukuran
- 1) Investasi Permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - 2) Investasi Nonpermanen:
 - a) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya;
 - b) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan;
 - c) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah (seperti Proyek Investasi Rakyat) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga;
 - d) pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi Pemerintah Daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada;
 - e) pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi; dan
 - f) Dana Bergulir diukur berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan, dilaksanakan dengan mengurangkan akun Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir.
- d. Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
- 1) metode biaya;

dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
 - 2) metode ekuitas;

dengan menggunakan metode ekuitas Pemerintah Daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

rugi Pemerintah Daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

- 3) metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode tersebut didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) menggunakan metode biaya;
- 2) kepemilikan 20% (dua puluh persen) sampai 50% (lima puluh persen), atau kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- 3) kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh persen) menggunakan metode ekuitas; dan
- 4) kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- 1) kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- 2) kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- 3) kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*; dan
- 4) kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

- e. Penyajian

Investasi Jangka Panjang disajikan di Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

- f. Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK antara lain mengenai metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

4.4.1.2.2. Aset tetap

- a. Definisi

- 1) aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- 2) aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

a) tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

b) peralatan dan mesin

peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c) gedung dan bangunan

gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d) jalan, irigasi, dan jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e) aset tetap lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f) konstruksi dalam pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

b. Pengakuan

- 1) aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah;
- 2) apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya;
- 3) untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) berwujud;
 - b) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

- c) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f) merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- g) nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

Tabel Minimal kapitalisasi Aset

No.	Uraian	Jumlah Harga Satuan/Unit (Rp)
1.	Tanah	-
2.	Peralatan dan Mesin	300.000
3.	Gedung dan Bangunan	10.000.000
4.	Jalan	-
5.	Jembatan	-
6.	Irigasi/Bangunan Air/Pengaman Sungai	-
7.	Instalasi dan Jaringan	-
8.	Buku	-
9.	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	-
10.	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	-

- a) pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas akan diperlakukan sebagai belanja; dan
 - b) aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- c. Pengukuran
- 1) aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
 - 2) biaya perolehan aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;
 - 3) biaya perolehan aset tetap yang dapat diatribusikan secara langsung meliputi:
 - a) honorarium Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b) honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
 - c) honorarium Tim Peneliti Kontrak;
 - d) belanja dokumen/administrasi tender;
 - e) belanja jasa pengumuman lelang/pemenang lelang;
 - f) belanja jasa konsultasi (apabila pengadaan aset tetap membutuhkan/menggunakan jasa konsultan);
 - g) belanja perjalanan dinas yang berkaitan dengan pengadaan aset tetap (untuk survey, pembelian, pengawas lapangan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan); dan
 - h) biaya lainnya sampai dengan aset siap digunakan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

- 4) biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya;
- 5) setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian;
- 6) bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh;
- 7) jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai;
- 8) biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan;
- 9) suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperolehnya itu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas;
- 10) aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional;
- 11) pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut serta yang tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diakui sebagai beban pengeluaran pada periode di mana beban pengeluaran tersebut terjadi;
- 12) kriteria seperti pada paragraf di atas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Tabel Batasan Jumlah Biaya untuk Penentuan Kapitalisasi

No.	Uraian	Jumlah Harga Satuan/Unit (Rp)
1.	Tanah	-
2.	Peralatan dan Mesin	300.000
3.	Gedung dan Bangunan	10.000.000
4.	Jalan	-
5.	Jembatan	-
6.	Irigasi/Bangunan Air/Pengaman Sungai	-
7.	Instalasi dan Jaringan	-
8.	Buku	-
9.	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	-
10.	Hewan ternak dan tanaman/tumbuhan	-

Tabel Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap Karena Adanya Perbaikan Terhadap Aset Tetap Baik Berupa Overhaul dan Renovasi

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul Dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Alat Besar Apung	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Bantu	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	6
		>50% s.d 75%	9
		>75% s.d.100%	12
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul Dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d.100%	4
Alat Bengkel Tak ber Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	Overhaul	>0% s.d. 20%	1
		>21% s.d 40%	2
		>51% s.d 75%	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga		>0% s.d. 25%	0
Alat Kantor	Overhaul	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
Alat Studio		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Komunikasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Peralatan Pemancar	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Kesehatan Umum	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat laboratorium			
Unit Alat laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul Dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Laboratorium Fisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Persenjataan Senjata Api	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Senjata Sinar	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d.100%	2
Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Komputer			



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul Dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Komputer Unit	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Komputer	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Produksi	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Pengolahan dan Pemurnian	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Bantu Produksi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019**

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul Dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d.100%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Sar	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Kerja Penerbang	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Proses / Produksi			
Unit Peralatan Proses / Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu			
Rambu-rambu Lalu lintas Darat	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Laut	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	10
		>75% s.d.100%	15
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 30%	3
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul Dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Monumen			
Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Tugu Titik Kontrol / Prasasti			
Tugu / Tanda batas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 60%	5
		>60% s.d 100%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	3
		>10% s.d 20%	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana alam	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	7



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul Dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	7
Instalasi Pengelolaan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi gas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
Jaringan			
Jaringan air Minum	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Listrik	Overhaul	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Telepon	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Gas	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Alat Musik Modern/Band	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2

d. Penyajian

- 1) Aset tetap disajikan di Neraca berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

2) Penyusutan Aset Tetap:

- a) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- b) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- c) metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dengan asumsi nilai residu Rp.0,00 dan formula penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

- d) selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
- e) perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap adalah sebagai berikut:

Tabel Perkiraan Masa Manfaat

Kode Akun				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	10
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Kode Akun				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu	7
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

- f) Besarnya penyusutan setiap tahun disajikan dalam Neraca dan Laporan Operasional. Penyusutan disajikan dalam Neraca dengan akun Akumulasi Penyusutan yang mengurangi nilai perolehan aset tetap. Penyusutan disajikan dalam Laporan Operasional sebagai beban penyusutan.
- g) Neraca menyajikan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.
- 3) suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang;
- 4) aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK; dan
- 5) aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

- e. Pengungkapan
- 1) laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b) rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - (1) penambahan;
 - (2) pelepasan;
 - (3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
 - (4) mutasi aset tetap lainnya.
 - c) informasi penyusutan, meliputi:
 - (1) nilai penyusutan;
 - (2) metode penyusutan yang digunakan;
 - (3) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
 - (4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
 - 2) laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - a) eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b) kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c) jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - d) jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
 - 3) aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

4.4.1.2.3. Konstruksi dalam Pengerjaan

- a. Definisi
- 1) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.
 - 2) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
 - 3) Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.
- b. Pengakuan
- 1) Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam pengerjaan jika:
 - a) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

c) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

- 2) Konstruksi dalam pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
- 3) Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - b) dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Suatu konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

c. Pengukuran

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan sebesar persentase kemajuan fisik per tanggal pelaporan Neraca.

d. Penyajian

Konstruksi dalam pengerjaan disajikan di Neraca sebagai bagian dari aset tetap.

e. Pengungkapan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai konstruksi dalam pengerjaan pada akhir periode akuntansi, antara lain mengenai:

- 1) rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- 2) nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
- 3) jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
- 4) uang muka kerja yang diberikan; dan
- 5) retensi.

4.4.1.2.4. Dana Cadangan

a. Definisi

- 1) Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- 2) Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:
 - a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer kerekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

- d) sumber dana cadangan; dan
- e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- b. Pengakuan
Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan.
- c. Pengukuran
 - 1) dana cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan;
 - 2) pencairan dana cadangan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan;
 - 3) pembentukan dana cadangan menambah dana cadangan yang bersangkutan; dan
 - 4) hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah dana cadangan.
- d. Penyajian
Dana cadangan disajikan di Neraca pada kelompok aset non lancar.
- e. Pengungkapan
Pengungkapan dana cadangan dalam CaLK, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) dasar hukum (Peraturan Daerah) pembentukan dana cadangan;
 - 2) tujuan pembentukan dana cadangan;
 - 3) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - 4) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
 - 5) sumber dana cadangan; dan
 - 6) tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

4.4.1.2.5. Aset Lainnya

- a. Definisi
 - 1) Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
 - 2) Aset Lainnya terdiri dari:
 - a) Tagihan Penjualan Angsuran;
Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah Pemerintah Daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.
 - b) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah;
Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, Pemerintah Daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

- (1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa;
- (2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP);
- (3) Bangun Guna Serah-BGS (*Build, Operate, Transfer-BOT*); dan
- (4) Bangun Serah Guna-BSG (*Build, Transfer, Operate-BTO*).

d) Aset Tak Berwujud;

Aset Tak Berwujud adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset Tak Berwujud dapat berupa:

- (1) *Goodwill*;
- (2) Hak Paten atau Hak Cipta;
- (3) Royalti;
- (4) *Software*;

Software komputer yang diakui sebagai Aset Tak Berwujud adalah *software* yang dibangun sendiri atau diperoleh dengan cara pembelian yang dimaksudkan untuk digunakan dalam operasional pemerintahan, yang bukan merupakan bagian integral dari suatu *hardware*.

- (5) Lisensi;
- (6) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang; dan
- (7) Aset Tak Berwujud Lainnya.

e) Aset Lain-lain.

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

b. Pengakuan

- 1) Aset Lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
- 2) Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).
- 3) Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan.
- 4) Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan.
- 5) Bangun Guna Serah-BGS (*Build, Operate, Transfer-BOT*) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan.
- 6) Bangun Serah Guna-BSG (*Build, Transfer Operate,-BTO*) diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
- 7) Pengakuan *Software* komputer:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

- a) *Software* program yang diperoleh dengan cara dikontrakkan dengan pihak ketiga diakui pada saat diterbitkannya tagihan oleh Pihak Ketiga.
- b) *Software* yang diperoleh dengan cara pembelian:
 - (1) Perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, maka nilai perolehan *software* dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai Aset Tak Berwujud. Sedangkan perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan, maka nilai perolehan *software* tidak perlu dikapitalisasi.
 - (2) *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi sebagai Aset Tak Berwujud. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan, tidak perlu dikapitalisasi.
 - (3) *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi. *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak perlu dikapitalisasi.
 - (4) Pengeluaran terkait *software* yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi akan diakui sebagai beban operasi pada periode terjadinya.
- c. Pengukuran
 - 1) Aset Lainnya diukur sesuai biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
 - 2) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - 3) Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara perjanjian sewa aset yang bersangkutan.
 - 4) Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian.
 - 5) Bangun Guna Serah dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset Bangun Guna Serah tersebut.
 - 6) Bangun Serah Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan Pemerintah Daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
 - 7) Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas Pemerintah Daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Daerah tersebut.
 - 8) Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat untuk Aset Tak Berwujud diatur sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kodifikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
07.24.01.01	Perangkat Lunak	10
07.24.02.01	Lisensi	10
07.24.03.01	Hak Cipta	10
07.24.04.01	Hasil Kajian (DED)	10

- 9) Amortisasi disajikan dengan metode garis lurus, tanpa nilai residu yang diperhitungkan setiap akhir periode.
- 10) Apabila suatu Aset Tak Berwujud tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka Aset Tak Berwujud tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Apabila suatu Aset Tak Berwujud dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun Aset Tak Berwujud yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya.

d. Penyajian

Aset lainnya disajikan di Neraca sebagai bagian dari aset non lancar sebesar nilai tercatat neto, yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

e. Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam CaLK, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) besaran dan rincian aset lainnya;
- 2) kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
- 3) kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah (*Built, Operate and Transfer*) dan Bangun Serah Guna (*Built, Transfer and Operate*); dan
- 4) informasi lainnya yang penting.

4.4.2. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

a. Definisi

- 1) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah. Kewajiban Pemerintah Daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

- 2) Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- 3) Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer Pemerintah Daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga, dan bagian lancar utang jangka panjang.
- 4) Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:
 - a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
 - c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

b. Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

- 1) Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)
dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja alat tulis kantor.
- 2) Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)
dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.
- 3) Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*).
dalam kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah Daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Daerah.
- 4) Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)
dalam kejadian yang diakui Pemerintah Daerah, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal Pemerintah Daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2019

c. Pengukuran

- 1) Kewajiban Pemerintah Daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal necara. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.
- 2) Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek Pemerintah Daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya sebagai berikut:

- a) Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika Pemerintah Daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu Pemerintah Daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

- b) Pengukuran Utang Transfer

Utang Transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- c) Pengukuran Utang Bunga

Utang Bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

- d) Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Utang Perhitungan Pihak Ketiga dicatat sebesar saldo pungutan/potongang yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

- e) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- f) Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

- 3) Kewajiban atau utang jangka panjang Pemerintah Daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang Pemerintah Daerah, yaitu:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

a) utang yang tidak diperjualbelikan

utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.

b) utang yang diperjualbelikan

utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

d. Penyajian

Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang Pemerintah Daerah disajikan dalam neraca disisi pasiva.

e. Pengungkapan

Dalam pengungkapan pada CaLK terkait dengan kewajiban, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

- 1) jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- 2) jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- 3) bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- 4) konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
- 5) perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - a) pengurangan pinjaman;
 - b) modifikasi persyaratan utang;
 - c) pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - d) pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - e) pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - f) pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- 6) jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur; dan
- 7) biaya pinjaman:
 - a) perlakuan biaya pinjaman;
 - b) jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

- c) tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

4.4.3. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

a. Definisi

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas.

b. Pengakuan

Pengakuan atas ekuitas tergantung dari saat pengakuan aset dan kewajiban.

c. Penyajian dan Pengungkapan

Ekuitas disajikan di Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam CaLK.

4.4.4. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

a. Definisi

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah SAL dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

b. Pengakuan

Pendapatan-LRA menggunakan basis kas sehingga Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- 1) diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
- 2) diterima oleh SKPD; atau
- 3) diterima entitas lain diluar Pemerintah Daerah atas nama Bendahara Umum Daerah.

c. Pengukuran

- 1) Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

d. Penyajian

Pendapatan-LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah.

e. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah:

- 1) penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

- 2) penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- 3) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- 4) informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.5. Kebijakan Akuntansi Belanja

a. Definisi

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

b. Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

- 1) kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan; dan
- 3) dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

c. Pengukuran

Belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

d. Penyajian dan Pengungkapan

- 1) belanja disajikan dalam LRA. Rincian atas belanja tersebut dijelaskan dalam CaLK;
- 2) belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi; dan
- 3) penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.6. Kebijakan Akuntansi Transfer

a. Definisi

Transfer merupakan pengeluaran uang dari provinsi kepada kabupaten atau dari kabupaten kepada desa.

Transfer terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

1) Transfer Bagi Hasil Pendapatan

merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dari suatu Pemerintah Daerah ke Pemerintah Daerah yang lebih rendah.

2) Transfer Bantuan Keuangan

merupakan dana yang diberikan kepada Pemerintah Daerah lainnya yang digunakan untuk pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus termasuk bantuan keuangan kepada partai politik.

b. Pengakuan

Transfer diakui pada saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah.

c. Pengukuran

Transfer dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

d. Penyajian dan Pengungkapan

Transfer disajikan dalam LRA dengan klasifikasi transfer dan disajikan setelah klasifikasi belanja. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

4.4.7. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

a. Definisi

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

2) pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

b. Pengakuan



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

- 1) penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
 - 2) pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- c. Pengukuran
- 1) Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari penerimaan dan pengeluaran.
 - 2) Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.
- d. Penyajian dan Pengungkapan
- Pembiayaan disajikan dalam LRA dan rinciannya dijelaskan dalam CALK.

4.4.8. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

a. Definisi

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan yang dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah.

Termasuk pendapatan-LO adalah hibah langsung yang diterima SKPD yang kemudian digunakan langsung oleh SKPD tanpa disetorkan terlebih dahulu ke Rekening Kas Umum Daerah dan dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah untuk diakui sebagai pendapatan daerah.

b. Pengakuan

1) Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD:

a) Pendapatan Asli Daerah

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu Pendapatan Asli Daerah Melalui Penetapan, Pendapatan Asli Daerah Tanpa Penetapan, dan Pendapatan Asli Daerah dari Hasil Eksekusi Jaminan.

b) Pendapatan Asli Daerah Melalui Penetapan

Pendapatan Asli Daerah yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

c) Pendapatan Asli Daerah Tanpa Penetapan



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Pendapatan Asli Daerah yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

d) Pendapatan Asli Daerah dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

e) Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

f) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada PPKD, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/ Perorangan. Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut.

Hibah langsung yang diterima SKPD yang kemudian digunakan langsung oleh SKPD diakui pada saat dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah pada akhir periode.

g) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima.

2) Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2019

Pendapatan Daerah pada SKPD hanya sebagian dari Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan pajak daerah dalam hal instansi pungutan pajak terpisah dari Bendahara Umum Daerah, pendapatan retribusi dan sebagian dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Alternatif pengakuan pendapatan tersebut dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a) alternatif satu yaitu kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.
- b) alternatif dua yaitu kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah disampaikannya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dari Wajib Pajak ke SKPKD atas pendapatan terkait.
- c) alternatif tiga yaitu kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Pendapatan retribusi ini diakui ketika pembayaran telah diterima atau pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah.

c. Pengukuran

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

d. Penyajian dan pengungkapan

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

4.4.9. Kebijakan Akuntansi Beban

a. Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

b. Pengakuan

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2019

terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contoh: tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Sedangkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

1) Pengakuan Beban pada PPKD

a) Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

b) Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

c) Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Pengakuan beban hibah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah.

d) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial.

e) **Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.

f) **Beban Transfer**

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban transfer diakui saat diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.

2) **Pengakuan Beban Pada SKPD**

a) **Beban Pegawai**

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus pegawai negeri sipil sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan seperti honorarium non pegawai negeri sipil, atau melalui mekanisme langsung seperti beban gaji dan tunjangan.

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme langsung, beban pegawai diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah (jika terdapat dokumen yang memadai).

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (misal: bukti pembayaran honor) telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Beban pegawai yang pembayarannya didanai dari hibah langsung yang diterima SKPD diakui pada saat dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah pada akhir periode.

b) **Beban Barang**

Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019**

dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban barang diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

Beban barang yang pembayarannya didanai dari hibah langsung yang diterima SKPD diakui pada saat dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah pada akhir periode.

c. Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

- 1) harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal kewajiban yang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan mata uang rupiah; dan
- 2) menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diketahui harga perolehannya.

d. Penyajian dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam LO dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

4.4.10. Kebijakan Akuntansi Koreksi

Kesalahan merupakan akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sedangkan koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Kesalahan dapat terjadi karena adanya:

- a. keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran;
- b. kesalahan perhitungan matematis;
- c. kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi;
- d. kesalahan interpretasi fakta;
- e. kecurangan; atau
- f. kelalaian.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan menjadi:

a. kesalahan berulang dan sistemik

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan jurnal koreksi tidak perlu dibuat untuk kesalahan seperti ini, tetapi dicatat pada saat terjadi pengeluaran/penerimaan kas untuk kelebihan/kekurangan pendapatan dengan mengurangi/menambah Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

b. kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

1) kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban.

2) kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban.

Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan dilakukan dengan pembetulan sebagai berikut:

- a) kesalahan tidak mempengaruhi posisi kas, pembetulan dilakukan pada akun neraca terkait.
- b) kesalahan atas kelebihan pengeluaran Belanja/Beban sehingga mengakibatkan penerimaan kembali Belanja/Beban dilakukan pada akun Pendapatan lain-lain – LRA/Pendapatan lain-lain - LO.
- c) kesalahan atas kekurangan pengeluaran Belanja/Beban sehingga mengakibatkan penambahan belanja/beban dan mengurangi posisi kas, pembetulan dilakukan pada akun Saldo Anggaran Lebih/akun Ekuitas.
- d) koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LRA/ Pendapatan-LO yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo anggaran lebih/akun ekuitas.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 Pendapatan

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Pendapatan	2.807.794.410.000,00	2.818.494.983.540,68	10.700.573.540,68	100,38	2.639.814.864.397,90

Realisasi Pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp2.818.494.983.540,68,00 yang terdiri dari:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Pendapatan	2019			%	Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)		(Rp)
Pendapatan Asli Daerah	406.995.982.000,00	409.163.433.329,68	2.167.451.329,68	100,53	352.047.092.281,90
Pendapatan Transfer	2.265.050.628.000,00	2.271.833.440.199,00	6.782.812.199,00	100,30	2.161.177.552.652,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	135.747.800.000,00	137.498.110.012,00	1.750.310.012,00	101,29	126.590.219.464,00
Jumlah	2.807.794.410.000,00	2.818.494.983.540,68	10.700.573.540,68	100,38	2.639.814.864.397,90

Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019 mencapai target sebesar 100,38% dari anggaran dan naik 6,77% dari realisasi tahun 2018. Dari tabel dapat terlihat bahwa Pendapatan Transfer merupakan komponen pendapatan yang utama dalam Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan kontribusi sebesar 80,60% dari total realisasi pendapatan. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah menyokong Pendapatan Daerah sebesar 14,52% dan Lain-lain Pendapatan yang Sah memberikan kontribusi sebesar 4,88%.

Pendapatan Asli Daerah secara nominal mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2018 realisasinya sebesar Rp352.047.092.281,90 sedangkan Tahun 2019 sebesar Rp409.163.433.329,68 atau naik sebesar 16,22%, Pendapatan Transfer realisasinya sebesar Rp2.271.833.440.199,00 atau naik sebesar 5,12%, sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2019 realisasinya sebesar Rp137.498.110.012,00 atau naik sebesar 8,62% dari tahun 2018.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Uraian	2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Pendapatan Asli Daerah	406.995.982.000,00	409.163.433.329,68	2.167.451.329,68	100,53	352.047.092.281,90

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp409.163.433.329,68 terdiri dari:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah	2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Pajak Daerah	103.886.758.000,00	110.614.568.810,00	6.727.810.810,00	106,48	96.775.593.102,00
Retribusi Daerah	33.027.995.000,00	27.141.726.792,00	(5.886.268.208,00)	82,18	37.339.858.915,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.920.000.000,00	14.210.376.188,00	1.290.376.188,00	109,99	9.734.494.832,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	257.161.229.000,00	257.196.761.539,68	35.532.539,68	100,01	208.197.145.432,90
Jumlah	406.995.982.000,00	409.163.433.329,68	2.167.451.329,68	100,53	352.047.092.281,90

Dari 4 (empat) objek Pendapatan Asli Daerah ada 3 (tiga) yang mencapai target yaitu Pendapatan Pajak Daerah sebesar 106,48%, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 109,99% dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar 100,01%. Sedangkan Pendapatan Retribusi Daerah tidak mencapai target yaitu hanya terealisasi sebesar 82,18%.

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Tabel Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah

Uraian	TA 2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Pajak Daerah	103.886.758.000,00	110.614.568.810,00	6.727.810.810,00	106,48	96.775.593.102,00

Pajak Daerah sebesar Rp110.614.568.810,00 terdiri dari:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah

Pajak Daerah	2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Pajak Hotel	1.817.758.000,00	1.879.305.319,00	61.547.319,00	103,39	1.466.114.977,00
Pajak Restoran	6.500.000.000,00	7.883.696.222,00	1.383.696.222,00	121,29	5.847.193.517,00
Pajak Hiburan	209.000.000,00	388.339.976,00	179.339.976,00	185,81	157.819.095,00
Pajak Reklame	1.000.000.000,00	1.137.116.644,00	137.116.644,00	113,71	821.429.753,00
Pajak Penerangan Jalan	31.800.000.000,00	32.492.302.082,00	692.302.082,00	102,18	30.319.190.840,00
Pajak Parkir	250.000.000,00	317.326.717,00	67.326.717,00	126,93	244.350.410,00
Pajak Air Tanah	300.000.000,00	386.505.350,00	86.505.350,00	128,84	226.617.498,00
Pajak Sarang Burung	10.000.000,00	10.050.000,00	50.000,00	100,50	9.350.000,00
Pajak Mineral Bukan	6.000.000.000,00	4.953.016.259,00	(1.046.983.741,00)	82,55	5.324.860.774,00
PBB	45.000.000.000,00	48.222.131.277,00	3.222.131.277,00	107,16	42.248.611.770,00
BPHTB	11.000.000.000,00	12.944.778.964,00	1.944.778.964,00	117,68	10.110.054.468,00
Jumlah	103.886.758.000,00	110.614.568.810,00	6.727.810.810,00	106,48	96.775.593.102,00

Pendapatan dari Pajak Daerah Tahun 2019 terealisasi sebesar Rp110.614.568.810,00 naik sebesar 14,30% dibandingkan pendapatan Pajak Daerah Tahun 2018 yang sebesar Rp96.775.593.102,00. Dari 11 rincian objek pendapatan Pajak Daerah, 10 rincian objek pendapatan Pajak Daerah melampaui target, 1 rincian objek tidak mencapai target yaitu Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan pencapaian 82,55%, hal ini disebabkan target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan didasarkan realisasi tahun sebelumnya, namun dalam perkembangannya selama tahun 2019 banyak tambang yang tutup karena ijinnya sudah habis dan tidak diperpanjang, serta adanya penertiban tambang-tambang ilegal dari provinsi.

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Adapun Pendapatan Pajak Daerah tersebut ada pada OPD berikut:

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah per OPD

Pajak Daerah	2019				Realisasi 2018 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Pajak Hotel	1.817.758.000,00	1.879.305.319,00	61.547.319,00	103,39	1.466.114.977,00
Pajak Restoran	6.500.000.000,00	7.883.696.222,00	1.383.696.222,00	121,29	5.847.193.517,00
Pajak Hiburan	209.000.000,00	388.339.976,00	179.339.976,00	185,81	157.819.095,00
Pajak Reklame	1.000.000.000,00	1.137.116.644,00	137.116.644,00	113,71	821.429.753,00
Pajak Penerangan Jalan	31.800.000.000,00	32.492.302.082,00	692.302.082,00	102,18	30.319.190.840,00
Pajak Parkir	250.000.000,00	317.326.717,00	67.326.717,00	126,93	244.350.410,00
Pajak Air Tanah	300.000.000,00	386.505.350,00	86.505.350,00	128,84	226.617.498,00
Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	10.050.000,00	50.000,00	100,50	9.350.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6.000.000.000,00	4.953.016.259,00	(1.046.983.741,00)	82,55	5.324.860.774,00
Pajak Bumi dan Bangunan Persewaan dan Gedung	45.000.000.000,00	48.222.131.277,00	3.222.131.277,00	107,16	42.248.611.770,00
BPHTB	11.000.000.000,00	12.944.778.964,00	1.944.778.964,00	117,68	10.110.054.468,00
Jumlah	103.886.758.000,00	110.614.568.810,00	6.727.810.810,00	106,48	96.775.593.102,00

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Tabel Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah

Uraian	TA 2019				Realisasi 2018 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang	%	
Retribusi Daerah	33.027.995.000,00	27.141.726.792,00	(5.886.268.208,00)	82,18	37.339.858.915,00

Retribusi Daerah sebesar Rp27.141.726.792,00 terdiri dari:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah

Retribusi	Tahun 2019				Realisasi 2018 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Retribusi Pelayanan Kesehatan	200.000.000,00	198.745.250,00	(1.254.750,00)	99,37	12.919.303.260,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.030.500.000,00	943.905.700,00	(86.594.300,00)	91,60	831.355.600,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.140.000.000,00	800.241.000,00	(339.759.000,00)	70,20	759.535.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	5.543.057.000,00	3.997.763.750,00	(1.545.293.250,00)	72,12	3.850.405.650,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	750.000.000,00	778.312.500,00	28.312.500,00	103,78	652.535.500,00
Retribusi Pelayanan Pendidikan	78.400.000,00	60.984.000,00	(17.416.000,00)	77,79	60.984.000,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.035.336.000,00	949.416.000,00	(85.920.000,00)	91,70	704.544.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.706.003.000,00	2.405.730.075,00	(2.300.272.925,00)	51,12	2.354.186.175,00
Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	1.728.836.000,00	2.127.458.032,00	398.622.032,00	123,06	1.721.874.050,00
Retribusi Terminal	180.000.000,00	153.213.300,00	(26.786.700,00)	85,12	169.320.500,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	4.371.000.000,00	4.156.200.200,00	(214.799.800,00)	95,09	3.126.599.000,00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	2.720.000,00	1.960.000,00	(760.000,00)	72,06	2.220.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	50.000.000,00	27.770.000,00	(22.230.000,00)	55,54	34.905.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	8.848.751.000,00	7.698.989.900,00	(1.149.761.100,00)	87,01	8.341.922.800,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	317.392.000,00	605.412.500,00	288.020.500,00	190,75	300.522.500,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.977.000.000,00	2.197.519.585,00	(779.480.415,00)	73,82	1.462.355.880,00
Retribusi Izin Gangguan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	0,00	0,00
Retribusi Izin Trayek	60.000.000,00	38.105.000,00	(21.895.000,00)	63,51	47.290.000,00
Jumlah	33.027.995.000,00	27.141.726.792,00	(5.886.268.208,00)	82,18	37.339.858.915,00

Pendapatan dari Retribusi Daerah Tahun 2019 terealisasi 82,18% dan mengalami penurunan sebesar 27,31% jika dibandingkan pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2018 yang sebesar Rp37.339.858.915,00.

Dari 18 (delapan belas) objek pendapatan Retribusi Daerah hanya tiga yang dapat mencapai target yaitu Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tercapai 103,78%,

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Retribusi Tempat Pelelangan Ikan tercapai 123,06% dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang mencapai 190,75%.

Sedangkan lima belas lainnya tidak dapat mencapai target yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan dengan pencapaian 99,37% salah satu penyebab penurunan antara lain dikarenakan RSUD Prembun yang semula menyumbang retribusi pelayanan kesehatan telah beralih status menjadi BLUD dan Laboratorium Klinik yang minim pengunjung. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 91,60%, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar 70,20%, Retribusi Pelayanan Pasar sebesar 72,12%, Retribusi Pelayanan Pendidikan sebesar 77,79%, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar 91,70%, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 51,12%, Retribusi Terminal sebesar 85,12%, Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar 95,09%, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebesar 72,06%, Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar 55,54%, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar 87,01%, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar 73,82%, Retribusi Izin Gangguan 0% dan Retribusi Izin Trayek sebesar 63,51% kesemuanya disebabkan oleh penarikan yang belum maksimal dan optimal berdasarkan potensi sesungguhnya.

Dan dari 18 rincian objek pendapatan Retribusi Daerah tersebut, sebanyak 6 rincian objek pendapatan Retribusi Daerah mengalami penurunan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018, yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar 98,46%, Retribusi Terminal sebesar 9,51% Retribusi Tempat Penginapan /Pesanggrahan/Villa turun sebesar 11,71%, Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar 20,44%, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebesar 7,71% dan Retribusi Izin Trayek sebesar 19,42%.

Rincian Pendapatan Retribusi per OPD dapat dilihat pada Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah per OPD di **lampiran 1**.

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.920.000.000,00	14.210.376.188,00	1.290.376.188,00	109,99	9.734.494.832,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri dari:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	2019			%	Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)		(Rp)
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusda/BUMD:					
a. Apotik Luk Ulo	120.000.000,00	130.344.130,00	10.344.130,00	108,62	100.124.278,00
b. Perusda Air Minum (PDAM)	1.582.326.000,00	1.829.063.810,00	246.737.810,00	115,59	1.156.814.410,00
c. PD BPR Kebumen	1.100.000.000,00	1.125.861.846,00	25.861.846,00	102,35	779.696.827,00
d. PD BPR BKK Kebumen	3.037.674.000,00	3.075.472.682,00	37.798.682,00	101,24	2.759.340.653,00
e. Bank Jateng	7.080.000.000,00	8.049.633.720,00	969.633.720,00	113,70	4.938.518.664,00
Jumlah	12.920.000.000,00	14.210.376.188,00	1.290.376.188,00	109,99	9.734.494.832,00

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Pendapatan dari Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2019 terealisasi 109,99%, naik sebesar 45,98% dibandingkan pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2018 yang sebesar Rp9.734.494.832,00. Pendapatan tersebut berasal dari penerimaan pembagian deviden dari Perusahaan Daerah yang diterima Pemerintah Daerah.

5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Tabel Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Uraian	2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	257.161.229.000,00	257.196.761.539,68	35.532.539,68	100,01	208.197.145.432,90

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp257.196.761.539,68 terdiri dari:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Uraian	2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	628.493.000,00	781.423.477,00	152.930.477,00	124,33	995.197.353,00
Penerimaan Jasa Giro	4.500.000.000,00	7.358.931.704,00	2.858.931.704,00	163,53	4.601.897.200,00
Pendapatan Bunga Deposito	22.466.355.000,00	18.025.332.811,00	(4.441.022.189,00)	80,23	19.752.756.280,00
Pendapatan Denda Ketenagabatalan Pelaksanaan Pekerjaan	650.000.000,00	261.886.277,00	(388.113.723,00)	40,29	587.348.374,00
Pendapatan denda pajak	465.889.000,00	332.079.992,00	(133.809.008,00)	71,28	324.918.536,00
Pendapatan denda retribusi	513.000.000,00	453.321.200,00	(59.678.800,00)	88,37	517.246.670,00
Pendapatan Hasil eksekusi Atas Jaminan	0,00	0,00	0,00	0,00	345.825.650,00
Pendapatan dari pengembalian	3.970.000.000,00	1.374.233.566,00	(2.595.766.434,00)	34,62	1.914.077.557,00
Hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	0,00	0,00
Pendapatan dari BLUD	220.579.237.000,00	225.746.722.285,68	5.167.485.285,68	102,34	175.757.791.529,32
Lain-lain PAD yang sah lainnya	2.001.241.000,00	1.698.145.782,00	(303.095.218,00)	84,85	2.242.346.121,58
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	1.128.014.000,00	1.129.519.445,00	1.505.445,00	100,13	1.104.965.162,00
Hasil Pengelolaan dana Bergulir	250.000.000,00	35.165.000,00	(214.835.000,00)	14,07	52.775.000,00
Jumlah	257.161.229.000,00	257.196.761.539,68	35.532.539,68	100,01	208.197.145.432,90

Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2019 terealisasi 100,01% naik sebesar 23,54% dibandingkan Pendapatan tahun 2018 yang sebesar Rp208.197.145.432,90. Rincian objek pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang melampaui target anggaran yang ditetapkan sebanyak 4 objek, yaitu Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan sebesar 124,33%, Penerimaan Jasa Giro 163,53%, Pendapatan BLUD 102,34% dan Pendapatan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum 100,13%.

Rincian Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah per OPD dapat dilihat pada Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah per OPD di **lampiran 2**.

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer

Uraian	2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Pendapatan Transfer	2.265.050.628.000,00	2.271.833.440.199,00	6.782.812.199,00	100,30	2.161.177.552.652,00

Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp2.265.050.628.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.271.833.440.199,00 merupakan pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Pusat Lainnya, Pemerintah Daerah Lainnya dan Bantuan Keuangan.

Rincian Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer

Uraian	2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ kurang (Rp)	%	(Rp)
Transfer Pemerintah Pusat	1.690.309.375.000,00	1.688.387.155.843,00	(1.922.219.157,00)	99,89	1.654.135.303.906,00
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	429.981.020.000,00	429.981.020.600,00	600,00	100,00	350.023.637.000,00
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	134.668.233.000,00	143.529.063.756,00	8.860.830.756,00	106,58	133.143.854.746,00
Bantuan Keuangan	10.092.000.000,00	9.936.200.000,00	(155.800.000,00)	98,46	23.874.757.000,00
Jumlah	2.265.050.628.000,00	2.271.833.440.199,00	6.782.812.199,00	100,30	2.161.177.552.652,00

Pendapatan Transfer realisasinya sebesar 100,30% dari target anggaran sebesar Rp2.265.050.628.000,00 dan naik 5,12% dari penerimaan tahun 2018. Untuk Transfer Pemerintah Pusat tidak mencapai target atau sebesar 99,89 %, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak 73,76%, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar 58,32%, Dana Alokasi Umum sebesar 100% dan Dana Alokasi Khusus 101,70%. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berasal dari Dana Penyesuaian realisasinya sebesar 100%. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya yaitu penerimaan dari provinsi atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak realisasinya sebesar 106,58% dan Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar 98,46%.

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Uraian	2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Transfer Pemerintah Pusat	1.690.309.375.000,00	1.688.387.155.843,00	(1.922.219.157,00)	99,89	1.654.135.303.906,00

Realisasi pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat terealisasi Rp1.688.387.155.843,00 atau sebesar 99,89% dari target anggaran sebesar Rp1.690.309.375.000,00 atau meningkat sebesar 2,07% dibandingkan realisasi Tahun 2018 yang terealisasi sebesar Rp1.654.135.303.906,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari sebagai berikut.

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Uraian	2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Bagi Hasil Pajak	28.210.940.000,00	20.809.791.800,00	(7.401.148.200,0)	73,76	28.209.494.743,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2.313.470.000,00	1.349.316.600,00	(964.153.400,0)	58,32	1.417.931.636,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.279.681.428.000,00	1.279.681.428.000,00	-	100,00	1.234.003.169.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	380.103.537.000,00	386.546.619.443,00	6.443.082.443,0	101,70	390.504.708.527,00
Jumlah	1.690.309.375.000,00	1.688.387.155.843,00	(1.922.219.157,0)	99,89	1.654.135.303.906,00

5.1.1.2.1.1 Bagi Hasil Pajak

Tabel Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak

Uraian	2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Bagi Hasil Pajak	28.210.940.000,00	20.809.791.800,00	(7.401.148.200,0)	73,76	28.209.494.743,00

Bagi Hasil Pajak mencapai realisasi sebesar Rp20.809.791.800,00 atau 73,76% dari target anggaran sebesar Rp28.210.940.000,00. Bila dibandingkan realisasi tahun 2018 sebesar Rp28.209.494.743,00 turun sebesar 26,23%.

Rincian Dana Bagi Hasil Pajak adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Pajak	2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ kurang (Rp)	%	(Rp)
PBB Sektor Pertambangan	9.149.466.000,00	5.540.208.000,00	(3.609.258.000,00)	60,55	8.041.348.287,00
PBB Sektor Perhutanan	-	706.249.000,00	706.249.000,00	-	-
Bagi Hasil PPh	11.245.348.000,00	6.747.208.800,00	(4.498.139.200,00)	60,00	12.761.712.456,00
Bagi Hasil Cukai Tembakau	7.816.126.000,00	7.816.126.000,00	-	100,00	7.406.434.000,00
Jumlah	28.210.940.000,00	20.809.791.800,00	(7.401.148.200,00)	73,76	28.209.494.743,00

Dari 4 (empat) rincian objek Bagi Hasil Pajak terdapat dua yang tidak mencapai target yaitu Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan yang hanya terealisasi Rp5.540.208.000,00 atau sebesar 60,55% dan Bagi Hasil PPh terealisasi Rp6.747.208.800,00 atau sebesar 60,00%. Sedangkan untuk Bagi Hasil Cukai Tembakau mencapai target sebesar 100,00% atau senilai Rp7.816.126.000,00.

5.1.1.2.1.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Tabel Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Uraian	2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ kurang (Rp)	%	(Rp)
Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	2.313.470.000,00	1.349.316.600,00	(964.153.400,00)	58,32	1.417.931.636,00

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam terealisasi sebesar Rp1.349.316.600,00 dengan perincian sebagai berikut:

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Uraian	2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ kurang (Rp)	%	(Rp)
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	313.021.000,00	187.812.600	(125.208.400,0)	60,00	336.094.572,00
Bagi hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	983.593.000,00	590.155.800	(393.437.200,0)	60,00	701.234.591,00
Bagi hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	172.822.000,00	95.052.100	(77.769.900,0)	55,00	36.346.929,00
Bagi hasil dari Pertambangan Gas Bumi	763.518.000,00	419.934.900	(343.583.100,0)	55,00	291.237.025,00
Bagi hasil dari Pertambangan Panas Bumi	42.534.000,00	29.773.800	(12.760.200,0)	70,00	26.570.761,00
Bagi hasil dari SDA Mineral Batubara	37.982.000,00	26.587.400	(11.394.600,0)	70,00	26.447.758,00
Jumlah	2.313.470.000,00	1.349.316.600	(964.153.400,0)	58,32	1.417.931.636,00

Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar Rp1.349.316.600,00 atau 58,32% dari target anggaran sebesar Rp2.313.470.000,00 dan turun sebesar 4,84% dari Tahun 2018 yang realisasinya sebesar Rp1.417.931.636,00. Dari 6 (enam) item rincian objek Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam tidak ada yang mencapai target.

5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Tabel Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum

Uraian	2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ Kurang (Rp)	%	(Rp)
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.279.681.428.000,00	1.279.681.428.000	0,00	100,00	1.234.003.169.000,00

Realisasi pendapatan dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 100% dari target anggaran sebesar Rp1.279.681.428.000,00. Artinya realisasi Dana Alokasi Umum dapat dikatakan sama dengan alokasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Tahun 2019 penerimaan Dana Alokasi Umum naik 3,70% dibanding dengan realisasi tahun 2018. Penerimaan DAU sebesar tersebut, termasuk didalamnya DAU tambahan yang dipotong langsung untuk iuran BPJS berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.166/PMK.07/2019 tentang DAU Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah. Rincian penerimaan Dana Alokasi Umum yang diterima Kabupaten Kebumen, sebagai berikut:

Tabel Rincian Dana Alokasi Umum

Uraian	Jumlah
DAU reguler	1.270.129.645.000,00
DAU tambahan tahap 1	2.035.759.000,00
DAU tambahan tahap 2	2.035.759.000,00
DAU tambahan yang dipotong langsung untuk iuran BPJS	5.480.265.000,00
Jumlah	1.279.681.428.000,00

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Tabel Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus

Uraian	2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Dana Alokasi Khusus (DAK)	380.103.537.000,00	386.546.619.443,00	6.443.082.443,0	101,70	390.504.708.527,00

Realisasi pendapatan dari Dana Alokasi Khusus sebesar Rp386.546.619.443,00 dari target anggaran sebesar Rp380.103.537.000,00. Dibandingkan dengan tahun 2018 yang realisasinya sebesar Rp390.504.708.527,00 pada tahun 2019 ini mengalami penurunan sebesar 1,01%.

Dana Alokasi Khusus realisasi tahun 2019 sebesar Rp386.546.619.443,00 terdiri dari:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus

Uraian	2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang	%	(Rp)
DAK Bidang Pendidikan	9.084.649.000,00	9.084.650.166,00	1.166,00	100,00	9.220.551.200,00
DAK Bidang Kesehatan dan KB	16.198.111.000,00	16.899.295.509,00	701.184.509,00	104,33	14.264.513.426,00
DAK Bidang Perumahan, Air Minum dan sanitasi	9.984.258.000,00	9.984.258.000,00	0,00	100,00	15.499.070.000,00
DAK Bidang Kedaulatan Pangan	4.478.593.000,00	4.478.593.315,00	315,00	100,00	3.499.297.000,00
DAK Bidang kelautan dan perikanan	922.575.000,00	1.374.221.038,00	451.646.038,00	148,95	1.109.894.000,00
DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	278.355.000,00	278.355.000,00	0,00	100,00	832.327.000,00
DAK Bidang Sarana Prasarana Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00	4.115.198.000,00
DAK Bidang Sarana dan Prasarana Penunjang	24.229.856.000,00	24.229.856.000,00	0,00	100,00	16.769.609.000,00
DAK Affirmasi	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128.657.000,00
DAK Non Fisik	305.428.691.000,00	311.170.586.615,00	5.741.895.615,00	101,88	312.272.521.901,00
DAK Bidang Perumahan dan Permukiman	2.972.290.000,00	2.972.290.000,00	0,00	100,00	9.793.070.000,00
DAK Bidang pariwisata	1.512.879.000,00	1.061.233.650,00	(451.645.350,00)	70,15	0,00
DAK Bidang Pasar	4.714.371.000,00	4.714.371.000,00	0,00	100,00	0,00
DAK Bidang Industri Kecil dan Menengah	298.909.000,00	298.909.150,00	150,00	100,00	0,00
Jumlah	380.103.537.000,00	386.546.619.443,00	6.443.082.443,00	101,70	390.504.708.527,00

Kontribusi masing-masing bidang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Kontribusi Dana Alokasi Khusus per Bidang

DAK	Anggaran	Realisasi	Sharing/ Kontribusi (%)
	(Rp)	(Rp)	
DAK Bidang Pendidikan	9.084.649.000,00	9.084.650.166,00	2,35
DAK Bidang Kesehatan dan KB	16.198.111.000,00	16.899.295.509,00	4,37
DAK Bidang Perumahan Air Minum dan sanitasi	9.984.258.000,00	9.984.258.000,00	2,58
DAK Bidang Kedaulatan Pangan	4.478.593.000,00	4.478.593.315,00	1,16
DAK Bidang kelautan dan perikanan	922.575.000,00	1.374.221.038,00	0,36
DAK Bidang Lingkungan Hidup	278.355.000,00	278.355.000,00	0,07
Dak Bidang Sarana dan Prasarana Penunjang	24.229.856.000,00	24.229.856.000,00	6,27
DAK Non Fisik	305.428.691.000,00	311.170.586.615,00	80,50
DAK Bidang Perumahan dan Permukiman	2.972.290.000,00	2.972.290.000,00	0,77
DAK Bidang pariwisata	1.512.879.000,00	1.061.233.650,00	0,27
DAK Bidang Pasar	4.714.371.000,00	4.714.371.000,00	1,22
DAK Bidang Industri Kecil dan Menengah	298.909.000,00	298.909.150,00	0,08
Jumlah	380.103.537.000,00	386.546.619.443,00	100,00

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa prosentase kontribusi terbesar yaitu Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar 80,50%, Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Penunjang sebesar 6,27%, Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan dan KB 4,37%.

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Uraian	2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	429.981.020.000,00	429.981.020.600,00	600,00	100,00	350.023.637.000,00

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya realisasinya sebesar Rp429.981.020.600,00 atau 100%, merupakan Dana Penyesuaian yang diterima Kas Umum Daerah pada Tahun 2019 yang terdiri dari:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Penyesuaian

Uraian	2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Dana Insentif Daerah	34.569.662.000,00	34.569.662.000,00	-	100,00	0
Dana Desa	395.411.358.000,00	395.411.358.600,00	600,00	100,00	350.023.637.000,00
Jumlah	429.981.020.000,00	429.981.020.600,00	600,00	100,00	350.023.637.000,00

Tahun 2019 Pemerintah kabupaten kebumen memperoleh Dana Insentif daerah sebesar Rp34.569.662.000,00, atau 100% dari target, Sedangkan Dana Desa yang diterima Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 sebesar Rp395.411.358.600,00 (untuk 449 Desa) atau 100% dari anggarannya.

5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Uraian	2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah lainnya	134.668.233.000,00	143.529.063.756,00	8.860.830.756,00	106,58	133.143.854.746,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan pendapatan transfer yang diterima dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berupa Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Tahun 2019 sebesar Rp143.529.063.756,00 dengan perincian sebagai berikut:

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Uraian	2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	31.966.480.000,00	34.990.646.828,00	3.024.166.828,00	109,46	31.236.672.478,00
Bagi Hasil dari Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	22.290.302.000,00	24.353.225.229,00	2.062.923.229,00	109,25	22.937.682.393,00
Bagi Hasil dari Pajak Bea Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	28.927.318.000,00	35.624.880.513,00	6.697.562.513,00	123,15	32.693.218.535,00
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	334.330.000,00	322.719.905,00	(11.610.095,00)	96,53	349.027.171,00
Bagi Hasil dari pajak Rokok	51.149.803.000,00	48.237.591.281,00	(2.912.211.719,00)	94,31	45.927.254.169,00
Jumlah	134.668.233.000,00	143.529.063.756,00	8.860.830.756,00	106,58	133.143.854.746,00

5.1.1.2.4 Bantuan Keuangan

Tabel Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan

Uraian	TA 2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ Kurang	%	(Rp)
Bantuan Keuangan	10.092.000.000,00	9.936.200.000,00	(155.800.000,00)	98,46	23.874.757.000,00

Bantuan Keuangan dari Provinsi untuk tahun 2019 dari anggaran sebesar Rp10.092.000.000,00 realisasinya sebesar 98,46% atau Rp9.936.200.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Rincian Realisasi Bantuan Keuangan

Uraian	Realisasi (Rp)
Bantuan Keuangan TMMD Sengkuyung I, II Tahun 2019	720.000.000,00
Bantuan Sarana dan Prasarana Pengadaan Tanah JJLS Ruas Jladri-Karangbolong-Tambakmulyo	7.000.000.000,00
Bantuan Sarana dan Prasarana untuk Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	295.000.000,00
Bantuan Keuangan Pendidikan	77.000.000,00
Bantuan Sarana dan Prasarana Peningkatan Struktur Jalan Lingkar Utara Karangsambung-Sadang	1.844.200.000,00
Jumlah	9.936.200.000,00

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Tabel Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Uraian	2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ Kurang	%	(Rp)
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	135.747.800.000,00	137.498.110.012,00	1.750.310.012,00	101,29	126.590.219.464,00

Penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2019 sebesar Rp137.498.110.012,00 sebagai berikut:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Uraian	2019			%	Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)		(Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah	4.200.000.000,00	7.208.963.041,00	3.008.963.041,00	171,64	5.547.503.090,00
Pendapatan Hibah Dana BOS	131.547.800.000,00	130.289.146.971,00	(1.258.653.029,00)	99,04	121.042.716.374,00
Jumlah	135.747.800.000,00	137.498.110.012,00	1.750.310.012,00	101,29	126.590.219.464,00

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Realisasi pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp137.498.110.012,00 terdiri dari pendapatan hibah yang diterima Pemerintah Kabupaten Kebumen sebesar Rp7.208.963.041,00 serta Pendapatan Hibah Dana BOS sebesar Rp130.289.146.971,00.

Rincian Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah

Uraian	Realisasi (Rp)
HIBAH IPDMIP AIF	13.548.466,00
HIBAH IPDMIP-ADB	67.726.075,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah (Hibah Air Limbah)	2.424.000.000,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah (Hibah Air Minum Perdesaan/AMD)	4.452.000.000,00
Pendapatan Hibah dari pemerintah (Hibah IPDMIP-IFAD)	147.688.500,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah (Hibah AIG)	104.000.000,00
Jumlah	7.208.963.041,00

Realisasi Pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp130.289.146.971,00 rinciannya dijelaskan

Uraian	Nilai (Rp)
Pendapatan SP2B	132.076.840.000,00
Temuan Inspektorat	9.857.405,00
Koreksi Tambah	126.623.605,00
Bunga Bank	2.368,00
Penerimaan	132.213.323.378,00
Pengembalian Lebih Salur	1.797.760.000,00
Koreksi Kurang	126.416.407,00
Pengeluaran	1.924.176.407,00
Realisasi Pendapatan BOS 2019	130.289.146.971,00

5.1.2 Belanja

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja

Uraian	2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Belanja	2.437.268.559.000,00	2.246.525.240.727,00	(190.743.318.273,00)	92,17	2.145.847.613.126,00

Belanja Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp2.437.268.559.000,00 terealisasi 92,17% atau sebesar Rp2.246.525.240.727,00, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yang sebesar Rp2.145.847.613.126,00 maka mengalami kenaikan sebesar 4,69%. Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.246.525.240.727,00 dengan perincian sebagai berikut:

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja

Uraian	2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Belanja Operasi	1.999.234.961.000,00	1.880.683.876.699,00	(118.551.084.301,00)	94,07	1.775.838.236.602,00
Belanja Modal	437.033.598.000,00	365.840.794.028,00	(71.192.803.972,00)	83,71	370.004.376.524,00
Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	570.000,00	(999.430.000,00)	0,06	5.000.000,00
Jumlah	2.437.268.559.000,00	2.246.525.240.727,00	(190.743.318.273,00)	92,17	2.145.847.613.126,00

Kontribusi masing-masing jenis belanja terhadap total Belanja Daerah didominasi oleh Belanja Operasi yang mencapai 83,72% kemudian Belanja Modal sebesar 16,28% dan Belanja Tak Terduga sebesar 0,00003%.

Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, kontribusi realisasi belanja terbesar adalah bidang pendidikan sebesar 21,45% kemudian bidang kesehatan 9,90% dan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebesar 4,71%. Dari total belanja.

Rincian Belanja Daerah per Urusan Pemerintahan Daerah, disajikan di **lampiran 3** pada Tabel Belanja per Urusan Pemerintah Daerah.

5.1.2.1 Belanja Operasi

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

Uraian	TA 2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Belanja Operasi	1.999.234.961.000,00	1.880.683.876.699,00	(118.551.084.301,00)	94,07	1.775.838.236.602,00

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp1.880.683.876.699,00 mencapai 94,07% dari anggaran sebesar Rp1.999.234.961.000,00 apabila dibandingkan dengan realisasi 2018 yang sebesar Rp1.775.838.236.602,00 mengalami peningkatan 5,90%. adapun rincian Belanja Operasi adalah sebagai berikut :

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

Uraian	TA 2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Belanja Pegawai	1.245.392.328.000,00	1.186.788.783.406,00	(58.603.544.594,00)	95,29	1.156.078.526.394,00
Belanja Barang dan Jasa	609.719.173.000,00	561.475.416.983,00	(48.243.756.017,00)	92,09	511.197.078.477,00
Belanja Hibah	100.062.212.000,00	91.027.595.845,00	(9.034.616.155,00)	90,97	56.720.440.981,00
Belanja Bantuan Sosial	44.061.248.000,00	41.392.080.465,00	(2.669.167.535,00)	93,94	51.842.190.750,00
Jumlah	1.999.234.961.000,00	1.880.683.876.699,00	(118.551.084.301,00)	94,07	1.775.838.236.602,00

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

Uraian	TA 2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Belanja Pegawai	1.245.392.328.000,00	1.186.788.783.406,00	(58.603.544.594,00)	95,29	1.156.078.526.394,00

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1.186.788.783.406,00 atau 95,29% dari anggaran dan mengalami kenaikan dari tahun 2018 sebesar Rp30.710.257.012,00 atau sebesar 2,66%. Adapun rincian realisasi Belanja Pegawai adalah sebagai berikut :

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

Uraian	TA 2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Gaji dan Tunjangan	1.043.047.595.900,00	1.010.538.087.365,00	(32.509.508.535,00)	96,88	739.369.742.590,00
Tambahan Penghasilan PNS	73.928.488.100,00	59.664.584.085,00	(14.263.904.015,00)	80,71	334.632.341.322,00
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	16.995.000.000,00	16.942.960.000,00	(52.040.000,00)	99,69	14.651.000.000,00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	5.155.338.000,00	4.849.915.600,00	(305.422.400,00)	94,08	4.408.727.932,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.669.909.000,00	638.304.885,00	(1.031.604.115,00)	38,22	1.128.909.299,00
Uang Lembur	6.202.757.000,00	5.425.585.403,00	(777.171.597,00)	87,47	5.512.211.926,00
Belanja Honorarium PNS	20.489.934.000,00	19.350.749.498,00	(1.139.184.502,00)	94,44	17.368.561.600,00
Belanja Honorarium Non PNS	36.369.841.000,00	32.692.080.167,00	(3.677.760.833,00)	89,89	7.991.059.200,00
Belanja Pegawai BLUD	25.109.417.000,00	21.066.713.204,00	(4.042.703.796,00)	83,90	14.828.768.590,00
Belanja Pegawai BOS	16.424.048.000,00	15.619.803.199,00	(804.244.801,00)	95,10	16.187.203.935,00
Jumlah	1.245.392.328.000,00	1.186.788.783.406,00	(58.603.544.594,00)	95,29	1.156.078.526.394,00

Rincian Belanja Pegawai per OPD disajikan pada **lampiran 4**.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

Uraian	TA 2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Belanja Barang dan Jasa	609.719.173.000,00	561.475.416.983,00	(48.243.756.017,00)	92,09	511.197.078.477,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Rp561.475.416.983,00 atau 92,09% dari anggaran, mengalami kenaikan dari tahun 2018 sebesar Rp50.278.338.506,00 atau sebesar 9,84%. Adapun rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

Uraian	TA 2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	19.297.812.000,00	18.121.517.616,00	(1.176.294.384,00)	93,90	19.691.506.895,00
Belanja Bahan/Material	19.037.385.000,00	17.688.183.826,00	(1.349.201.174,00)	92,91	28.032.476.676,00
Belanja Jasa Kantor	72.610.918.000,00	67.344.795.878,00	(5.266.122.122,00)	92,75	52.867.711.071,00
Belanja Premi Asuransi	56.528.000,00	56.398.616,00	(129.384,00)	99,77	56.451.023,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.316.535.000,00	10.571.846.788,00	(1.744.688.212,00)	85,83	9.994.949.960
Belanja Cetak dan Penggandaan	11.790.736.000,00	11.010.490.431,00	(780.245.569,00)	93,38	10.229.528.769,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.974.525.000,00	1.666.358.900,00	(308.166.100,00)	84,39	1.446.472.545,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.715.813.000,00	1.455.610.724,00	(260.202.276,00)	84,84	1.331.043.000,00
Belanja Sewa Alat Berat	274.800.000,00	195.427.500,00	(79.372.500,00)	71,12	200.590.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.977.634.000,00	1.848.190.809,00	(129.443.191,00)	93,45	1.883.734.949,00
Belanja Makanan dan Minuman	36.842.278.000,00	34.161.831.680,00	(2.680.446.320,00)	92,72	26.894.399.659,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	735.566.000,00	682.236.650,00	(53.329.350,00)	92,75	358.724.250,00
Belanja Pakaian Kerja	1.264.526.000,00	1.247.022.000,00	(17.504.000,00)	98,62	1.025.718.751,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	514.488.000,00	510.998.000,00	(3.490.000,00)	99,32	408.742.500,00
Belanja Perjalanan Dinas	52.660.866.000,00	47.099.396.526,00	(5.561.469.474,00)	89,44	43.253.088.201,00
Belanja Pemeliharaan	47.104.880.000,00	44.557.201.172,00	(2.547.678.828,00)	94,59	20.099.777.428,00
Belanja Jasa Konsultansi	6.748.004.000,00	5.615.784.500,00	(1.132.219.500,00)	83,22	7.177.932.280,00
Belanja Hibah barang dan jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	898.962.000,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	105.000.000,00	35.500.000,00	(69.500.000,00)	33,81	20.460.000,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	8.355.261.000,00	8.263.096.363,00	(92.164.637,00)	98,90	5.069.137.332,00
Belanja Barang Dana BOS	81.002.457.000,00	78.557.660.025,00	(2.444.796.975,00)	96,98	79.930.206.210,00
Biaya Jasa Pihak Ketiga	14.489.788.000,00	13.005.080.431,00	(1.484.707.569,00)	89,75	36.819.444.805,00
Belanja Barang Dan Jasa BLUD	190.530.820.000,00	171.893.687.948,00	(18.637.132.052,00)	90,22	146.538.664.673,00
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	1.365.425.000,00	1.328.025.000,00	(37.400.000,00)	97,26	1.091.914.000,00
Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.947.128.000,00	24.559.075.600,00	(2.388.052.400,00)	91,14	15.875.441.500,00
Jumlah	609.719.173.000,00	561.475.416.983,00	(48.243.756.017,00)	92,09	511.197.078.477,00

Belanja barang dan jasa selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 direalisasikan untuk menunjang operasional pemerintah Kabupaten Kebumen dan tersebar di masing masing OPD/ Unit Kerja sebagaimana terinci dalam **lampiran 5**.

5.1.2.1.3 Belanja Hibah

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah

Uraian	TA 2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Belanja Hibah	100.062.212.000,00	91.027.595.845,00	(9.034.616.155,00)	90,97	56.720.440.981,00

Adapun rincian realisasi Belanja Hibah adalah sebagai berikut:

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah

Uraian	TA 2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Belanja Hibah Kepada Pemerintah	807.000.000,00	807.000.000,00	0,00	100,00	0,00
Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat	65.829.544.000,00	59.928.559.845,00	(5.900.984.155,00)	91,04	26.357.092.381,00
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	33.425.668.000,00	30.292.036.000,00	(3.133.632.000,00)	90,63	30.363.348.600,00
Jumlah	100.062.212.000,00	91.027.595.845,00	(9.034.616.155,00)	90,97	56.720.440.981,00

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018, terdapat kenaikan sebesar Rp34.307.154.864,00 atau 60,48%. Secara rinci kenaikan tersebut terjadi pada Belanja Hibah Kepada Pemerintah yang pada tahun 2018 tidak ada, pada tahun 2019 terealisasi Rp807.000.000,00 dan Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat mengalami kenaikan sebesar Rp33.571.467.464,00 atau sebesar 127,37%. Penurunan terjadi pada Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp71.312.600,00 atau sebesar 0,23%.

a. Belanja Hibah Kepada Pemerintah

Belanja Hibah Kepada Pemerintah senilai Rp807.000.000,00 diberikan kepada Polres Kebumen dengan OPD pelaksanaan teknis adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Hibah berupa penambahan pembangunan gedung mako polres Kebumen TA 2019 sesuai SK bupati Kebumen No.600/1159 Tahun 2019 tanggal 31/05/2019.

b. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat

Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat tahun 2019 sebesar Rp59.928.559.845,00 tersebar di OPD sebagaimana terinci dalam Tabel Rincian Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat pada **lampiran 6**.

c. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan

Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan tahun 2019 sebesar Rp30.292.036.000,00 dilaksanakan oleh OPD dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan

OPD Pengelola	Uraian Hibah	Jumlah (Rp)
Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta		
Disporawisata	Hibah kepada KONI & NPC	1.348.800.000,00
Bagian Kesra	Hibah kepada Baznas	100.000.000,00
Dinas Pendidikan	Hibah kepada Dewan Pendidikan Kab Kebumen	60.000.000,00
Kesbangpol	Hibah KPU	73.468.000,00
	Hibah Bawaslu	30.000.000,00
Jumlah		1.612.268.000,00
Hibah kepada Sekolah Swasta		
Dinas Pendidikan	Hibah Rehab Bangunan Gedung PAUD	1.650.000.000,00
	Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	18.440.700.000,00
	Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang/Berat MI	1.288.960.000,00
	Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang/Berat MTs	1.443.513.000,00
	Rehabilitasi Jamban/Sanitasi MTs	8.145.000,00
	Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan Paket A	32.500.000,00
	Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan Paket B	369.000.000,00
	Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan Paket C	2.057.400.000,00
	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Swasta	299.550.000,00
	Pengadaan Meubelair Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Swasta	40.000.000,00
Jumlah		25.629.768.000,00
Hibah kepada Lembaga Keagamaan		
Bagian Kesra	Hibah kepada Gereja	75.000.000,00
	Hibah kepada Madin	30.000.000,00
	Hibah kepada Masjid	1.800.000.000,00
	Hibah kepada Mushola	800.000.000,00
	Hibah kepada Pondok Pesantren	175.000.000,00
	Hibah kepada TPQ	120.000.000,00
	Hibah kepada MUI	50.000.000,00
Jumlah		3.050.000.000,00
TOTAL		30.292.036.000,00

5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial

Uraian	TA 2019				Realisasi 2018 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Belanja Bantuan Sosial	44.061.248.000,00	41.392.080.465,00	(2.669.167.535,00)	93,94	51.842.190.750,00

Adapun rincian realisasi Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial

Uraian	TA 2019				Realisasi 2018 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	4.002.270.000,00	3.101.120.000,00	(901.150.000,00)	77,48	13.315.532.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat	40.058.978.000,00	38.290.960.465,00	(1.768.017.535,00)	95,59	38.526.658.750,00
Jumlah	44.061.248.000,00	41.392.080.465,00	(2.669.167.535,00)	93,94	51.842.190.750,00

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018, terdapat penurunan sebesar Rp10.450.110.285,00 atau 20,16%. Secara rinci penurunan tersebut terjadi pada Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial sebesar Rp10.214.412.000,00 atau sebesar 76,71% dan penurunan pada Belanja bantuan Sosial kepada masyarakat sebesar Rp235.698.285,00 atau sebesar 0,61%.

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

a. Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial

Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial tahun 2019 terdiri dari Bantuan Sosial Pendidikan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial

Uraian	TA 2019				Realisasi 2018 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Bantuan Sosial Pendidikan	4.002.270.000,00	3.101.120.000,00	(901.150.000,00)	77,48	3.709.840.000,00
Bantuan Sosial Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	9.605.692.000,00
Jumlah	4.002.270.000,00	3.101.120.000,00	(901.150.000,00)	77,48	13.315.532.000,00

Belanja Bantuan Sosial Pendidikan sebesar Rp3.101.120.000,00 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Rincian Belanja Bantuan Sosial Pendidikan

OPD	Uraian Bansos	Nilai (Rp)
Dinas Pendidikan	Belanja Bantuan Beasiswa Kurang Mampu SD/MI	1.711.200.000,00
	Belanja Bantuan Beasiswa Siswa Kurang Mampu SMP/MTS	1.389.920.000,00
Jumlah		3.101.120.000,00

b. Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat

Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat sebesar Rp38.290.960.465,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat

Uraian	TA 2019				Realisasi 2018 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Bantuan Sosial kepada Masyarakat Miskin	39.883.978.000,00	38.130.960.465,00	(1.753.017.535,00)	95,60	38.351.658.750,00
Bantuan Sosial kepada Korban Bencana Alam	175.000.000,00	160.000.000,00	(15.000.000,00)	91,43	175.000.000,00
Jumlah	40.058.978.000,00	38.290.960.465,00	(1.768.017.535,00)	95,59	38.526.658.750,00

Rincian realisasi dari masing-masing jenis Bantuan Sosial kepada masyarakat per OPD disajikan pada Tabel Rincian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat per OPD pada **lampiran 7**.

5.1.2.2 Belanja Modal

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

Uraian	2019				Realisasi 2018 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Belanja Modal	437.033.598.000,00	365.840.794.028,00	(71.192.803.972,00)	83,71	370.004.376.524,00

Anggaran dan realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2019 secara rinci sebagai berikut.

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

Uraian	2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Belanja Modal Tanah	46.322.767.000,00	33.834.086.638,00	(12.488.680.362,00)	73,04	4.288.636.190,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	115.857.044.000,00	99.985.234.817,00	(15.871.809.183,00)	86,30	81.646.870.717,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	95.792.838.000,00	73.764.387.734,00	(22.028.450.266,00)	77,00	81.405.958.015,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	163.548.059.000,00	143.814.601.168,00	(19.733.457.832,00)	87,93	188.204.523.600,00
Belanja Modal Aset tetap Lainnya	14.933.469.000,00	14.089.486.071,00	(843.982.929,00)	94,35	14.180.799.102,00
Belanja Modal Aset Tak Berwujud	579.421.000,00	352.997.600,00	(226.423.400,00)	60,92	277.588.900,00
Jumlah	437.033.598.000,00	365.840.794.028,00	(71.192.803.972,00)	83,71	370.004.376.524,00

Realisasi Belanja Modal tahun 2019 sebesar Rp365.840.794.028,00 atau tercapai 83,71% dari anggaran sebesar Rp437.033.598.000,00. Dibandingkan realisasi tahun 2018 yang sebesar Rp370.004.376.524,00 realisasi Belanja Modal tahun 2019 turun sebesar Rp4.163.582.496,00 atau 1,13%.

Belanja Modal yang realisasinya tertinggi adalah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan realisasi 94,35% dari anggaran. Sedangkan realisasi terendah adalah Belanja Modal Aset tak Berwujud dengan realisasi 60,92% dari anggaran yang disebabkan karena tidak terealisasinya kegiatan di Dinas Pendidikan dan RSUD Dr. Soedirman.

Kontribusi terbesar Belanja Modal adalah Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang mencapai 39,31% dari realisasi total Belanja Modal, kemudian Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27,33%, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 20,16%, Belanja Modal Tanah 9,25%, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar 3,85% dan Belanja Modal Aset Tak Berwujud sebesar 0,10%.

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah

Uraian	2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Belanja Modal Tanah	46.322.767.000,00	33.834.086.638,00	(12.488.680.362,00)	73,04	4.288.636.190,00

Rincian Belanja Modal Tanah adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah

Uraian	2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Tanah Perkampungan	3.678.391.000,00	3.291.393.746,00	(386.997.254,00)	89,48	275.627.000,00
Tanah untuk Bangunan Gedung	7.407.114.000,00	4.635.404.650,00	(2.771.709.350,00)	62,58	1.817.448.500,00
Tanah untuk Bangunan Bukan Gedung	32.122.127.000,00	25.173.415.072,00	(6.948.711.928,00)	78,37	2.148.309.250,00
Tanah BLUD.	3.115.135.000,00	733.873.170,00	(2.381.261.830,00)	23,56	47.250.560,00
Jumlah	46.322.767.000,00	33.834.086.638,00	(12.488.680.362,00)	73,04	4.288.635.310,00

Belanja Modal Tanah tahun anggaran 2019 tersebar di OPD sebagai berikut.

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah per OPD

OPD	2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Dinas Pendidikan	2.397.200.000,00	1.876.420.000,00	(520.780.000,00)	78,28	1.469.116.000,00
Dinas Kesehatan	3.678.391.000,00	3.291.393.746,00	(386.997.254,00)	89,48	275.627.880,00
Puskesmas Alian	410.135.000,00	369.116.920,00	(41.018.080,00)	90,00	0,00
RSUD dr. Sudirman	2.705.000.000,00	364.756.250,00	(2.340.243.750,00)	13,48	47.250.560,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	37.132.041.000,00	27.932.399.722,00	(9.199.641.278,00)	75,22	2.149.529.250,00
Kecamatan Klirong	0,00	0,00	0,00	0,00	347.112.500,00
Jumlah	46.322.767.000,00	33.834.086.638,00	(12.488.680.362,00)	73,04	4.288.636.190,00

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Tabel Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	115.857.044.000,00	99.985.234.817,00	(15.871.809.183,00)	86,30	81.646.870.717,00

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun anggaran 2019 terdiri dari berikut.

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Alat-alat Besar Darat	2.351.900.000,00	1.830.550.000,00	(521.350.000,00)	77,83	1.776.340.000,00
Alat-alat Bantu	2.590.863.000,00	1.340.856.295,00	(1.250.006.705,00)	51,75	707.421.300,00
Alat Angkutan darat Bermotor	18.457.248.000,00	17.821.813.873,00	(635.434.127,00)	96,56	9.014.301.995,00
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	387.043.000,00	336.340.000,00	(50.703.000,00)	86,90	151.322.500,00
Alat Bengkel Bermesin	352.910.000,00	341.915.000,00	(10.995.000,00)	96,88	297.745.200,00
Alat Bengkel Tak Bermesin	272.106.000,00	268.184.500,00	(3.921.500,00)	98,56	103.268.200,00
Alat Ukur	80.977.000,00	51.622.400,00	(29.354.600,00)	63,75	1.105.517.220,00
Alat Pengolahan	1.714.875.000,00	1.709.998.000,00	(4.877.000,00)	99,72	147.343.500,00
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	20.250.000,00	19.966.000,00	(284.000,00)	98,60	0,00
Alat Kantor	3.061.125.000,00	2.634.741.256,00	(426.383.744,00)	86,07	2.587.070.329,00
Alat Rumah Tangga	6.954.320.000,00	6.490.983.810,00	(463.336.190,00)	93,34	4.584.656.904,00
Komputer	11.568.667.000,00	11.042.389.439,00	(526.277.561,00)	95,45	6.348.758.104,00
Meja dan kursi kerja/rapat Pejabat	816.284.000,00	800.081.993,00	(16.202.007,00)	98,02	804.080.105,00
Alat Studio	2.008.729.000,00	1.790.128.000,00	(218.601.000,00)	89,12	1.111.603.100,00
Alat Komunikasi	597.141.000,00	581.186.200,00	(15.954.800,00)	97,33	390.860.800,00
Peralatan Pemancar	2.782.000,00	1.580.000,00	(1.202.000,00)	56,79	357.750.000,00
Alat Kedokteran	19.588.474.000,00	17.011.502.106,00	(2.576.971.894,00)	86,84	24.940.966.985,00
Alat kesehatan	3.974.837.000,00	3.726.177.100,00	(248.659.900,00)	93,74	1.815.175.000,00
Unit-unit Laboratorium	2.415.715.000,00	2.288.937.350,00	(126.777.650,00)	94,75	490.802.903,00
Alat Praktek/Peraga Sekolah	93.996.000,00	82.796.000,00	(11.200.000,00)	88,08	79.386.500,00
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	248.465.000,00	241.936.000,00	(6.529.000,00)	97,37	210.908.400,00
Persenjataan non senjata api	138.725.000,00	133.945.000,00	(4.780.000,00)	96,55	189.181.000,00
Alat Keamanan dan Perlindungan	1.337.188.000,00	1.260.996.889,00	(76.191.111,00)	94,30	177.151.000,00
Peralatan dan mesin – BLUD	13.166.350.000,00	10.115.615.861,00	(3.050.734.139,00)	76,83	13.330.979.794,00
Peralatan dan mesin – BOS	23.656.074.000,00	18.060.991.745,00	(5.595.082.255,00)	76,35	10.924.279.878,00
Jumlah	115.857.044.000,00	99.985.234.817,00	(15.871.809.183,00)	86,30	81.646.870.717,00

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun anggaran 2019 per OPD disajikan pada **lampiran 8**.

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Uraian	2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	95.792.838.000,00	73.764.387.734,00	(22.028.450.266,00)	77,00	81.405.958.015,00

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun anggaran 2019 terdiri dari berikut.

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Uraian	2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Bangunan Gedung Tempat Kerja	75.411.946.000,00	63.811.576.556,00	(11.600.369.444,00)	84,62	74.574.141.295,00
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	0,00	308.964.000,00
Bangunan Bersejarah	839.900.000,00	764.844.900,00	(75.055.100,00)	91,06	983.059.000,00
Bangunan Tugu Peringatan	4.981.814.000,00	4.412.597.000,00	(569.217.000,00)	88,57	155.735.000,00
Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah Lainnya	208.232.000,00	206.446.000,00	(1.786.000,00)	99,14	1.133.478.000,00
Bangunan Rambu-Rambu	3.458.273.000,00	3.207.144.772,00	(251.128.228,00)	92,74	2.923.538.000,00
Bangunan – BLUD	10.892.673.000,00	1.361.778.506,00	(9.530.894.494,00)	12,50	1.327.042.720,00
Jumlah	95.792.838.000,00	73.764.387.734,00	(22.028.450.266,00)	77,00	81.405.958.015,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan terdiri dari OPD disajikan pada Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per OPD pada **lampiran 9**

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	163.548.059.000,00	143.814.601.168,00	(19.733.457.832,00)	87,93	188.204.523.600,00

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD dapat dilihat pada **lampiran 10**.

Kontribusi terbesar Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah Belanja Modal Jalan sebesar 62,31% dan kontribusi terendah adalah Belanja Bangunan Air Irigasi sebesar 0,15%. Sedangkan rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel rincian sebagai berikut :

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Jalan	100.656.451.000,00	89.618.030.930,00	(11.038.420.070,00)	89,03	122.038.488.200,00
Jembatan	12.384.421.000,00	9.792.518.450,00	(2.591.902.550,00)	79,07	9.024.341.000,00
Bangunan Air irigasi	215.826.000,00	213.215.000,00	(2.611.000,00)	98,79	7.536.235.000,00
Bangunan Pengaman Sungai dan	8.272.397.000,00	6.551.976.175,00	(1.720.420.825,00)	79,20	10.904.455.000,00
Bangunan Pengendali Sumber Air	7.447.248.000,00	6.243.005.412,00	(1.204.242.588,00)	83,83	9.287.688.500,00
Bangunan Air Bersih/Air Baku	5.574.015.000,00	5.479.481.475,00	(94.533.525,00)	98,30	6.814.295.400,00
Bangunan Air Kotor	5.190.589.000,00	4.702.696.575,00	(487.892.425,00)	90,60	4.083.668.000,00
Instalasi Air Minum/Air Bersih	5.394.898.000,00	4.799.290.000,00	(595.608.000,00)	88,96	7.895.080.000,00
Instalasi Air Kotor	2.216.889.000,00	2.025.245.000,00	(191.644.000,00)	91,36	1.323.093.000,00
Instalasi Pengolahan Sampah	6.368.767.000,00	5.715.024.790,00	(653.742.210,00)	89,74	4.426.653.000,00
Instalasi Gardu Listrik	4.025.663.000,00	3.652.981.904,00	(372.681.096,00)	90,74	3.413.750.000,00
Pengadaan Jaringan Listrik	396.491.000,00	381.798.879,00	(14.692.121,00)	96,29	22.804.000,00
Jaringan Telepon	1.633.276.000,00	1.585.011.250,00	(48.264.750,00)	97,04	1.425.472.500,00
Jalan Irigasi jaringan BLUD	3.771.128.000,00	3.054.325.328,00	(716.802.672,00)	80,99	8.500.000,00
Jumlah	163.548.059.000,00	143.814.601.168,00	(19.733.457.832,00)	87,93	188.204.523.600,00

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Uraian	2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Belanja Modal Aset tetap Lainnya	14.933.469.000,00	14.089.486.071,00	(843.982.929,00)	94,35	14.180.799.102,00

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun anggaran 2019 terdiri dari berikut.

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Uraian	2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Buku	1.613.134.000,00	1.597.136.458,00	(15.997.542,00)	99,01	201.477.500,00
Barang-Barang Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	9.965.000,00
Barang Bercorak Kebudayaan	605.985.000,00	575.720.500,00	(30.264.500,00)	95,01	185.036.000,00
Alat Olah Raga lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	46.996.000,00
Tanaman	160.600.000,00	159.595.000,00	(1.005.000,00)	99,37	0,00
Aset tetap lainnya BLUD	20.000.000,00	6.285.000,00	(13.715.000,00)	31,43	0,00
Aset tetap lainnya BOS	12.533.750.000,00	11.750.749.113,00	(783.000.887,00)	93,75	13.737.324.602,00
Jumlah	14.933.469.000,00	14.089.486.071,00	(843.982.929,00)	94,35	14.180.799.102,00

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per OPD dapat dilihat pada **lampiran 11**.

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Tak Berwujud

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tak Berwujud

Uraian	2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Belanja Modal Aset Tak Berwujud	579.421.000,00	352.997.600,00	(226.423.400,00)	60,92	277.588.900,00

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tak Berwujud tahun anggaran 2019 terdiri dari berikut.

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tak Berwujud

Uraian	2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Aset Tak Berwujud	378.689.000,00	348.997.600,00	(29.691.400,00)	92,16	268.358.900,00
Aset Tak Berwujud BLUD	200.732.000,00	4.000.000,00	(196.732.000,00)	1,99	9.230.000,00
Jumlah	579.421.000,00	352.997.600,00	(226.423.400,00)	60,92	277.588.900,00

Belanja Modal Aset Tak Berwujud tahun anggarana 2019 terdiri dari OPD sebagai berikut:

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tak Berwujud per OPD

No	OPD	2019				Realisasi 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
1	Dinas Pendidikan	24.394.000,00	0,00	(24.394.000,00)	0,00	0,00
2	Puskesmas Karanggayam II	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	0,00
3	Pengobatan Penyakit Paru	0,00	0,00	-	0,00	3.500.000,00
4	RSUD dr. Sudirman	196.732.000,00	0,00	(196.732.000,00)	0,00	5.730.000,00
5	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	-	0,00	181.945.900,00
6	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	108.000.000,00	107.845.100,00	(154.900,00)	99,86	86.413.000,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	49.530.000,00	49.340.000,00	(190.000,00)	99,62	0,00
8	Dinas Komunikasi Dan Informatika	196.765.000,00	191.812.500,00	(4.952.500,00)	97,48	0,00
	Jumlah	579.421.000,00	352.997.600,00	(226.423.400,00)	60,92	277.588.900,00

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga

Uraian	2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	570.000,00	(999.430.000,00)	0,06	5.000.000,00

Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp.570.000,00 merupakan pembayaran. pengembalian sewa tanah eks bengkok kelurahan Bumirejo Tahun 2018 kepada Edi Wahyono Rt.01 RW 05 Kelurahan Bumirejo Kec.Kebumen sesuai Perjanjian sewa tanah eks bengkok milik Pemkab Kebumen No.032/10 Tgl.2 Mei 2018.

5.1.3 Transfer

Tabel Anggaran dan Realisasi Transfer

Uraian	2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Transfer	564.248.231.000,00	563.024.203.900,00	(1.224.027.100,00)	99,78	506.200.367.250,00

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Realisasi transfer sebesar Rp563.024.203.900,00 terdiri dari:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer

Uraian	2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	15.635.657.000,00	15.502.510.500,00	(133.146.500,00)	99,15	14.048.213.950,00
Transfer Bantuan Keuangan	548.612.574.000,00	547.521.693.400,00	(1.090.880.600,00)	99,80	492.152.153.300,00
Jumlah	564.248.231.000,00	563.024.203.900,00	(1.224.027.100,00)	99,78	506.200.367.250,00

Realisasi transfer sebesar Rp563.024.203.900,00 atau 99,78% dari anggaran sebesar Rp564.248.231.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2018, Transfer tahun 2019 naik sebesar 11,23%. Transfer apabila dilihat dari urusan pemerintahan daerah, Realisasi Transfer terdiri dari urusan pemerintah fungsi keuangan sebagai berikut.

Tabel Realisasi Transfer Per Urusan

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Uraian Pemerintah Fungsi Penunjang	564.248.231.000,00	563.024.203.900,00	99,78
Keuangan	564.248.231.000,00	563.024.203.900,00	99,78
Jumlah	564.248.231.000,00	563.024.203.900,00	99,78

5.1.3.1 Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Tabel Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Uraian	2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	15.635.657.000,00	15.502.510.500,00	(133.146.500,00)	99,15	14.048.213.950,00

Realisasi transfer Bagi Hasil Pendapatan terdiri dari:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Uraian	2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	10.008.676.000,00	9.981.797.400,00	(26.878.600,00)	99,73	8.987.923.000,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.626.981.000,00	5.520.713.100,00	(106.267.900,00)	98,11	5.060.290.950,00
Jumlah	15.635.657.000,00	15.502.510.500,00	(133.146.500,00)	99,15	14.048.213.950,00

5.1.3.1.1 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Tabel Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Uraian	2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	10.008.676.000,00	9.981.797.400,00	(26.878.600,00)	99,73	8.987.923.000,00

Realisasi transfer Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp9.981.797.400,00 merupakan transfer kepada Pemerintah Desa atas bagi hasil pajak daerah yang disalurkan untuk 449 desa berdasarkan Peraturan Bupati No.58 tahun 2019 tanggal 21 Oktober 2019.

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

5.1.3.1.2 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Tabel Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Uraian	2019				Realisasi 2018 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang	%	
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.626.981.000,00	5.520.713.100,00	(106.267.900,00)	98,11	5.060.290.950,00

Realisasi transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya sebesar Rp5.520.713.100,00 merupakan transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa dengan rincian:

Tabel Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Rincian Transfer	OPD Pengelola	Jumlah (Rp)	Keterangan
Bagi Hasil kepada pihak ketiga untuk perum Perhutani Divisi Regional Jateng	Disporawisata	38.247.900,00	Bagi Hasil atas Pendapatan Obyek wisata Pantai Logending sesuai Perjanjian Kerja Sama nomor 41/043.7/JMB/Kds/Divre Jateng/2018 Nomor 556/095/VIII/Tahun 2018
Bagi Hasil retribusi Daerah kepada Koperasi Karyawan Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai serayu Bogowonto Sempor	Disporawisata	140.115.200,00	Bagi Hasil atas Pendapatan Obyek wisata Waduk Sempor, sesuai perjanjian Nomor 556/99/84
Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kab. Kebumen	Dispermades	5.342.350.000,00	Merupakan bagi Hasil Pendapatan Retribusi daerah kepada Desa berdasarkan Perbup nomor 58 tahun 2019 tanggal 21-10-2019
Jumlah		5.520.713.100,00	

5.1.3.2 Transfer Bantuan Keuangan

Tabel Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan

Uraian	2019				Realisasi 2018 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Transfer Bantuan Keuangan	548.612.574.000,00	547.521.693.400,00	(1.090.880.600,00)	99,80	492.152.153.300,00

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan terdiri dari:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan

Uraian	2019				Realisasi 2018 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	-	0,00	500.000.000,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	546.668.667.000,00	546.159.768.400,00	(508.898.600,00)	99,91	490.608.197.300,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.943.907.000,00	1.361.925.000,00	(581.982.000,00)	70,06	1.043.956.000,00
Jumlah	548.612.574.000,00	547.521.693.400,00	(1.090.880.600,00)	99,80	492.152.153.300,00

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa realisasinya sebesar Rp546.159.768.400,00 atau 99,91% dari target dan Transfer Bantuan Keuangan Lainnya terealisasi sebesar Rp1.361.925.000,00 atau 70,06% dari target.

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

5.1.3.2.1 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Tabel Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Uraian	2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	546.668.667.000,00	546.159.768.400,00	(508.898.600,00)	99,91	490.608.197.300,00

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa sebesar Rp546.159.768.400,00 adalah sebagai berikut:

Tabel Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Rincian Transfer	Keterangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Bantuan Keuangan ADD	Perbup No.62 Tahun 2019 tanggal 14-11-2019	137.012.308.000,00	137.012.308.000,00	100,00
Bantuan Keuangan Desa Berinovasi	SK Bupati Kebumen No.414.4/1172 Tahun 2019 tanggal 30 April 2019	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00
Bantuan Keuangan kepada Pemdes dan Desa Adat yang bersumber dari APBN untuk Dana Desa	Perbup No.12/2019 tanggal 22 Februari 2019	395.411.359.000,00	394.919.460.400,00	99,88
Bantuan Keuangan Kepada Pemdes untuk operasional TPQ	SK Bupati Kebumen No.489/1158 Tahun 2019 Tanggal 4 April 2019	2.245.000.000,00	2.230.000.000,00	99,33
Bantuan Keuangan Pilkades	SK Bupati Kebumen No.141/196 Tahun 2019 Tanggal 12-4-2019	8.000.000.000,00	7.998.000.000,00	99,98
Bantuan Keuangan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Perbup Kebumen No.31 Tahun 2019 Tanggal 24 Juni 2019	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
Jumlah		546.668.667.000,00	546.159.768.400,00	99,91

Untuk rincian Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) per desa tercantum di Tabel Realisasi Penerusan Dana Desa TA 2019 pada **lampiran 12 dan lampiran 13**.

5.1.3.2.2 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Tabel Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan

Uraian	2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.943.907.000,00	1.361.925.000,00	(581.982.000,00)	70,06	1.043.956.000,00

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya sebesar Rp1.361.925.000,00 merupakan bantuan keuangan kepada partai politik berdasar Perda No.12 Th 2007 tanggal 12-9-2007 dan Keputusan Gubernur Jateng No.163.1/73 Tahun 2019 tanggal 26-8-2019, masing-masing sebesar berikut ini:

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Tabel Rincian Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

No.	Partai Politik	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Bantuan Keuangan Parpol pada DPD Partai Golkar	140.666.000,00
2.	Belanja Bantuan Keuangan Parpol pada DPD Partai Demokrat	98.509.000,00
3.	Belanja Bantuan Keuangan Parpol pada DPD Partai Persatuan Pembangunan	103.950.000,00
4.	Belanja Bantuan Keuangan Parpol pada DPD Partai Keadilan Sejahtera	95.016.000,00
5.	Belanja Bantuan Keuangan Parpol pada DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	289.516.000,00
6.	Belanja Bantuan Keuangan Parpol pada DPD Partai NasDem	108.574.000,00
7.	Belanja Bantuan Keuangan Parpol pada DPD Partai Kebangkitan Bangsa	207.623.000,00
8.	Belanja Bantuan Keuangan Parpol pada DPD Partai Amanat Nasional	124.176.000,00
9.	Belanja Bantuan Keuangan Parpol pada DPD Partai Gerindra	193.895.000,00
	Jumlah	1.361.925.000,00

5.1.4 Pembiayaan

Tabel Anggaran dan Realisasi Pembiayaan

Uraian	2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Pembiayaan Neto	193.722.380.000,00	193.722.379.502,50	(497,50)	100,00	213.925.495.480,60

Terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan sebagai berikut.

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan

Uraian	2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Penerimaan Pembiayaan	203.192.380.000,00	203.192.379.502,50	(497,50)	100,00	225.675.495.480,60
Pengeluaran Pembiayaan	9.470.000.000,00	9.470.000.000,00	-	100,00	11.750.000.000,00
Pembiayaan Neto	193.722.380.000,00	193.722.379.502,50	(497,50)	100,00	213.925.495.480,60

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Tabel Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan

Uraian	2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Penerimaan Pembiayaan	203.192.380.000,00	203.192.379.502,50	(497,50)	100,00	225.675.495.480,60

Realisasi penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp203.192.379.502,50 dirinci sebagai berikut:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan

Uraian	2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
SILPA tahun sebelumnya	201.692.380.000,00	201.692.379.502,50	(497,50)	100,00	224.135.495.480,60
Penerimaan Kembali Piutang	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	100,00	1.540.000.000,00
Jumlah	203.192.380.000,00	203.192.379.502,50	(497,50)	100,00	225.675.495.480,60

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Pada Tahun Anggaran 2019 seluruh SilPA Tahun Anggaran 2018 direalisasikan sebagai penerimaan pembiayaan yaitu sebesar Rp201.692.379.502,50. Sedangkan Penerimaan kembali piutang merupakan penerimaan kembali dana talangan pengadaan pangan sebesar Rp1.500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Penerimaan Kembali Piutang

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Gapoktan Ngesti Utomo desa Kaliputih kec Kutowinangun	50.000.000,00
2	Gapoktan Tani Mulya desa Mengkowo kec Kebumen	60.000.000,00
3	Gapoktan Karyadadi V Desa Caruban Kec Adimulyo	50.000.000,00
4	Gapoktan Sumber Barokah desa Kedungweru kec ayah	60.000.000,00
5	Gapoktan Padi Mas desa Bumirejo Kec Puring	60.000.000,00
6	Kelompok tani Sumber Jaya desa Jatijajar kec Ayah	60.000.000,00
7	Kelompok tani Makaryosai desa Sukomulyo kec Rowokele	50.000.000,00
8	Gapoktan Mitra tani desa Tresnorejo Kec Petanahan	50.000.000,00
9	Kelompok tani Usaha Karya Tani desa Caruban Kec Adimulyo	40.000.000,00
10	Gapoktan Sri Jaya desa Kalijirek Kec Kebumen	60.000.000,00
11	Kelompok tani Redi Mulya desa Watukelir kec ayah	40.000.000,00
12	Kelompok tani Trisnowaluyo desa Pejengkolan kec padureso	50.000.000,00
13	Gapoktan tani sejahtera desa Pagedangan Kec Ambal	50.000.000,00
14	Gapoktan Ngudi Makmur desa Jogomertan Kec Petanahan	50.000.000,00
15	Gapoktan Loh Jlnawi Desa Candiwulan Kec Kebumen	50.000.000,00
16	Kelompok Tani Sari Rimba	50.000.000,00
17	Gapoktan Mulyo-Tani I Desa Jatimulyo Kec Kuwarasan Kab Kebumen	40.000.000,00
18	Tani makmur desa Trikarso kec Sruweng	60.000.000,00
19	Tani Marsudi Tani desa Podourip kec Petanahan	60.000.000,00
20	Gapoktan Tanjung Sari Makmur desa Tanjungseto Kec Sempor	50.000.000,00
21	Sumber karya tani desa sitirejo kec klirong	40.000.000,00
22	kelompok tani Pucung desa Mangunweni Kec Ayah	60.000.000,00
23	Gapoktan Tani Maju Desa Kalibagor Kec Kebumen	50.000.000,00
24	Kelompok tani asri desa Peneket kecamatan Ambal Kab Kebumen	50.000.000,00
25	Gapoktan Purwotani desa Redisari Kec Rowokele	60.000.000,00
26	Gapoktan Tirta Mulya desa Sekarteja Kec Adimulyo	60.000.000,00
27	Gapoktan Mitra Tani desa Sidomoro Kec Buluspesantren	50.000.000,00
28	Kelompok Tani Usodo Desa Sidorejo Kec Ambal	40.000.000,00
29	Kelompok Tani Suko Mulyo - Bolorejo	50.000.000,00
	Jumlah	1.500.000.000,00

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

Tabel Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

Uraian	2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Pengeluaran Pembiayaan	9.470.000.000,00	9.470.000.000,00	-	100,00	11.750.000.000,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2019 Rp9.470.000.000,00 terdiri dari:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

Uraian	2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Penyertaan Modal/Invesatasi Pemerintah Daerah	7.970.000.000,00	7.970.000.000,00	-	100,00	10.250.000.000,00
Investasi Non Permanen Lainnya	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	100,00	1.500.000.000,00
Jumlah	9.470.000.000,00	9.470.000.000,00	-	100,00	11.750.000.000,00

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

5.1.4.2.1 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah

Anggaran dan Realisasi Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah

Uraian	2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Penyertaan Modal/Invesatasi Pemerintah Daerah	7.970.000.000,00	7.970.000.000,00	-	100,00	10.250.000.000,00

Penyertaan modal sebesar Rp7.970.000.000,00 merupakan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah sesuai Perda No.8 Tahun 2015 tanggal 2 Desember 2015 yang teralokasi untuk:

Tabel Rincian Realisasi Penyertaan Modal

No.	Nama BUMD	Jumlah (Rp)
1	Penyertaan Modal pada PDAM	3.500.000.000,00
2	Penyertaan Modal pada PD. Apotik Lukulo	100.000.000,00
3	Penyertaan Modal pada PD. BPR BKK Kebumen	270.000.000,00
4	Penyertaan Modal pada PD. BPR BKK Sruweng	600.000.000,00
5	Penyertaan Modal pada Bank Jateng	3.500.000.000,00
	Jumlah	7.970.000.000,00

5.1.4.2.2 Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya

Anggaran dan Realisasi Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah

Uraian	2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Investasi Non Permanen Lainnya	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	100,00	1.500.000.000,00

Investasi Non Permanen Lainnya sebesar Rp1.500.000.000,00 direalisasikan untuk Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk 29 Gapoktan/Poktan berdasarkan Peraturan Bupati No.8 Tahun 2019 tanggal 4 Februari 2019 Keputusan Bupati No.526/134 Tahun 2019 tanggal 11 Februari 2019.

5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tabel Anggaran dan Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Uraian	2019				Realisasi 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	202.667.918.416,18	202.667.918.416,18	-	201.692.379.502,50

Dengan demikian, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp202.667.918.416,18. Adapun perincian SiLPA adalah sebagai berikut :

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Tabel Rincian SILPA Tahun Anggaran 2019

Rincian SILPA	Kas (Rp)	Utang Pfk (Rp)	Silpa (Rp)
SILPA di RKUD	150.395.584.664,00	0,00	150.395.584.664,00
SILPA di Bendahara Penerimaan	54.699.800,00	0,00	54.699.800,00
SILPA di Bendahara Pengeluaran	13.592.215,00	0,00	13.592.215,00
SILPA BLUD RSUD Sudirman	31.174.634.945,00	0,00	31.174.634.945,00
SILPA BLUD RSUD Prembun	5.962.578.331,00	0,00	5.962.578.331,00
SILPA BLUD Puskesmas	6.698.144.743,98	905.682,00	6.697.239.061,98
SILPA Kas Lainnya	8.499.558.356,20	129.968.957,00	8.369.589.399,20
Jumlah	202.798.793.055,18	130.874.639,00	202.667.918.416,18

Adapun SiLPA tahun anggaran 2019 yang berada pada Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2019 sejumlah Rp150.395.584.664,00 terdiri dari:

Tabel Rincian SILPA di Kas daerah Tahun Anggaran 2019

DAK Fisik :	
DAK Pendidikan	208.847.890,00
DAK Bidang Kesehatan (reguler)	238,00
DAK Bidang Perumahan Perkim	123.240.108,00
DAK Bidang IKM	87.000,00
DAK Bidang Pertanian	397.032.315,00
DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	288,00
DAK Bidang Kesehatan (penugasan)	947.435.116,00
DAK Bidang Irigasi	14.358.000,00
DAK Bidang Pasar	200.200,00
Jml 1	1.691.201.155,00
DAK Non Fisik:	
Tunjangan Profesi Guru PNSD	275.794.511,00
Tamsil Guru PNSD	464.671.000,00
Tunjangan Khusus Guru PNSD	64.691.200,00
BOP Paud	2.315.100.000,00
BOP Kesetaraan	1.153.200.000,00
BOK Kesehatan	8.730.572.867,00
BOKB	2.016.167.977,00
PK2UKM	49.292.392,00
Pelayanan Adminduk	1.205.085,00
Jml 2	15.070.695.032,00
Sisa DAK Fisik 2017 dan 2018	889.118.147,00
Jml 3	889.118.147,00
Dana Desa 2019	1.632.718.000,00
Dana Desa 2018	347.443.600,00
Jml 4	1.980.161.600,00
DID	3.470.062.831,00
DAU Tambahan untuk Kelurahan	53.502.305,00
Dana Bantuan Provinsi	1.080.131.000,00
Sisa Belanja DBHCHT	520.430.778,00
Sisa Tender	41.136.242.118,21
Gagal Kontrak	917.300.000,00
Sisa Gaji & Tunjangan	32.509.508.535,00
Sisa Tamsil	14.263.904.015,00
Sisa Belanja Tak Terduga	999.430.000,00
Belanja Hibah kpd Sekolah swasta tdk terserap	3.070.900.000,00
Belanja Bansos Pendidikan tdk terserap	901.150.000,00
Belanja Bansos Ormas tdk terserap (SANIMAS)	200.000.000,00
Belanja Bantuan kpd Parpol tdk terserap	581.982.000,00
Efisiensi Belanja	31.059.865.147,79
Jml 5	130.764.408.730,00
TOTAL SILPA di RKUD	150.395.584.664,00

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan.

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, yaitu sebesar Rp201.692.379.502,50.

5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2018 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2019 sebesar Rp201.692.379.502,50.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar Rp202.667.918.416,18 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Surplus/ Defisit Anggaran	Rp. 8.945.538.913,68
- Pembiayaan Netto	<u>Rp. 193.722.379.502,50</u>
SiLPA/SiKPA Tahun berjalan	Rp. 202.667.918.416,18

5.2.4 Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 artinya tidak ada koreksi yang menambah ataupun mengurangi Saldo Anggaran Lebih Tahun berjalan.

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp202.667.918.416,18. Adapun rincian SiLPA Tahun Anggaran 2019 terdiri dari:

Tabel Rincian SILPA Tahun Anggaran 2019

Rincian SILPA	Kas (Rp)	Utang Pfk (Rp)	Silpa (Rp)
Kas di Kas Daerah	150.395.584.664,00	0,00	150.395.584.664,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	13.592.215,00	0,00	13.592.215,00
Kas di Bendahara Penerimaan	54.699.800,00	0,00	54.699.800,00
Kas di BLUD RSUD	37.137.213.276,00	0,00	37.137.213.276,00
Kas di BLUD Puskesmas	6.698.144.743,98	905.682,00	6.697.239.061,98
Kas Lainnya	8.499.558.356,20	129.968.957,00	8.369.589.399,20
Jumlah	202.798.793.055,18	130.874.639,00	202.667.918.416,18



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Adapun Silpa yang berada di Kas di Kas Daerah Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp150.395.584.664,00 terdiri dari:

Tabel Rincian Silpa di Kas Daerah TA 2019

DAK Fisik	
DAK Pendidikan	208.847.890,00
DAK Bidang Kesehatan (reguler)	238,00
DAK Bidang Perumahan Perkim	123.240.108,00
DAK Bidang IKM	87.000,00
DAK Bidang Pertanian	397.032.315,00
DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	288,00
DAK Bidang Kesehatan (penugasan)	947.435.116,00
DAK Bidang Irigasi	14.358.000,00
DAK Bidang Pasar	200.200,00
Jml 1	1.691.201.155,00
DAK Non Fisik	
Tunjangan Profesi Guru PNSD	275.794.511,00
Tamsil Guru PNSD	464.671.000,00
Tunjangan Khusus Guru PNSD	64.691.200,00
BOP Paud	2.315.100.000,00
BOP Kesetaraan	1.153.200.000,00
BOK Kesehatan	8.730.572.867,00
BOKB	2.016.167.977,00
PK2UKM	49.292.392,00
Pelayanan Adminduk	1.205.085,00
Jml 2	15.070.695.032,00
Sisa DAK Fisik 2017 dan 2018	889.118.147,00
Jml 3	889.118.147,00
Dana Desa 2019	1.632.718.000,00
Dana Desa 2018	347.443.600,00
Jml 4	1.980.161.600,00
DID	3.470.062.831,00
DAU Tambahan untuk Kelurahan	53.502.305,00
Dana Bantuan Provinsi	1.080.131.000,00
Sisa Belanja DBHCHT	520.430.778,00
Sisa Tender	41.136.242.118,21
Gagal Kontrak	917.300.000,00
Sisa Gaji & Tunjangan	32.509.508.535,00
Sisa Tamsil	14.263.904.015,00
Sisa Belanja Tak Terduga	999.430.000,00
Belanja Hibah kpd Sekolah swasta tdk terserap	3.070.900.000,00
Belanja Bansos Pendidikan tdk terserap	901.150.000,00
Belanja Bansos Ormas tdk terserap (SANIMAS)	200.000.000,00
Belanja Bantuan kpd Parpol tdk terserap	581.982.000,00
Efisiensi Belanja	31.059.865.147,79
Jml 5	130.764.408.730,00
SILPA di RKUD	150.395.584.664,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

5.3 Neraca

5.3.1 Aset

31 Desember 2019
 Rp4.482.323.838.554,00

31 Desember 2018
 Rp4.548.688.282.913,09

Saldo Aset terdiri dari berikut ini.

Tabel Rincian Aset

Uraian	31-Des-19	31-Des-18	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	(Rp)	(Rp)		
Aset Lancar	298.354.393.076,63	296.960.356.916,30	1.394.036.160,33	0,47
Investasi Jangka Panjang	138.846.162.484,71	126.335.036.385,72	12.511.126.098,99	9,01
Aset Tetap	3.928.360.648.411,66	3.844.748.357.518,27	83.612.290.893,39	2,13
Aset Lainnya	116.762.634.581,00	280.644.532.092,80	(163.881.897.511,80)	-140,35
Jumlah	4.482.323.838.554,00	4.548.688.282.913,09	(66.364.444.359,09)	(128,75)

Penurunan Aset tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp66.364.444.359,09 atau 128,75% terutama disebabkan oleh:

- Pelimpahan Aset P3D SMA/SMK ke Provinsi Jawa Tengah.
- Penghapusan Piutang Daerah.
- Penghapusan Aset Tetap.
- Hibah Aset Tetap kepada pihak lain.

5.3.1.1 Aset Lancar

31 Desember 2019
 Rp298.354.393.076,63

31 Desember 2018
 Rp296.960.356.916,30

Saldo Aset Lancar terdiri dari berikut ini.

Tabel Rincian Aset Lancar

Uraian	31-Des-19	31-Des-18	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	(Rp)	(Rp)		
Kas di Kas Daerah	150.395.584.664,00	173.202.091.321,00	(22.806.506.657,00)	(13,17)
Kas di Bendahara Penerimaan	54.699.800,00	94.152.725,00	(39.452.925,00)	(41,90)
Kas di Bendahara Pengeluaran	13.592.215,00	27.215.893,00	(13.623.678,00)	(50,06)
Kas di BLUD	43.835.358.019,98	26.341.046.792,30	17.494.311.227,68	66,41
Kas Lainnya	8.499.558.356,20	2.426.641.461,20	6.072.916.895,00	250,26
Piutang Pendapatan	24.932.358.986,00	38.265.165.588,00	(13.332.806.602,00)	(34,84)
Piutang Lainnya	42.118.746.399,00	36.111.786.775,20	6.006.959.623,80	16,63
Penyisihan Piutang	(7.220.940.055,00)	-14.624.259.572,00	7.403.319.517,00	(50,62)
Beban dibayar dimuka	72.036.588,00	91.565.399,00	(19.528.811,00)	(21,33)
Persediaan	35.653.398.103,45	35.024.950.533,60	628.447.569,85	1,79
Jumlah	298.354.393.076,63	296.960.356.916,30	1.394.036.160,33	

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

31 Desember 2019
 Rp150.395.584.664,00

31 Desember 2018
 Rp173.202.091.321,00

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2018 merupakan saldo Kas Daerah pada rekening bank dalam bentuk giro dan deposito dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Rincian Kas di Kas Daerah

Uraian	31-Des-19	31-Des-18	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	(Rp)	(Rp)		
Rekening Giro	150.395.584.664,00	111.702.091.321,00	38.693.493.343,00	34,64
Rekening Deposito	0	61.500.000.000,00	(61.500.000.000,00)	(100,00)
Jumlah	150.395.584.664,00	173.202.091.321,00	(22.806.506.657,00)	(13,17)

Kas di Kas Daerah dalam bentuk giro senilai Rp150.395.584.664,00 tersimpan pada rekening Bank Jateng Cabang Kebumen Nomor 1-008-01372-9, yang per 31 Desember 2019 terdapat saldo sebesar Rp150.460.779.764,00 atau terdapat perbedaan sebesar Rp65.195.100,00. Selisih tersebut merupakan setoran pengembalian dana BLUD RSUD dr.Sudirman, yang salah ditransfer oleh teller bank ke Rekening Giro Kas Daerah. Atas kesalahan tersebut, oleh bank telah dilakukan koreksi mutasi pada tanggal 20 Pebruari 2020.

Sedangkan Kas di Kas Daerah dalam bentuk deposito per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 karena sudah dicairkan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Rincian Kas di Kas Daerah dalam Bentuk Deposito

Uraian	31-Des-19	31-Des-18	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	(Rp)	(Rp)		
Bank Jateng Cab.Kebumen	-	35.000.000.000,00	(35.000.000.000,00)	100
Bank BNI 1946 Cab.Kebumen	-	3.100.000.000,00	(3.100.000.000,00)	100
Bank BRI Cab.Kebumen	-	12.000.000.000,00	(12.000.000.000,00)	100
Bank BRI Cab.Gombong	-	6.600.000.000,00	(6.600.000.000,00)	100
Bank Mandiri Cab.Gombong	-	4.800.000.000,00	(4.800.000.000,00)	100
Jumlah	-	61.500.000.000,00	(67.500.000.000,00)	100

Penjelasan masing-masing pencairan deposito sebagai berikut.

- a. Deposito di Bank Jateng Cabang Kebumen

Tabel Rincian Deposito di Bank Jateng Cabang Kebumen

No.	No. Bilyet	Nominal (Rp)	Suku Bunga pd saat penempatan	Tgl.Penempatan	Periode	Tgl.Pencairan
1.	A-136100	10.000.000.000,00	6,50%	21-Nov-17	1 bulan	21-Jun-19
2.	A-136101	5.000.000.000,00	6,50%	21-Nov-17	1 bulan	21-Jun-19
3.	A-241876	20.000.000.000,00	7,25%	07-Nov-18	1 bulan	07-Des-19

- b. Deposito di Bank BNI 1946 Cabang Kebumen

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Tabel Rincian Deposito di Bank BNI 1946 Cabang Kebumen

No.	No. Bilyet	Nominal (Rp)	Suku Bunga pd saat penempatan	Tgl Penempatan	Periode	Tgl.Pencairan
1.	PAA 0517588	1.000.000.000,00	10,00%	01-Sep-14	1 bulan	01-Sep-19
2.	PAB 0194380	2.100.000.000,00	8,00%	30-Sep-15	1 bulan	30-Sep-19
	Jumlah	3.100.000.000,00				

c. Deposito di Bank BRI Cabang Kebumen

Tabel Rincian Deposito di Bank BRI Cabang Kebumen

No.	No. Bilyet	Nominal (Rp)	Suku Bunga pd saat penempatan	Tgl Penempatan	Periode	Tgl.Pencairan
1.	DC 2644739	1.000.000.000,00	7,25%	07-Sep-16	1 bulan	07-Des-19
2.	DC 2644738	3.000.000.000,00	7,25%	06-Sep-16	1 bulan	06-Des-19
3.	DC 2644744	1.000.000.000,00	7,25%	13-Sep-16	1 bulan	13-Des-19
4.	DC 6228588	2.000.000.000,00	6,75%	14-Mar-17	1 bulan	14-Des-19
5.	DC 3565249	5.000.000.000,00	7,20%	27-Sep-18	1 bulan	27-Des-19
	Jumlah	12.000.000.000,00				

d. Deposito di Bank BRI Cabang Gombang

Tabel Rincian Deposito di Bank BRI Cabang Gombang

No.	No. Bilyet	Nominal (Rp)	Suku Bunga pd saat penempatan	Tgl Penempatan	Periode	Tgl.Pencairan
1.	DC 5315695	2.100.000.000,00	9,75%	2 Feb 2015	1 bulan	02-Des-19
2.	DC 5305411	2.500.000.000,00	7,50%	06-Apr-16	1 bulan	06-Sep-19
3.	DC 5317353	2.000.000.000,00	7,40%	05-Okt-18	1 bulan	05-Sep-19
	Jumlah	6.600.000.000,00				

e. Deposito di Bank Mandiri Cabang Gombang

Tabel Rincian Deposito di Bank Mandiri Cabang Gombang

No.	No. Bilyet	Nominal (Rp)	Suku Bunga pd saat penempatan	Tgl Penempatan	Periode	Tgl.Pencairan
1.	AD 605529	2.300.000.000,00	9,25%	10-Mar-15	1 bulan	10-Mar-19
2.	AD 741857	2.500.000.000,00	7,25%	06-Apr-16	1 bulan	06-Apr-19
	Jumlah	4.800.000.000,00				



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

31 Desember 2019

Rp54.699.800,00

31 Desember 2018

Rp94.152.725,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 tersebut merupakan pendapatan daerah yang belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp53.114.800,00 dan pendapatan dari Dinas Pertanian dan Pangan sebesar Rp1.585.000,00 yang baru disetorkan Bulan Januari 2020.

Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Porawisata dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Disporawisata

NO	OBWIS	RET KEBERSIHAN	RET PARKIR	RET TEMPAT REKREASI	JUMLAH
1.	Pantai Suwuk		995.000,00	5.907.000,00	6.902.000,00
2.	Waduk Sempor		22.000,00	204.000,00	226.000,00
3.	PAP Krakal	12.800,00	309.000,00	5.050.000,00	5.371.800,00
4.	Gua Petruk		9.000,00	60.000,00	69.000,00
5.	Pantai karangbolong		180.000,00	990.000,00	1.170.000,00
6.	Pantai Logending		150.000,00	1.392.000,00	1.542.000,00
7.	Gua Jatijajar		1.071.000,00	34.041.000,00	35.112.000,00
8.	Waduk wadaslintang		86.000,00	285.000,00	371.000,00
9.	Pantai Petanahan		113.000,00	2.238.000,00	2.351.000,00
	Jumlah	12.800,00	2.935.000,00	50.167.000,00	53.114.800,00

Pendapatan tersebut telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 2 Januari dan 6 Januari 2020.

Sedangkan Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Pertanian dan Pangan, terdiri dari:

Tabel Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Disporawisata

No.	Jenis Pendapatan	Jumlah	Keterangan
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	775.000,00	disetor tgl 6 Jan 2020
2.	Retribusi Rumah Potong Hewan	810.000,00	disetor tgl 6 Jan 2020
	Jumlah	1.585.000,00	

Pendapatan tersebut telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 6 Januari 2020.

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2019

Rp 13.592.215,00

31 Desember 2018

Rp27.215.893,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa UP yang terlambat disetorkan ke Rekening Kas Umum daerah, terdiri dari.

Tabel Kas di Bendahara Pengeluaran

NO.	OPD	SISA UP	KET
1.	Dispermades-P3A	13.580.597,00	disetor tgl.10 Jan 2020
2.	Kecamatan Adimulyo	11.618,00	disetor tgl 7 Jan 2020
	Jumlah	13.592.215,00	

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

5.3.1.1.4 Kas di BLUD

31 Desember 2019
Rp43.835.358.019,98

31 Desember 2018
Rp26.341.046.792,30

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2019 terdiri dari berikut ini.

Tabel Rincian Saldo Kas di BLUD Per 31 Desember 2019

No.	OPD	Kas BLUD (Rp)	Utang PFK (Rp)	Jumlah (Rp)	Rekening BLUD
1	Puskesmas Adimulyo	212.760.757,00	0,00	212.760.757,00	1.100.001.264
2	Puskesmas Alian	265.490.018,00	0,00	265.490.018,00	1.008.006.241
3	Puskesmas Ambal I	105.018.594,00	0,00	105.018.594,00	1.115.000.906
4	Puskesmas Ambal II	128.218.276,00	0,00	128.218.276,00	1.115.000.914
5	Puskesmas Ayah I	5.675.940,00	0,00	5.675.940,00	1.066.001.217
6	Puskesmas Ayah II	38.569.714,00	0,00	38.569.714,00	1.066.001.209
7	Puskesmas Bonorowo	148.447.980,00	0,00	148.447.980,00	1.071.001.373
8	Puskesmas Buayan	315.387.504,00	0,00	315.387.504,00	1.066.001.241
9	Puskesmas Buluspesantren I	94.906.764,00	0,00	94.906.764,00	1.115.000.922
10	Puskesmas Buluspesantren II	56.765.407,00	0,00	56.765.407,00	1.008.006.225
11	Puskesmas Gombang I	270.522.038,00	0,00	270.522.038,00	1.066.001.250
12	Puskesmas Gombang II	81.303.501,00	0,00	81.303.501,00	1.066.001.268
13	Puskesmas Karanganyar	89.544.759,00	0,00	89.544.759,00	1.100.001.230
14	Puskesmas Karanggayam I	9.481.572,00	0,00	9.481.572,00	1.100.001.248
15	Puskesmas Karanggayam II	116.048.820,00	0,00	116.048.820,00	1.100.001.256
16	Puskesmas Karangsambung	252.649.259,00	0,00	252.649.259,00	1.008.006.250
17	Puskesmas Kebumen I	16.898.737,00	0,00	16.898.737,00	1.008.006.233
18	Puskesmas Kebumen II	101.876.369,54	0,00	101.876.369,54	1.008.006.195
19	Puskesmas Kebumen III	170.798.873,00	0,00	170.798.873,00	1.008.006.217
20	Puskesmas Klirong I	247.665.973,00	0,00	247.665.973,00	1.008.006.268
21	Puskesmas Klirong II	298.428.530,00	0,00	298.428.530,00	1.008.006.284
22	Puskesmas Kutowinangun	354.120.954,00	855.682,00	354.976.636,00	1.115.000.931
23	Puskesmas Kuwarasan	199.458.147,44	0,00	199.458.147,44	1.066.001.225
24	Puskesmas Mirit	321.515.041,00	0,00	321.515.041,00	1.071.001.365
25	Puskesmas Padureso	65.279.393,00	0,00	65.279.393,00	1.071.001.349
26	Puskesmas Pejagoan	188.614.315,00	0,00	188.614.315,00	1.008.006.179
27	Puskesmas Petanahan	574.662.018,00	50.000,00	574.712.018,00	1.008.006.187
28	Puskesmas Poncowarno	128.344.200,00	0,00	128.344.200,00	1.115.000.949
29	Puskesmas Prembun	81.715.289,00	0,00	81.715.289,00	1.071.001.357
30	Puskesmas Puring	619.206.181,00	0,00	619.206.181,00	1.066.001.152
31	Puskesmas Rowokele	53.248.443,00	0,00	53.248.443,00	1.066.001.233
32	Puskesmas Sadang	265.163.164,00	0,00	265.163.164,00	1.008.006.276
33	Puskesmas Sempor I	477.117.941,00	0,00	477.117.941,00	1.066.001.187
34	Puskesmas Sempor II	58.216.037,00	0,00	58.216.037,00	1.066.001.195
35	Puskesmas Sruweng	271.981.480,00	0,00	271.981.480,00	1.008.006.209
36	Pengobatan Penyakit Paru	12.137.073,00	0,00	12.137.073,00	1.008.006.292
37	RSUD dr. Sudirman	31.174.634.945,00	0,00	31.174.634.945,00	1.008.002.874
38	RSUD Prembun	5.962.578.331,00	0,00	5.962.578.331,00	1.008.00729-9
	Jumlah	43.834.452.337,98	905.682,00	43.835.358.019,98	

Saldo Kas di BLUD RSUD Dr. Soedirman per 31 Desember 2019 sebesar Rp31.174.634.945,00 terdiri dari:

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

NO.	JENIS	BANK	NO REKENING	JUMLAH
1.	Kas Tunai di Bendahara Penerima			22.765.574,00
2.	Giro	Bank Jateng	1-008-00287-4	4.059.945.781,00
3.	Tabungan	BRI	3201000332565	26.728.490,00
4.	Deposito			27.000.000.000,00
5.	Dana BLUD salah transfer ke RKUD			65.195.100,00
	Jumlah			31.174.634.945,00

Saldo kas tunai pada Bendahara Penerimaan RSUD Dr. Soedirman merupakan pendapatan yang diterima tanggal 31 Desember 2019 dan baru disetorkan ke rekening BLUD pada tanggal 2 Januari 2020.

Giro RSUD dr Soedirman tersimpan pada Bank Jateng Cabang Kebumen Nomor rekening 1-008-00287-4 dengan saldo sebesar Rp4.059.945.781,00 dan berupa rekening tabungan pada BRI Cabang Kebumen Nomor rekening 3201000332565 dengan saldo sebesar Rp26.728.490,00 yang digunakan untuk menerima pembayaran pasien non tunai. Deposito sebesar Rp27.000.000.000,00 merupakan penempatan deposito pada bank umum berikut.

NO	BANK	NO BILYET	NOMINAL (Rp)	SUKU BUNGA (%)	TGL PENEMPATAN	PERIODE
1.	Bank Jateng	A-101913	3.000.000.000,00	8,25	06-Agu-15	1 bulan
		A-295862	2.000.000.000,00	8,00	27-Mei-19	1 bulan
		A-295847	2.000.000.000,00	8,00	26-Apr-19	1 bulan
		A-295835	2.000.000.000,00	8,00	09-Apr-19	1 bulan
		A-295840	2.000.000.000,00	8,00	12-Apr-19	1 bulan
		A-295839	2.000.000.000,00	8,00	12-Apr-19	1 bulan
		A-295836	1.000.000.000,00	8,00	09-Apr-19	1 bulan
		A-295572	2.000.000.000,00	7,50	11-Des-19	1 bulan
		A-295571	2.000.000.000,00	7,50	11-Des-19	1 bulan
		A-301303	1.000.000.000,00	7,50	30-Des-19	1 bulan
		A-301304	2.000.000.000,00	7,50	30-Des-19	1 bulan
		A-295595	1.000.000.000,00	7,50	30-Des-19	1 bulan
		A-295594	2.000.000.000,00	7,50	30-Des-19	1 bulan
2.	BRI Cab Kebumen	DC-2644730	2.000.000.000,00	7,25	25-Agu-16	1 bulan
		DC-2998107	1.000.000.000,00	7,20	28-Des-18	1 bulan
		JUMLAH	27.000.000.000,00			

Sedangkan dana sebesar Rp65.195.100,00 merupakan dana BLUD RSUD Dr. Soedirman yang berasal dari setoran pengembalian temuan BPK atas pekerjaan Pembangunan Jalan dan Drainase oleh PT. Serayu Putra Persada, yang oleh bank salah dimasukkan ke Rekening Kas Umum Daerah. Atas kesalahan tersebut telah dilakukan koreksi mutasi oleh bank dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas BLUD RSUD dr. Soedirman pada tanggal 20 Pebruari 2020.

Sedangkan Kas BLUD di RSUD Prembun sebesar Rp5.962.578.331,00 terdiri dari:

- Kas tunai di Bendahara Penerima Rp 7.966.802,00
 - Giro pada Bank Jateng (Rek No.1-008-00729-9) Rp5.954.611.529,00
- Jumlah Rp5.962.578.331,00

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

5.3.1.1.5 Kas Lainnya

31 Desember 2019
Rp.8.499.558.356,20

31 Desember 2018
Rp2.426.641.461,20

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2019 terdiri dari berikut ini.

Tabel Rincian Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2019

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Kas BOS di Sekolah	8.498.408.494,00
2.	Sisa Bantuan dari Kementrian Pendidikan yang Langsung Ditransfer ke Rekening Sekolah	1.149.862,20
	Jumlah	8.499.558.356,20

Saldo Kas BOS di Sekolah merupakan sisa dana Bantuan Operasional Sekolah yang berada pada Bendahara BOS SD/SMP Negeri se-Kabupaten Kebumen. Dana BOS merupakan dana yang diterima langsung ke rekening BOS Satuan Pendidikan dan dilaporkan ke Bupati untuk diakui sebagai pendapatan dan belanja dan disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Saldo Kas BOS pada masing-masing sekolah sebagaimana **lampiran 14**.

Sedangkan kas sebesar Rp1.149.862,20 merupakan sisa dana Bantuan dari Kementerian Pendidikan yang langsung ditransfer ke rekening Sekolah. Rekening tersebut telah ditutup dan saldonya disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada bulan Pebruari 2020, sebagai berikut :

Tabel Saldo Sisa Kas Bantuan dari Kementrian Pendidikan per 31 Desember 2019

No	OPD	Nama Bank	Nomor Rekening	Nilai (Rp)	Tgl penyetoran
1	SD Negeri 1 Trikarso, Sruweng	BRI	308601022810533	66.766,00	11 Pebruari 2020
2	SD N 1 Kalibening, Karanggayam	BRI	672201020556534	92.922,00	6 Pebruari 2020
3	SDN 2 kebumen / DAK	Bank Jateng	2008114717	27.501,00	4 Pebruari 2020
4	Dana BSM SDN 1 Gondanglegi, Ambal	BRI	672001000334522	246.357,00	5 Pebruari 2020
5	SDN Wero, Gombong	Bank Jateng	2066057201	177.555,00	5 Pebruari 2020
6	SD Negeri maduretno, Buluspesantren	BRI	673001001394528	100.000,00	6 Pebruari 2020
7	SD Negeri Joho, Adimulyo	BRI	669301010489532	91.346,00	5 Pebruari 2020
8	SDN 2 Kutowinangun	Bank Jateng	3115045309	77.650,00	3 Pebruari 2020
9	SD Inti SD N 1 Demangsari, Ayah	BRI	666401030732534	85.147,20	6 Pebruari 2020
10	SDN 2 Bejiryung, Sempor	Bank Jateng	2066057189	2.904,00	3 Pebruari 2020
11	SD Negeri Sidodadi, Puring	BRI	669101014013539	181.714,00	4 Pebruari 2020
	Jumlah			1.149.862,20	

5.3.1.1.6 Piutang Pendapatan

31 Desember 2019
Rp24.932.358.986,00

31 Desember 2018
Rp38.265.165.588,00

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2019 disajikan bruto sebelum dikurangi penyisihan piutang yang disajikan terpisah pada akun Penyisihan Piutang. Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Saldo Piutang Pendapatan terdiri dari berikut ini.

Tabel Rincian Saldo Piutang Pendapatan

Uraian	31-Des-19	31-Des-18	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	(Rp)	(Rp)		
Piutang Pajak	5.449.943.646,00	12.236.829.793,00	(6.786.886.147,00)	(55,46)
Piutang Retribusi	1.366.854.410,00	5.768.866.570,00	(4.402.012.160,00)	(76,31)
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3.212.300.981,00	11.125.106.402,00	(7.912.805.421,00)	(71,13)
Piutang Lain-Lain PAD yang sah	2.327.523.533,00	2.565.481.141,00	(237.957.608,00)	(9,28)
Piutang Transfer Pemerintah daerah Lainnya	3.344.694.766,00	6.568.881.682,00	(3.224.186.916,00)	(49,08)
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	9.231.041.650,00	0,00	9.231.041.650,00	
Jumlah	24.932.358.986,00	38.265.165.588,00	(13.332.806.602,00)	(34,84)

Penjelasan masing-masing jenis piutang diuraikan sebagai berikut.

a. Piutang Pajak

31 Desember 2019
 Rp5.449.943.646,00

31 Desember 2018
 Rp12.236.829.793,00

Piutang pajak merupakan hak Pemerintah Kabupaten Kebumen yang belum diterima dalam bentuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam, BPHTB dan PBB. Jumlah piutang merupakan saldo piutang pajak yang sudah ada ketetapannya, namun belum dibayar oleh Wajib Pajak per 31 Desember 2019 disajikan sebagai berikut.

Tabel Piutang Pajak

Uraian	31-Des-19	31-Des-18	Kenaikan/	%
	(Rp)	(Rp)	(Penurunan) (Rp)	
Pajak Hotel	1.475.000,00	1.350.000,00	125.000,00	9,26
Pajak Restoran	2.830.000,00	13.444.700,00	(10.614.700,00)	(78,95)
Pajak Hiburan	6.602.000,00	1.200.000,00	5.402.000,00	450,17
Pajak Air Tanah	6.014.200,00	12.130.600,00	(6.116.400,00)	(50,42)
Pajak Reklame	18.150.375,00	86.122.103,00	(67.971.728,00)	(78,92)
Pajak Parkir	2.290.000,00	2.345.000,00	(55.000,00)	(2,35)
Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	265.020.000,00	0,00	265.020.000,00	
Pajak BPHTB	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-
Piutang PBB	5.145.562.071,00	12.118.237.390,00	(6.972.675.319,00)	(57,54)
Jumlah	5.449.943.646,00	12.236.829.793,00	(6.786.886.147,00)	(55,46)

Pengurangan piutang pajak mencapai 55,46% di tahun 2019 hal ini disebabkan antara lain adanya penghapusan piutang atas pajak yang sudah kadaluarsa, yaitu dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Restoran dan Pajak Air Tanah, dengan data sebagai berikut:

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Tabel Penghapusan Piutang Pajak

NO	JENIS PAJAK	TAHUN PAJAK	NILAI PAJAK YANG DIHAPUS	KETERANGAN
1	PBB	2002 - 2013	8.380.779.814,00	Keputusan Bupati No.981.1.1/2068 Tahun 2019
2	Pajak Restoran	2010 - 2012	6.870.000,00	Keputusan Bupati No.981.1.1/2069 Tahun 2019
3	Pajak Air Tanah	2011 - 2013	1.240.600,00	Keputusan Bupati No.981.1.1/2070 Tahun 2019
		Jumlah	8.388.890.414,00	

b. Piutang Retribusi

31 Desember 2019

Rp1.366.854.410,00

31 Desember 2018

Rp5.768.866.570,00

Piutang Retribusi merupakan hak Pemerintah Kabupaten Kebumen yang berasal dari retribusi daerah, berupa tunggakan yang belum dibayar per 31 Desember 2019 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Daftar Piutang Retribusi

Piutang Retribusi	SKPD	31-Des-19	31-Des-18	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
		(Rp)	(Rp)		
Retribusi Pelayanan Kesehatan	RSU Prembun	0,00	4.982.264.410,00	(4.982.264.410,00)	(100,00)
Retribusi Pelayanan Pasar	Disperindagsar	175.663.300,00	131.623.150,00	44.040.150,00	33,46
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Disporawisata	818.753.110,00	654.979.010,00	163.774.100,00	25,00
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	Dinas Perhubungan	372.438.000,00		372.438.000,00	
	Jumlah	1.366.854.410,00	5.768.866.570,00	(4.402.012.160,00)	(76,31)

Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Prembun Tahun 2019 nihil, karena dengan ditetapkannya RSUD Prembun menjadi BLUD, tagihan dari pendapatan atas pelayanan kesehatan dikelompokkan pada Piutang Lainnya-BLUD.

Piutang Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp.175.663.300,00 merupakan tunggakan retribusi pasar yang sampai dengan 31 Desember 2019 belum dibayar dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Piutang Retribusi Pelayanan Pasar per 31 Desember 2019

No.	Wilayah	Nilai (Rp)
1.	UPTD Unit Pasar Wilayah I	21.849.500,00
2.	UPTD Unit Pasar Wilayah II	19.934.000,00
3.	UPTD Unit Pasar Wilayah III	101.095.500,00
4.	UPTD Unit Pasar Wilayah IV	32.784.300,00
	Jumlah	175.663.300,00

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp818.753.110,00 merupakan tunggakan sewa kios pada Obyek Wisata dengan rincian sebagai berikut.

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Tabel Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah per 31 Desember 2019

No	Obyek Wisata	Nilai (Rp)
1.	Goa Jatijajar	49.231.700,00
2.	Pantai Logending	41.301.200,00
3.	Pantai Suwuk	637.659.210,00
4.	Pantai Petanahan	89.278.000,00
5.	PAP Krakal	192.000,00
6..	Waduk Sempor	1.091.000,00
	Jumlah	818.753.110,00

Sedangkan Piutang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah piutang atas pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum yang pengelolaannya dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Dan per 31 Desember 2019 terdapat tunggakan dari pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Piutang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum per 31 Desember 2019

NO	PIHAK KETIGA	NO.PERJANJIAN	NILAI KONTRAK	JUMLAH DISETOR 2019	TUNGGAKAN
1.	KSU Jalan Persaudaraan	551.2/0614/II/2019	843.650.000,00	494.915.000,00	348.735.000,00
2.	PT AFFA Berlian Mas	551.2/0615/II/2019	130.000.000,00	117.000.000,00	13.000.000,00
3.	PT AFFA Berlian Mas	551.2/0616/II/2019	115.230.000,00	104.527.000,00	10.703.000,00
		Jumlah	1.088.880.000,00	716.442.000,00	372.438.000,00

c. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

31 Desember 2019	31 Desember 2018
Rp3.212.300.981,00	Rp11.125.106.402,00

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tahun 2019 merupakan bagian laba dari BUMD yang menjadi hak Pemerintah Daerah tutup buku TA 2019, sebagai berikut:

Tabel Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkann per 31 Desember 2019

NO.	JENIS PIUTANG	BUMD	JUMLAH	KET
1.	Piutang deviden	PD BPR Bank Kebumen	1.390.079.812,00	SK Bupati No.539/233 Tahun 2020
2.	Piutang deviden	PD Apotik Lukulo	146.874.735,00	SK Bupati No.539/214 Tahun 2020
3.	Piutang deviden	PDAM	1.675.346.434,00	SK Bupati No.539/213 Tahun 2020
		Jumlah	3.212.300.981,00	

d. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

31 Desember 2019	31 Desember 2018
Rp2.327.523.533,00	Rp2.565.481.141,00

Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan hak Pemerintah Kabupaten Kebumen yang belum diterima dari pendapatan Lain-lain PAD dengan rincian sebagai berikut.

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Tabel Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Retribusi	SKPD	31-Des-19	31-Des-18	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
		(Rp)	(Rp)		
Piutang Bunga Deposito	BPKAD	0	197.628.904,00	(197.628.904,00)	(100,00)
Piutang Denda Pajak	Bapenda	1.643.845.533,00	1.654.934.237,00	(11.088.704,00)	(0,67)
Jasa Investasi Dana Bergulir eks Kantor Ketahanan Pangan (Dana Perguliran 2005-2008)	PPKD	25.778.000,00	26.818.000,00	(1.040.000,00)	(3,88)
Pemakaian Kios Terminal	Dishub	657.900.000,00	686.100.000,00	(28.200.000,00)	(4,11)
	Jumlah	2.327.523.533,00	2.565.481.141,00	(237.957.608,00)	(9,28)

Saldo Piutang Denda Pajak merupakan piutang atas denda pajak yang belum dibayar dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Piutang Denda Pajak per 31 Desember 2019

NO	JENIS PAJAK	SALDO AKHIR PIUTANG	PIUTANG DENDA
1	PBB	5.145.562.071,00	1.616.974.396,00
2	BPHTB	2.000.000,00	960.000,00
3	Pajak Hotel	1.475.000,00	149.500,00
4	Pajak Restoran	2.830.000,00	918.400,00
5	Pajak Hiburan	6.602.000,00	296.040,00
6	Pajak Air Tanah	6.014.200,00	1.810.872,00
7	Pajak Parkir	2.290.000,00	734.600,00
8	Pajak Reklame	18.150.375,00	3.031.725,00
9	Pajak MBLB	265.020.000,00	18.970.000,00
	Jumlah	5.449.943.646,00	1.643.845.533,00

Saldo piutang dari jasa Investasi Dana Bergulir sebesar Rp25.778.000,00 merupakan jasa dana bergulir (Pengguliran 2005-2008) yang dikelola Dinas Pertanian dan Pangan yang masih berada di masyarakat, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Piutang Jasa Investasi dana Bergulir Dinas Pertanian dan Pangan
Per 31 Desember 2019

No	Tahun	Sisa Pinjaman per 31 Desember 2019		
		Pokok (Rp)	Jasa (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	2005	1.000.000,00	1.600.000,00	2.600.000,00
2.	2006	94.487.000,00	7.278.000,00	101.765.000,00
3.	2007	70.500.000,00	3.000.000,00	73.500.000,00
4.	2008	167.345.000,00	13.900.000,00	199.785.000,00
	Jumlah	333.332.000,00	25.778.000,00	377.650.000,00

Saldo piutang Lain-lain PAD yang Sah yang dikelola Dinas Perhubungan per 31 Desember 2019 sebesar Rp657.900.000,00 merupakan tunggakan pemakaian kios terminal Bus Tipe A Kebumen sebanyak 47 kios dengan perhitungan sebagai berikut.

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Tabel Piutang Kios Terminal per 31 Desember 2019

Jumlah Kios	Nilai Piutang (Rp)	Total Angsuran (Rp)	Sisa Piutang (Rp)
47 unit	1.250.400.000,00	592.500.000,00	657.900.000,00

e. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

31 Desember 2019	31 Desember 2018
Rp3.344.694.766,00	Rp6.568.881.682,00

Piutang Transfer merupakan Alokasi Transfer Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah Provinsi yang belum diterima Pemerintah Kabupaten Kebumen berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai Berita Acara Rekonsiliasi Nomor 24/BA-RKN/KAB-KOTA/I/2020, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Piutang Transfer Pemerintah Daerah lainnya per 31 Desember 2019

No	Jenis Bagi Hasil	Kurang Salur (Rp)
1.	PKB	2.116.727.659,00
2.	BBNKB	1.216.162.942,00
3.	PBBKB	3.848.391,00
4.	PAP	7.955.774,00
5.	PAJAK ROKOK	
	Jumlah	3.344.694.766,00

f. Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

31 Desember 2019	31 Desember 2018
Rp9.231.041.650,00	Rp0,00

Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan merupakan alokasi kurang bayar Dana Bagi Hasil yang belum disalurkan oleh Pemerintah Pusat per 31 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan per 31 Desember 2019

NO.	URAIAN BAGI HASIL	JUMLAH	KETERANGAN
1.	DBH pasal 21 dan pph pasal 25/29	1.889.554.624,00	Alokasi berdasarkan PMK 20/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2020
2.	DBH PBB	1.600.659.742,00	
3.	DBH CHT	234.282.681,00	
4.	DBH SDA Mineral dan Batubara	1.325,00	
5.	DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi	271.668.725,00	
6.	DBH SDA Kehutanan	9.241.857,00	
7.	DBH SDA Perikanan	3.677.289,00	
8.	DBH SDA Panas Bumi	8.459.588,00	
	Jumlah 1	4.017.545.831,00	
1.	DBH pasal 21 dan pph pasal 25/29	3.902.429.480,00	Alokasi berdasarkan PMK 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19
2.	DBH PBB	1.037.340.758,00	
3.	DBH CHT	-	
4.	DBH SDA Mineral dan Batubara	448.095,00	
5.	DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi	36.876.642,00	
6.	DBH SDA Kehutanan	62.604.169,00	
7.	DBH SDA Perikanan	170.627.903,00	
8.	DBH SDA Panas Bumi	3.168.772,00	
	Jumlah 2	5.213.495.819,00	
	TOTAL	9.231.041.650,00	

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

5.3.1.1.7 Piutang Lainnya

31 Desember 2019
 Rp42.118.746.399,00

31 Desember 2018
 Rp36.111.786.775,20

Piutang Lainnya merupakan hak Pemerintah Kabupaten Kebumen di luar Piutang Pajak dan Retribusi yang terdiri dari berikut ini.

Tabel Piutang Lainnya

Uraian	SKPD	31-Des-19	31-Des-18	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
		(Rp)	(Rp)		
Piutang BLUD RSUD	RSU Dr. Soedirman	30.704.897.955,00	32.868.869.374,20	(2.163.971.419,20)	(6,58)
Piutang BLUD RSUD	RSUD Prembun	8.529.659.043,00	0,00	8.529.659.043,00	
Piutang BLUD Puskesmas	Puskesmas	2.284.137.000,00	2.642.865.000,00	(358.728.000,00)	(13,57)
Piutang Dana Bergulir eks Disperindagkop	PPKD	600.052.401,00	600.052.401,00	-	-
	Jumlah	42.118.746.399,00	36.111.786.775,20	6.006.959.623,80	16,63

Piutang BLUD pada RSUD Dr. Soedirman dirinci sebagai berikut.

Tabel Piutang BLUD pada RSUD Dr. Soedirman

NO	Uraian	31-Des-19	31-Des-18	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Piutang Umum	2.443.950.767,00	2.273.201.360,00	170.749.407,00	7,51
2	Piutang BPJS	28.130.890.650,00	30.501.549.826,00	(2.370.659.176,00)	(7,77)
3	Piutang Jasa Raharja	7.756.090,00	35.272.723,00	(27.516.633,00)	(78,01)
4	Piutang LPSK	2.880.482,00	2.880.482,00	-	-
5	Piutang Bunga Deposito	67.931.505,00	38.777.234,20	29.154.270,80	75,18
6	Piutang Radiologi	-	3.497.100,00	(3.497.100,00)	(100,00)
7	Piutang Sewa	10.173.000,00	7.748.000,00	2.425.000,00	31,30
8	Piutang Sosiomedic	-	5.942.649,00	4.832.351,00	81,32
9	Piutang Jamkesda	29.046.525,00	-	29.046.525,00	
10	Piutang KAI	1.493.936,00	-	1.493.936,00	
11	Piutang TCM	10.775.000,00	-	10.775.000,00	
	Jumlah	30.704.897.955,00	32.868.869.374,20	(2.153.196.419,20)	9,53

Piutang BLUD pada RSUD Prembun dirinci sebagai berikut.

NO	Uraian	31-Des-19	31-Des-18	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Piutang Umum	51.055.394,00	-	51.055.394,00	-
2	Piutang BPJS	8.467.078.649,00	-	8.467.078.649,00	-
3	Piutang TCM Laborat	11.525.000,00	-	11.525.000,00	-
	Jumlah	8.529.659.043,00	-	8.529.659.043,00	-

Piutang BLUD pada Puskesmas merupakan pengajuan klaim BPJS atas pelayanan sampai dengan 31 Desember 2019 yang belum diterima pencairannya, dengan rincian per masing-masing Puskesmas sebagai berikut.

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Tabel Piutang BLUD Puskesmas per 31 Desember 2019

No	SKPD	Piutang BPJS	Keterangan
		(Rp)	
1	UPTD Puskesmas Adimulyo	27.970.000,00	Klaim BI Sep – Des 2019
2	UPTD Puskesmas Alian	96.896.000,00	Klaim BI Sept – Des 2019
3	UPTD Puskesmas Ambal I	109.481.000,00	Klaim BI Sept - Des 2019
4	UPTD Puskesmas Ambal II	29.250.000,00	Klaim BI Sept – Des 2019
5	UPTD Puskesmas Ayah I	247.955.500,00	Klaim Juli – Des 2019
6	UPTD Puskesmas Ayah II	30.005.000,00	Klaim BI Okt - Des 2019
7	UPTD Puskesmas Bonorowo	36.258.500,00	Klaim BI Sept – Des 2019
8	UPTD Puskesmas Buayan	47.350.000,00	Klaim BI Sept – Des 2018
9	UPTD Puskesmas Buluspesantren I	29.500.000,00	Klaim BI Sept – Des 2019
10	UPTD Puskesmas Buluspesantren II	55.045.000,00	Klaim BI Sept – Des 2019
11	UPTD Puskesmas Gombang I	89.315.000,00	Klaim BI Sept – Des 2019
12	UPTD Puskesmas Gombang II	4.695.000,00	Klaim BI Okt – Des 2019
13	UPTD Puskesmas Karanganyar	302.609.000,00	Klaim BI Sept – Des 2019
14	UPTD Puskesmas Karanggayam I	53.840.000,00	Klaim BI Sept – Des 2019
15	UPTD Puskesmas Karanggayam II	14.835.000,00	Klaim BI Okt – Des 2019
16	UPTD Puskesmas Karangsambung	143.270.000,00	Klaim BI Agust – Des 2019
17	UPTD Puskesmas Kebumen I	31.295.000,00	Klaim Okt – Des 2019
18	UPTD Puskesmas Kebumen II	22.850.000,00	Klaim BI Juni – Sept 2019
19	UPTD Puskesmas Kebumen III	61.495.000,00	Klaim BI Jul – Des 2019
20	UPTD Puskesmas Klirong I	26.785.000,00	Klaim BI Sept – Des 2019
21	UPTD Puskesmas Klirong II	33.100.000,00	Klaim BI Sept – Des 2019
22	UPTD Puskesmas Kutowinangun	123.045.000,00	Klaim BI Agust – Des 2019
23	UPTD Puskesmas Kuwarasan	43.225.000,00	Klaim BI Okt – Des 2019
24	UPTD Puskesmas Mirit	117.426.000,00	Kalim BI Agust – Des 2019
25	UPTD Puskesmas Padureso	56.920.000,00	Klaim BI Sept – Des 2019
26	UPTD Puskesmas Pejagoan	155.660.000,00	Klaim BI Sept – Des 2019
27	UPTD Puskesmas Petanahan	91.081.000,00	Klaim BI Juli – Des 2019
28	UPTD Puskesmas Poncowarno	32.615.000,00	Klaim BI Sept – Des 2019
29	UPTD Puskesmas Prembun	14.819.000,00	Klaim BI Sept – Des 2019
30	UPTD Puskesmas Puring	24.965.000,00	Klaim BI Sept – Nov 2019
31	UPTD Puskesmas Rowokele	31.925.000,00	Klaim BI Okt – Des 2019
32	UPTD Puskesmas Sadang	39.561.000,00	Klaim BI Sept – Des 2019
33	UPTD Puskesmas Sempor I	15.155.000,00	Klaim BI Sept – Des 2019
34	UPTD Puskesmas Sempor II	19.565.000,00	Klaim BI Okt - Des 2019
35	UPTD Puskesmas Sruweng	24.375.000,00	Klaim BI Okt – Des 2019
	Jumlah	2.284.137.000,00	

Piutang Dana Bergulir eks Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi disajikan sebagai berikut.

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

**Tabel Piutang Dana bergulir eks Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
per 31 Desember 2019**

No.	Tahun Pengguliran	Saldo		
		Pokok (Rp)	Jasa Pinjaman (Rp)	Jumlah Saldo Pinjaman (Rp)
I	Pengguliran			
1	Tahun 2000	116.674.500,00	11.711.500,00	128.386.000,00
2	Tahun 2002	45.434.500,00	4.719.500,00	50.154.000,00
3	Tahun 2003	120.474.700,00	13.730.000,00	134.204.700,00
5	Tahun 2005	41.313.455,00	7.179.000,00	48.492.455,00
6	Tahun 2006	37.263.409,00	6.993.700,00	44.257.109,00
7	Tahun 2007	60.633.137,00	7.950.000,00	68.583.137,00
	Jumlah	421.793.701,00	52.283.700,00	474.077.401,00
II	Digulirkan Kembali			
1	Tahun 2001	34.005.000,00	3.345.000,00	37.350.000,00
2	Tahun 2002	33.481.000,00	3.350.000,00	36.831.000,00
3	Tahun 2005	8.990.000,00	1.050.000,00	10.040.000,00
5	Tahun 2006	11.435.000,00	1.129.000,00	12.564.000,00
6	Tahun 2007	7.450.000,00	1.840.000,00	9.290.000,00
7	Tahun 2008	16.100.000,00	3.800.000,00	19.900.000,00
	Jumlah	111.461.000,00	14.514.000,00	125.975.000,00
	Jumlah Keseluruhan	533.254.701,00	66.797.700,00	600.052.401,00

Atas piutang ini pada tahun 2011 telah dilimpahkan pengurusannya ke Kantor Pengurusan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto dengan jumlah piutang yang dilimpahkan sebesar Rp665.072.300,00 dan perkembangan sampai dengan 31 Desember 2019 sebagaimana berikut.

Tabel Piutang yang Dilimpahkan ke KPKNL

Jumlah Piutang diserahkan (Rp)	Jumlah debitur/berkas	Tahap Pengurusan		
		Lunas	BAP SP	PSBDT
665.072.300,00	114 orang	30 orang	65 orang	19 orang

5.3.1.1.8 Penyisihan Piutang

31 Desember 2019 31 Desember 2018
 (Rp7.220.940.055,00) (Rp14.624.259.572,00)

Penyisihan piutang merupakan estimasi atas jumlah piutang yang diperkirakan tak tertagih berdasarkan metode penghitungan penyisihan menurut umur piutang (*aging schedule*). Besarnya penyisihan piutang pada tiap akhir tahun ditentukan berdasarkan umur piutang sesuai jenisnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Kebumen.

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Tabel Penyisihan Piutang per 31 Desember 2018

Piutang Daerah	Piutang Bruto	Penyisihan Piutang (Rp)	NRV Piutang
	(Rp)		(Rp)
Piutang Pendapatan:			
a. Piutang Pajak	5.449.943.646,00	2.419.115.896,00	3.030.827.750,00
b. Piutang Retribusi	994.416.410,00	279.139.838,00	715.276.572,00
c. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	0,00
d. Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.327.523.533,00	1.553.215.405,00	774.308.128,00
e. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	3.344.694.766,00	-	3.344.694.766,00
Sub Jumlah	12.116.578.355,00	4.251.471.139,00	7.865.107.216,00
Piutang Lainnya:			
a. Piutang BLUD RSU Dr. Soedirman	30.704.897.955,00	2.323.118.004,00	2.323.118.004,00
b. Piutang BLUD RSUD Prembun	8.529.659.043,00	46.298.511,00	-
c. Piutang BLUD Puskesmas/UP3	2.284.237.000,00	-	0,00
d. Piutang Dana Bergulir eks Disperindag	600.052.401,00	600.052.401,00	600.052.401,00
Sub Jumlah	42.118.846.399,00	2.969.468.916,00	2.923.170.405,00
Jumlah	54.235.424.754,00	7.220.940.055,00	10.788.277.621,00

Perhitungan penyisihan per masing-masing jenis piutang berdasarkan umur piutang disajikan sebagai berikut.

a. Penyisihan Piutang Pajak

Tabel Penyisihan Piutang Pajak

No	Uraian	Piutang Berdasarkan Umur (Rp)				Jumlah (Rp)
		1 s/d 2 Tahun	> 2 s/d 3 tahun	> 3 s/d 5 Tahun	> 5 Tahun	
1	PBB P2	2.985.550.653	765.913.284	1.394.098.134	-	5.145.562.071
2	BPHTB	-	-	2.000.000	-	2.000.000
1	Pajak Hotel	1.475.000	-	-	-	1.475.000
2	Pajak Restoran	1.225.000	1.300.000	305.000	-	2.830.000
3	Pajak Hiburan	6.402.000	200.000	-	-	6.602.000
4	Pajak Air Tanah	2.977.400	357.300	2.679.500	-	6.014.200
5	Pajak Parkir	1.020.000	-	1.270.000	-	2.290.000
6	Pajak Reklame	16.050.375	2.100.000	-	-	18.150.375
7	Pajak MBLB	265.020.000	-	-	-	265.020.000
Jumlah Piutang		3.279.720.428	769.870.584	1.400.352.634	-	5.449.943.646
Penyisihan Piutang		30%	50%	75%	100%	
Nilai Penyisihan		983.916.128	384.935.292	1.050.264.476	-	2.419.115.896
Net Realizable Value (NRV)						3.030.827.750

b. Penyisihan Piutang Retribusi

Tabel Penyisihan Piutang Retribusi

No.	Uraian	OPD	Nilai Piutang 2019	Nilai Penyisihan	NRV Piutang
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Retribusi Pelayanan Pasar	Disperindagsar	175.663.300,00	14.609.550,00	161.053.750,00
2.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Disporawisata	818.753.110,00	264.530.288,00	554.222.822,00
Jumlah			994.416.410,00	279.139.838,00	715.276.572,00

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Perhitungan penyisihan untuk piutang Retribusi Pelayanan Pasar yang dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan disajikan sebagai berikut.

Tabel Piutang Retribusi Pelayanan Pasar

No.	Obyek Wisata	Piutang Berdasarkan Umur (Rp)					Jumlah (Rp)
		> 5 th	> 3 s/d 5 th	> 2 S/D 3 th	1 s/d 2 th	0 th	
1.	Pasar UPT I				5.110.000,00	16.739.500,00	21.849.500,00
2.	Pasar UPT - UPW II				12.150.000,00	7.784.000,00	19.934.000,00
3.	Pasar UPT - UPW III				31.438.500,00	69.657.000,00	101.095.500,00
4.	Pasar UPT - UPW IV					32.784.300,00	32.784.300,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	48.698.500,00	126.964.800,00	175.663.300,00
% Penyisihan Piutang		100%	75%	50%	30%	0%	
Nilai Penyisihan		0,00	0,00	0,00	14.609.550,00	0,00	14.609.550,00
Net Realizable Value (NRV)		0,00	0,00	0,00	34.088.950,00	126.964.800,00	161.053.750,00

Perhitungan penyisihan untuk piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas pemakaian kios di lokasi Obyek Wisata yang dikelola Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata disajikan sebagai berikut.

Tabel Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

No.	Obyek Wisata	Piutang Berdasarkan Umur (Rp)					Jumlah (Rp)
		> 5 th	> 3 s/d 5 th	> 2 S/D 3 th	1 s/d 2 th	0 th	
1.	Goa Jatijajar	9.648.100,00	0,00	1.220.000,00	5.261.000,00	33.102.600,00	49.231.700,00
2.	Pantai Logending	8.012.000,00	652.000,00	1.318.000,00	5.622.000,00	25.697.200,00	41.301.200,00
3.	Pantai Suwuk	0	0	182.240.000,00	305.760.960,00	149.658.250,00	637.659.210,00
4.	Pantai Petanahan	34.602.000,00	10.308.000,00	20.948.000,00	20.436.000,00	2.984.000,00	89.278.000,00
5.	PAP Krakal	0	0	0	192.000,00	0	192.000,00
6.	Goa Petruk	0	0	0	0	0	0,00
7.	Waduk Sempor	0	0	0	12.000,00	1.079.000	1.091.000,00
Jumlah		52.262.100,00	10.960.000,00	205.726.000,00	337.283.960,00	212.521.050,00	818.753.110,00
% Penyisihan Piutang		100%	75%	50%	30%	0%	
Nilai Penyisihan		52.262.100,00	8.220.000,00	102.863.000,00	101.185.188,00	0,00	264.530.288,00
Net Realizable Value (NRV)		0,00	2.740.000,00	102.863.000,00	236.098.772,00	212.521.050,00	554.222.822,00

c. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Tabel Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Sah

No.	Uraian	OPD	Nilai Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	NRV (Rp)
1.	Piutang Denda Pajak Daerah	Bapenda	1.643.845.533,00	869.537.405,00	774.308.128,00
2.	Jasa Dana Bergulir eks Kantor Ketahanan Pangan (Dana Perguliran 2005-2008)	PPKD	25.778.000,00	25.778.000,00	0,00
3.	Pemakaian Kios Terminal	Dishub	657.900.000,00	657.900.000,00	0,00
Jumlah			2.327.523.533,00	1.553.215.405,00	774.308.128,00

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Perhitungan penyisihan piutang denda Pajak Daerah disajikan sebagai berikut.

Tabel Penyisihan Piutang Denda PBB P2 dan BPHTB

No	URAIAN	Piutang Berdasarkan Umur (Rp)				Jumlah (Rp)
		1 s/d 2 Tahun	> 2 s/d 3 Tahun	> 3 s/d 5 Tahun	> 5 Tahun	
1	PBB P2	580.168.916	367.638.376	669.167.104		1.616.974.396
2	BPHTB			960.000		960.000
3	PAJAK HOTEL	149.500				149.500
4	PAJAK RESTORAN	148.000	624.000	146.400		918.400
5	PAJAK HIBURAN	200.040	96.000			296.040
6	PAJAK AIR TANAH	353.208	171.504	1.286.160		1.810.872
7	PAJAK PARKIR	125.000		609.600		734.600
8	PAJAK REKLAME	2.023.725	1.008.000			3.031.725
9	PAJAK MBLB	18.970.000				18.970.000
	Jumlah	602.138.389	369.537.880	672.169.264	-	1.643.845.533
	Penyisihan Piutang	30%	50%	75%	100%	
	Nilai Penyisihan	180.641.517	184.768.940	504.126.948	-	869.537.405
	<i>Net Realizable Value (NRV)</i>					774.308.128

Perhitungan Penyisihan piutang jasa dana bergulir eks Kantor Ketahanan Pangan disajikan sebagai berikut.

Tabel Penyisihan Piutang Dana Bergulir eks Kantor Ketahanan Pangan

Tahun	Saldo 31 Desember 2018		Angsuran 2019		Saldo 31 Desember 2019	
	Pokok (Rp)	Jasa (Rp)	Pokok (Rp)	Jasa (Rp)	Pokok (Rp)	Jasa (Rp)
2005	1.000.000,00	1.600.000,00	0	0	1.000.000,00	1.600.000,00
2006	94.487.000,00	7.278.000,00	0	0	94.487.000,00	7.278.000,00
2007	70.500.000,00	3.000.000,00	0	0	70.500.000,00	3.000.000,00
2008	184.845.000,00	14.940.000,00	17.500.000,00	1.040.000,00	167.345.000,00	13.900.000,00
Jumlah	350.832.000,00	26.818.000,00	17.500.000,00	1.040.000,00	333.332.000,00	25.778.000,00
	Penyisihan > 5 th (100%)				333.332.000,00	25.778.000,00
	<i>Net Realizable Value (NRV)</i>				0,00	0,00

Perhitungan penyisihan piutang kios terminal disajikan sebagai berikut.

Tabel Penyisihan Piutang Kios Terminal

Umur Piutang	Jumlah Kios	Nilai Piutang (Rp)	Total Angsuran (Rp)	Sisa Piutang (Rp)	Penyisihan		NRV (Rp)
					(%)	Nilai (Rp)	
> 5 th	47 kios	1.250.400.000,00	592.500.000,00	657.900.000,00	100	657.900.000,00	0,00

d. Penyisihan Piutang Lainnya

A



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019**

Tabel Penyisihan Piutang Lainnya

No.	Piutang Lain-Lain	OPD	Tahun 2019	Nilai Penyisihan	NRV
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Piutang BLUD RSUD	RSU Dr. Soedirman	30.704.897.955,00	2.323.118.004,00	28.381.779.951,00
2	Piutang BLUD RSUD	RSUD Prembun	8.529.659.043,00	46.298.511,00	8.483.360.532,00
3	Piutang BLUD Puskesmas	Puskesmas	2.284.237.000,00	0	2.284.237.000,00
4	Piutang Dana Bergulir eks Disperindagkop	PPKD	600.052.401,00	600.052.401,00	0,00
	Jumlah		42.118.846.399,00	2.969.468.916,00	39.149.377.483,00

Dari piutang lainnya pada RSUD Dr Soedirman sebesar Rp30.704.897.955,00 hanya piutang umum sebesar Rp2.443.950.767,00 yang diperhitungkan penyisihan piutang, dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel Penyisihan Piutang Umum RSUD Dr Soedirman

No.	Umur Piutang	Nilai Piutang (Rp)	Penyisihan	Nilai Penyisihan (Rp)	NRV
					(Rp)
1.	> 1 - 3 bl	68.138.476,00	30%	20.441.542,80	47.696.933,20
2.	> 3 - 6 bl	85.997.812,00	50%	42.998.906,00	42.998.906,00
3.	> 6 - 12 bl	120.547.695,00	75%	90.410.771,25	30.136.923,75
4.	> 12 bl	2.169.266.784,00	100%	2.169.266.784,00	0,00
	Jumlah	2.443.950.767,00		2.323.118.004,05	120.832.762,95

Penyisihan piutang lainnya dana bergulir eks Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebesar 100% dari saldo piutang, karena umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun, yaitu sebesar Rp600.052.401,00. Adapun perhitungan penyisihannya disajikan sebagai berikut.

Tabel Penyisihan Piutang eks Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi

No.	Tahun Pengguliran	Pinjaman			Umur Piutang (th)	Penyisihan Piutang		NRV (Rp)
		Pokok (Rp)	Jasa (Rp)	Jumlah (Rp)		(%)	Nilai (Rp)	
I	Pengguliran							
1	2000	116.674.500,00	11.711.500,00	128.386.000,00	> 5 th	100	128.386.000,00	0,00
2	2002	45.434.500,00	4.719.500,00	50.154.000,00	> 5 th	100	50.154.000,00	0,00
3	2003	120.474.700,00	13.730.000,00	134.204.700,00	> 5 th	100	134.204.700,00	0,00
5	2005	41.313.455,00	7.179.000,00	48.492.455,00	> 5 th	100	48.492.455,00	0,00
6	2006	37.263.409,00	6.993.700,00	44.257.109,00	> 5 th	100	44.257.109,00	0,00
7	2007	60.633.137,00	7.950.000,00	68.583.137,00	> 5 th	100	68.583.137,00	0,00
	Sub Jumlah	421.793.701,00	52.283.700,00	474.077.401,00			474.077.401,00	0,00
II	Digulirkan Kembali							
10	2001	34.005.000,00	3.345.000,00	37.350.000,00	> 5 th	100	37.350.000,00	0,00
11	2002	33.481.000,00	3.350.000,00	36.831.000,00	> 5 th	100	36.831.000,00	0,00
12	2005	8.990.000,00	1.050.000,00	10.040.000,00	> 5 th	100	10.040.000,00	0,00
13	2006	11.435.000,00	1.129.000,00	12.564.000,00	> 5 th	100	12.564.000,00	0,00
14	2007	7.450.000,00	1.840.000,00	9.290.000,00	> 5 th	100	9.290.000,00	0,00
15	2008	16.100.000,00	3.800.000,00	19.900.000,00	> 5 th	100	19.900.000,00	0,00
	Sub Jumlah	111.461.000,00	14.514.000,00	125.975.000,00			125.975.000,00	0,00
	Jumlah	533.254.701,00	66.797.700,00	600.052.401,00			600.052.401,00	0,00

A



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019**

5.3.1.1.9 Beban Dibayar Dimuka

31 Desember 2019

31 Desember 2018

Rp72.036.588,00

Rp91.565.399,00

Beban dibayar dimuka disajikan sebagai berikut.

Tabel Beban Dibayar di Muka

Uraian	OPD	31-Des-19	31-Des-18	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
		(Rp)	(Rp)		
Sewa Rumah & Belanja Kursus	RSUD Prembun	14.586.833,00	43.097.500,00	(28.510.667,00)	(66,15)
Asuransi Kendaraan Dinas	BPKAD	57.449.755,00	48.467.899,00	8.981.856,00	18,53
Jumlah		72.036.588,00	91.565.399,00	(19.528.811,00)	(21,33)

Beban dibayar dimuka pada RSUD Prembun secara rinci disajikan sebagai berikut:

Tabel Beban Dibayar di Muka pada RSUD Prembun

NO.	URAIAN BEBAN	NO DOKUMEN/BUKTI PENGELUARAN	TGL DOKUMEN/BUKTI	JML BEBAN	JANGKA WAKTU	MASA MANFAAT	SISA MASA MANFAAT	NILAI BEBAN DIBAYAR DIMUKA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Beban Sewa Rumah	00945/1.02.02.02/2019	23-12-2019	8.333.333	01-01-2020 sd.	0 bulan	6 bulan	8.333.333
2	Beban Barang dan Jasa BLUD (Kursus-Kursus)	01175/BLUD/1.02.02.02/2019	29-11-2019	5.003.500	1-2 Februari 2020			5.003.500
3	Beban Barang dan Jasa BLUD (Kursus-Kursus)	01229/BLUD/1.02.02.02/2019	16-12-2019	1.250.000	15-02-2020			1.250.000
	JUMLAH			14.586.833				14.586.833

Sedangkan beban dibayar di muka pada BPKAD secara rinci disajikan sebagai berikut:

Tabel Beban Dibayar di Muka pada BPKAD

NO.	URAIAN BEBAN	NO DOKUMEN/BUKTI PENGELUARAN	TGL DOKUMEN/BUKTI PENGELUARAN	JML BEBAN	JANGKA WAKTU	MASA MANFAAT	SISA MASA MANFAAT	NILAI BEBAN DIBAYAR DIMUKA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Beban Jasa Premi Asuransi Kendaraan Toyota Camry 2,5i hybrid	2173201700114	28/08/2017	14.868.600,00	25-8-2017 sd 25-08-2020	36 bln	1-01-2020 sd. 25-8-2020	3.304.133,33
2	Beban Jasa Premi Asuransi Kendaraan Toyota Fortuner 2,7V	2173201700113	28/08/2017	15.136.400,00	25-8-2017 sd 25-08-2020	36 bln	1-01-2020 sd. 25-8-2020	3.363.644,44
3	Beban Jasa Premi Asuransi 6 Kendaraan Innova	11800000011296	24/04/2018	45.413.971,08	23-4-2018 sd. 23-04-2020	24 bln	1-01-2020 sd. 23-04-2020	7.568.995,18
4	Beban Jasa Premi Asuransi Toyota Corolla Altis 1,8 G MT (AA 2 D) dan (AA 9506 HW)	11900000093262	29/07/2019	27.996.820,00	01-08-2019 sd. 01-08- 2022	36	1-02-2020 sd. 01-08-2022	24.886.062,22
5	Mitsubishi Pajero Sport 2.5 Diesel exceed 4x2 M/T dan Toyota Kijang (AA 47 D)	11900000094516		21.992.305,00	01-08-2019 sd. 01-08- 2021	24	1-02-2020 sd. 01-08-2021	18.326.920,83
	JUMLAH			125.408.101,08				57.449.765,01

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

5.3.1.1.10 Persediaan

31 Desember 2019	31 Desember 2018
Rp35.653.398.103,45	Rp35.024.950.533,60

Nilai persediaan merupakan hasil *stok opname* dari persediaan bahan pakai habis, bahan/material dan bahan lainnya yang dilakukan per 31 Desember 2019, yang disajikan dengan harga beli terakhir, sebagai berikut.

Tabel Daftar Persediaan

Uraian	31-Des-19	31-Des-18	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	(Rp)	(Rp)		
Bahan Pakai Habis	5.649.991.525,00	5.615.205.692,00	34.785.833,00	0,62
Bahan/Material	29.888.981.578,45	28.510.782.841,60	1.378.198.736,85	4,83
Barang Lainnya	114.425.000,00	898.962.000,00	(784.537.000,00)	(87,27)
Jumlah	35.653.398.103,45	35.024.950.533,60	628.447.569,85	1,79

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa Persediaan tahun 2019 naik sebesar 1,79% dibandingkan nilai Persediaan tahun 2018.

Secara rinci persediaan per 31 Desember 2019 di SKPD disajikan sebagaimana **lampiran 15**.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

31 Desember 2019	31 Desember 2018
Rp138.846.162.484,71	Rp126.335.036.385,72

Investasi Jangka Panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.

Investasi jangka panjang terdiri dari :

Tabel Investasi Jangka Panjang

Uraian	31-Des-19	31-Des-18	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	(Rp)	(Rp)		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0	0	-	-
Investasi Jangka Panjang Permanen	138.846.162.484,71	126.335.036.385,72	12.511.126.098,99	9,90
Jumlah	138.846.162.484,71	126.335.036.385,72	12.511.126.098,99	9,90

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

31 Desember 2019	31 Desember 2018
Rp0,00	Rp0,00

Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada Pemerintah Kabupaten Kebumen berupa Investasi Non Permanen Lainnya dalam bentuk dana bergulir yaitu dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Investasi Non Permanen Lainnya dalam bentuk dana bergulir ini dikelola oleh Dinas Pertanian dan Pangan, disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan atau *Net Realizable Value (NRV)* setelah dikurangi dengan penyisihan investasi tidak tertagih dengan rincian berikut ini.

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Tabel Daftar Investasi Non Permanen Lainnya

Uraian	31-Des-19	31-Des-18	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	(Rp)	(Rp)		
Dana Bergulir (penguliran 2005-2008)	-	-	0,00	
Dana Talangan (pembiayaan 2019)	-	-	0,00	
Jumlah	-	-	0,00	

Dana Bergulir pada Dinas Pertanian dan Pangan (pengguliran 2005-2008) per 31 Desember 2019 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel Rincian Dana bergulir Pengguliran 2005-2008 per 31 Desember 2019

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo awal 1 Januari 2019	350.832.000,00
Penerimaan kembali pokok pinjaman di th 2019	17.500.000,00
Saldo akhir per 31 Desember 2019	333.332.000,00
Penyisihan (tahun ke-7)	100%
Nilai Penyisihan	333.332.000,00
Nilai Bersih (NRV) per 31 Desember 2019	-

Sedangkan Dana Talangan Pengadaan Pangan yang disalurkan kepada Kelompok Tani melalui Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp1.500.000.000,00 sampai dengan akhir tahun 2019 sudah dilunasi 100% oleh kelompok tani penerima. Adapun rincian Dana Talangan disajikan sebagai berikut:

Tabel Rincian Dana Talangan per 31 Desember 2019

NO	KELOMPOK PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH PINJAMAN		JUMLAH PENGEMBALIAN		SALDO PINJAMAN	
			POKOK	JASA	POKOK	JASA	POKOK	JASA
1	Marsudi tani	Podourip, Petanahan	60.000.000,00	1.350.000,00	60.000.000,00	1.350.000,00	-	-
2	Sumber jaya	Jatijajar, Ayah	60.000.000,00	1.350.000,00	60.000.000,00	1.350.000,00	-	-
3	Pucug	Mangunweni, Ayah	60.000.000,00	1.350.000,00	60.000.000,00	1.350.000,00	-	-
4	Purwo Tani	Redisari, Rowokele	60.000.000,00	1.350.000,00	60.000.000,00	1.350.000,00	-	-
5	Tani Mulyo	Mengkowo, Kebumen	60.000.000,00	1.350.000,00	60.000.000,00	1.350.000,00	-	-
6	Padi Mas	Bumirejo, Puring	60.000.000,00	1.350.000,00	60.000.000,00	1.350.000,00	-	-
7	Snijaya	Kalijrek, Kebumen	60.000.000,00	1.350.000,00	60.000.000,00	1.350.000,00	-	-
8	Tirto Mulyo I	Sekarteja, Adimulyo	60.000.000,00	1.350.000,00	60.000.000,00	1.350.000,00	-	-
9	Tani Makmur	Trikarso, Sruweng	60.000.000,00	1.350.000,00	60.000.000,00	1.350.000,00	-	-
10	Sumber Barokah	Kedungweru, Ayah	60.000.000,00	1.350.000,00	60.000.000,00	1.350.000,00	-	-
11	Tani Sejahtera	Pagedangan, Ambal	50.000.000,00	1.125.000,00	50.000.000,00	1.125.000,00	-	-
12	Asri	Peneket, Ambal	50.000.000,00	1.125.000,00	50.000.000,00	1.125.000,00	-	-
13	Mitra Tani	Tresnorejo, Petanahan	50.000.000,00	1.125.000,00	50.000.000,00	1.125.000,00	-	-
14	Karya Dadi V	Caruban, Adimulyo	50.000.000,00	1.125.000,00	50.000.000,00	1.125.000,00	-	-
15	Mitra Tani	Sidomoro, Buluspesantren	50.000.000,00	1.125.000,00	50.000.000,00	1.125.000,00	-	-
16	Trisno Waluyo	Pejengkolan, Padureso	50.000.000,00	1.125.000,00	50.000.000,00	1.125.000,00	-	-
17	Makaryo Sari	Sukomulyo, Rowokele	50.000.000,00	1.125.000,00	50.000.000,00	1.125.000,00	-	-
18	Suko Mulyo	Balorejo, Bonorowo	50.000.000,00	1.125.000,00	50.000.000,00	1.125.000,00	-	-
19	Tanjung Sari Makmur	Tunjungseto, Sempor	50.000.000,00	1.125.000,00	50.000.000,00	1.125.000,00	-	-
20	Sari Rimba	Kalirejo, Karanggayam	50.000.000,00	1.125.000,00	50.000.000,00	1.125.000,00	-	-
21	Ngudi Makmur	Jogomertan, Petanahan	50.000.000,00	1.125.000,00	50.000.000,00	1.125.000,00	-	-
22	Tani Maju	Kalibagor, Kebumen	50.000.000,00	1.125.000,00	50.000.000,00	1.125.000,00	-	-
23	Loh Jinawi	Candiwulan, Kebumen	50.000.000,00	1.125.000,00	50.000.000,00	1.125.000,00	-	-
24	Ngesti Utomo	Kaliputih, Kutowinangun	50.000.000,00	1.125.000,00	50.000.000,00	1.125.000,00	-	-
25	Redi Mulyo	Watukelir, Ayah	40.000.000,00	900.000,00	40.000.000,00	900.000,00	-	-
26	Tani Usodo	Sidorejo, Ambal	40.000.000,00	900.000,00	40.000.000,00	900.000,00	-	-
27	Mulyo Tani I	Jitimulyo, Kuwarasan	40.000.000,00	900.000,00	40.000.000,00	900.000,00	-	-
28	Usaha Karya Tani	Caruban, Adimulyo	40.000.000,00	900.000,00	40.000.000,00	900.000,00	-	-
29	Sumber Karya Tani	Stirejo, Klirong	40.000.000,00	900.000,00	40.000.000,00	900.000,00	-	-
		JUMLAH	1.500.000.000,00	33.750.000,00	1.500.000.000,00	33.750.000,00	-	-

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

31 Desember 2019
Rp138.846.162.484,71

31 Desember 2018
Rp126.335.036.385,72

Investasi Jangka Panjang Permanen terdiri dari berikut ini.

Tabel Daftar Investasi Jangka Panjang Permanen

Uraian	31-Des-19	31-Des-18	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	(Rp)	(Rp)		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	138.846.162.484,71	126.335.036.385,72	12.511.126.098,99	9,90
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	
Jumlah	138.846.162.484,71	126.335.036.385,72	12.511.126.098,99	9,90

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah terdiri dari penyertaan modal pada tujuh BUMD dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

No.	Uraian	31-Des-19	31-Des-18	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
		(Rp)	(Rp)		
1.	PD BPR Kebumen	17.345.297.156,00	16.353.145.471,00	992.151.685,00	6,07
2.	PD Apotik Luk Ulo	1.938.762.191,00	1.749.459.214,00	189.302.977,00	10,82
3.	PDAM Kab. Kebumen	47.851.924.128,00	44.212.295.781,00	3.639.628.347,00	8,23
4.	PD BPR BKK Kebumen	26.260.179.009,71	24.379.463.639,23	1.880.715.370,48	7,71
5.	PD BKK Sruweng	2.520.000.000,00	210.672.280,49	2.309.327.719,51	1.096,17
6.	PT Bank Jateng	42.779.000.000,00	39.279.000.000,00	3.500.000.000,00	8,91
7.	PT PRPP	151.000.000,00	151.000.000,00	-	-
	Jumlah	138.846.162.484,71	126.335.036.385,72	12.511.126.098,99	9,90

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah daerah yang disajikan pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen dihitung dengan dua metode penilaian yaitu metode biaya dan metode ekuitas. Penyertaan modal pada PT Bank Jateng, PD BKK Sruweng dan PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PT PRPP) disajikan menggunakan metode biaya karena kepemilikan saham <20%, sedangkan untuk Perusahaan Daerah Air Minum, Perusahaan Daerah Apotik Luk Ulo, Bank Perkreditan Rakyat Kebumen, dan Bank Perkreditan Rakyat/Badan Kredit Kecamatan Kebumen menggunakan metode ekuitas.

PD BKK Sruweng pada Tahun Anggaran sebelumnya disajikan menggunakan metode ekuitas, namun pada tahun 2019 disajikan dengan metode biaya. Hal ini sebagai akibat dilakukan merger PD BKK Sruweng ke PT Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah Perseroda, dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0030945.AH.01.01.TAHUN 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan terbatas PT Badan Kredit Kecamatan Jawa tengah Perseroda, modal ditempatkan dan modal disetor milik Pemerintah Kabupaten Kebumen ditetapkan sebesar Rp1.920.000.000,00 dengan jumlah saham 192 lembar.

Nilai investasi dengan metode ekuitas diperoleh dari data Laporan Keuangan Perusahaan Daerah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Sehingga penyajian penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kebumen berdasarkan kedua metode tersebut dilihat dari nilai ekuitas yang tersaji pada Laporan Keuangan BUMD adalah sebagai berikut.

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Tabel Investasi Permanen dengan Metode Ekuitas & Metode Biaya

BUMD	Modal Disetor	Ekuitas BUMD	Opini LK BUMD	Prosentase Kepemilikan	Metode Penilaian	Nilai Investasi
	(Rp)	(Rp)				(Rp)
PD BPR Kebumen	11.000.000.000,00	17.345.297.156,00	Wajar	100,00%	Ekuitas	17.345.297.156,00
PD Apotik Luk Ulo	1.556.500.000,00	1.938.762.191,00	Wajar	100,00%	Ekuitas	1.938.762.191,00
PDAM Kab. Kebumen	36.961.647.118,00	47.851.924.128,00	Wajar	100,00%	Ekuitas	47.851.924.128,00
PD BPR BKK Kebumen	15.700.000.000,00	52.300.695.100,00	Wajar	50,21%	Ekuitas	26.260.179.009,71
PD BKK Sruweng	2.520.000.000,00	237.836.061.724,00	Wajar	0,55%	Biaya	2.520.000.000,00
PT Bank Jateng	42.779.000.000,00	7.856.823.949.000,00	Wajar	1,14%	Biaya	42.779.000.000,00
PT PRPP	151.000.000,00	51.066.667.736,00	Wajar	0,30%	Biaya	151.000.000,00
Jumlah	110.668.147.118,00	8.265.163.357.035,00				138.846.162.484,71

Penambahan modal disetor yang disertakan Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp7.970.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Penambahan Modal Disetor BUMD oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen

No	BUMD	31 Desember 2018 (Rp)	Tambahan modal 2019 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	Keterangan
1.	PD BPR Kebumen	11.000.000.000,00	0,00	11.000.000.000,00	
2.	PD Apotik Luk Ulo	1.456.500.000,00	100.000.000,00	1.556.500.000,00	SP2D No.00303/BTL-NON GJ/Pemby/2019 tanggal 20 Juni 2019
3.	PDAM	33.461.647.118,00	3.500.000.000,00	36.961.647.118,00	SP2D No.00300/BTL-NON GJ/Pemby/2019 tanggal 20 Juni 2019
4.	PD BPR/BKK Kebumen	15.430.000.000,00	270.000.000,00	15.700.000.000,00	SP2D No.00302/BTL-NON GJ/Pemby/2019 tanggal 20 Juni 2019
5.	PD BKK Sruweng	1.920.000.000,00	600.000.000,00	2.520.000.000,00	SP2D No.00301/BTL-NON GJ/Pemby/2019 tanggal 20 Juni 2019
6.	PT Bank Jateng	39.279.000.000,00	3.500.000.000,00	42.779.000.000,00	SP2D No.00012/BTL-NON GJ/Pemby/2019 tanggal 12 Maret 2019
7.	PT PRPP	151.000.000,00	0	151.000.000,00	
	Jumlah	102.698.147.118,00	7.970.000.000,00	110.668.147.118,00	

5.3.1.3 Aset Tetap

31 Desember 2019	31 Desember 2018
Rp3.928.360.648.411,66	Rp3.844.748.357.518,27

Perincian masing-masing aset tetap disajikan sebagai berikut.

Tabel Rincian Aset Tetap

No.	Uraian	31-Des-19	31-Des-18	Kenaikan/
		(Rp)	(Rp)	(Penurunan) (Rp)
1.	Tanah	777.250.679.277,55	740.069.826.489,55	37.180.852.788,00
2.	Peralatan dan Mesin	765.195.323.365,00	659.408.299.708,00	105.787.023.657,00
3.	Gedung dan Bangunan	1.490.101.861.928,00	1.420.934.740.781,00	69.167.121.147,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.430.068.733.183,25	2.300.264.078.380,25	129.804.654.803,00
5.	Aset Tetap Lainnya	133.561.451.585,00	120.843.823.216,00	12.717.628.369,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	556.338.000,00	-556.338.000,00
7.	Akumulasi Penyusutan	(1.667.817.400.927,14)	(1.397.328.749.056,53)	(270.488.651.870,61)
	Jumlah	3.928.360.648.411,66	3.844.748.357.518,27	83.612.290.893,39

5.3.1.3.1 Tanah

31 Desember 2019	31 Desember 2018
Rp.777.250.679.277,55	Rp740.069.826.489,55

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Aset Tetap Tanah tersebar di Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana lampiran 16.

Bertambah dan berkurangnya Aset Tetap Tanah selama tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel Bertambah dan Berkurang Aset Tetap Tanah

31 Desember 2018 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Mutasi Bersih (Rp)	31-Des-19 (Rp)
740.069.826.489,55	43.126.563.638,00	5.945.710.850,00	37.180.852.788,00	777.250.679.277,55

Penambahan nilai Aset Tetap Tanah terjadi karena hal-hal sebagai berikut.

Tabel Penambahan Aset Tetap Tanah

No	Uraian	Nilai
1	Belanja Modal	33.834.086.638,00
2	Mutasi antar OPD	3.997.712.000,00
3	Aset yang Belum/Baru Tercatat	4.078.428.868,00
4	Koreksi Pencatatan	1.166.876.132,00
4	Penambahan dari Reklas	49.460.000,00
	JUMLAH	43.126.563.638,00

Penambahan Aset Tetap Tanah dari Belanja Modal Tanah tahun 2019 berada pada 5 (lima) OPD sebagai berikut.

Tabel Belanja Modal Tanah Tahun 2019

No	OPD	Peruntukan Tanah	Nilai (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	Tanah Bangunan Pendidikan SD Brecong	1.443.386.880,00
		Tanah Bangunan Pendidikan SDN Tambak	433.033.120,00
2.	Dinas PU & PR	Atribusi Tanah Utk Saluran Adikarso - Depokrejo	5.737.250,00
		Tanah Tugu Batas Kab. Kebumen	49.659.000,00
		Pemasangan Patok Ruas Jalan K1 Sadang-	98.067.750,00
		Penggantian Tanaman Tanah Untuk Jembatan	153.513.000,00
		Tanah Polres Kebumen	367.926.000,00
		JLU Desa Gunungsari	737.840.500,00
		JJLS Desa TambakMulyo 131 Bidang	825.166.292,00
		Tanah Kantor Kecamatan Adimulyo	1.158.353.400,00
		Tanah Tugu Batas Kab. Desa Jatiluhur	1.177.309.000,00
		JLU Desa Glontor	1.290.638.000,00
		Tanah Untuk Jembatan Ruas Jalan Karangrejo-	1.545.637.714,00
		Tanah Jalan Kawasan Industri	3.086.352.590,00
		JJLS Desa Jladri 81 Bidang	17.436.199.226,00
3.	Dinas Kesehatan	Puskesmas Buayan	673.293.440,00
		Puskesmas Sadang	167.800.306,00
		Puskesmas Buluspesantren 2	491.400.400,00
		Puskesmas Sruweng	719.275.400,00
		Pustu Selogiri	95.490.400,00
		Pustu Penimbun	111.305.400,00
4.	Puskesmas Alian	Puskesmas Kebumen 2	1.032.828.400,00
		Tanah Puskesmas Alian	369.116.920,00
5.	RSUD Dr. Soedirman Kebumen	Appraisal Tanah RSUD Dr Soedirman	364.756.250,00
Jumlah			33.834.086.638,00

Penambahan Aset Tetap Tanah karena mutasi Aset Tetap Tanah antar OPD dijelaskan dalam tabel berikut ini.

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Tabel Penambahan Karena Mutasi Aset Tetap Tanah antar OPD

No	OPD Asal	OPD Penerima	Harga Perolehan	Keterangan
1	Bagian Umum Setda	Dinas Permukiman dan	3.664.672.000,00	Tanah Tamankota
2	Puskesmas Prembun	RSUD Prembun	288.000.000,00	Tanah Puskesmas
3	Dinas Pendidikan (regrup SD)	Dinas Pendidikan (regrup SD)	45.040.000,00	Tanah SD Negeri Mrinen
Jumlah			3.997.712.000,00	

Rincian Aset Tetap Tanah yang baru tercatat yang sebelumnya belum tercatat pada Neraca Kabupaten, terdiri dari berikut.

Tabel Aset Tetap Tanah Baru Tercatat

No	OPD	Uraian	Luasan	Harga Perolehan	Keterangan
			(m ²)	(Rp)	
1	Dinas Pertanian dan	Tanah	1.110	2.182.680.000,00	RPH
2	Dinas Kelautan dan	Tanah Tambak	31.559	54.374.868,00	2 bidang
3	Dinas Pendidikan	Tanah	1.638	1.755.000.000,00	SD 4
4	Kelurahan Selang	Tanah Sawah	964	26.028.000,00	1 bidang
5	Kelurahan Plarangan	Tanah makam	3.589	12.250.000,00	2 bidang
		Tanah Pertanian	1.336	48.096.000,00	1 bidang
Jumlah				4.078.428.868,00	

Tanah yang baru tercatat tersebut pada Dinas Kelautan dan Perikanan karena ada 2 (dua) bidang tanah tambak yang belum tercatat, dan nilai perolehan dihitung berdasarkan nilai NJOP pada saat tanah tersebut diperoleh (tahun 2016), Pada Dinas Pendidikan penambahan tanah di SDN 4 Karanganyar dan pada Kelurahan Plarangan dinilai dengan harga/nilai tanah sekitar.

Koreksi tambah nilai Aset Tetap Tanah terdapat pada OPD sebagai berikut.

Tabel Koreksi Tambah Nilai Aset Tanah

No	OPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.075.132,00
2	Kelurahan Tamanwinangun	562.644.000,00
3	Kelurahan Wonokriyo	601.157.000,00
Jumlah		1.166.876.132,00

Pada Dinas Kelautan dan Perikanan, koreksi aset tetap tanah karena penyesuaian perhitungan sesuai bidang pada sertifikat, dan nilai perolehan dihitung berdasarkan nilai NJOP pada saat tanah tersebut pertama kali dicatat di KIB. Pada kelurahan Tamanwinangun koreksi karena penggabungan pencatatan sesuai bidang sertifikat. Dan koreksi tambah pada Kelurahan Wonokriyo karena tukar menukar tanah yang dinilai berdasarkan hasil appraisal.

Penambahan dari reklas Aset Tetap Tanah terletak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp.49.460.000,00 berasal dari reklas DED tahun 2018 berupa appraisal tanah JLU Desa Gunungsari.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Pengurangan nilai Aset Tanah Tahun 2019 dijelaskan sebagai berikut.

Tabel Pengurangan Nilai Aset Tetap Tanah

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Mutasi antar OPD	3.997.712.000,00
2.	Hibah	348.192.000,00
3.	Koreksi Pencatatan	1.544.410.600,00
4.	Pengurangan karena Reklas	55.396.250,00
	Jumlah	5.945.710.850,00

Rincian pengurangan nilai Aset Tetap Tanah sebesar Rp.3.997.712.000,00 karena mutasi antar OPD tahun 2019 dapat dilihat pada tabel penambahan karena mutasi Aset Tetap Tanah antara OPD di atas.

Sedangkan Pengurangan aset tetap tanah karena hibah kepada KUA Kebumen senilai Rp.348.192.000,00 yang tercatat pada PPKD, sebagaimana SK Hibah Nomor 028/450 Tahun 2018.

Rincian pengurangan koreksi pencatatan pada aset tanah adalah sebagai berikut.

Tabel Pengurangan Koreksi Pencatatan Aset Tetap Tanah

No	OPD	Uraian	Nilai (Rp)
1	DPU-PR	Apraisal Tanah Untuk Jembatan, Tanah JJLS Desa Tambakmulyo dan Jladri	133.024.600,00
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tanah Tambak	57.450.000,00
3	Kelurahan Wonokriyo	Tanah Pertanian	54.612.000,00
4	Kelurahan Tamanwinangun	Tanah Pertanian	562.644.000,00
5	Kelurahan Panjer	Tanah Pertanian	710.652.000,00
6	Kelurahan Selang	Tanah Pertanian	26.028.000,00
		Jumlah	1.544.410.600,00

Pengurangan koreksi pencatatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tersebut berupa apraisal tanah yang pada tahun 2018 sudah dicatat pada aset tanah jembatan dan tanah JJLS. Untuk pengurangan koreksi pada Dinas Kelautan dan Perikanan, Kelurahan Tamanwinangun, Kelurahan Panjer dan Kelurahan Selang berupa penyesuaian pencatatan sesuai bidang pada sertifikat. Sedangkan koreksi pengurangan pada Kelurahan Wonokriyo karena tukar menukar tanah dengan PKU Muhammadiyah Gombang.

Pengurangan Aset Tetap Tanah karena reklasifikasi ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp.55.396.250,00 merupakan biaya atribusi atas pengadaan tanah untuk saluran Adikarso-Depokrejo dan biaya apraisal tanah tugu batas Kabupaten Kebumen.

Tahun 2019 masih terdapat tanah milik Pemerintah Kabupaten Kebumen yang dipinjampakaikan kepada Pihak lain sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 secara rinci sebagai berikut.

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Tabel Tanah yang Dipinjampakaikan

No.	Jenis/Lokasi Aset	Luas Tanah/ Bangunan	Penggunaan
1.	Tanah di Desa Prembun Kecamatan Prembun	70 m ²	Pos Lintas Prembun
2.	Tanah di Desa Petanahan Kecamatan Petanahan	938 m ²	Asrama, Polsek Petanahan
3.	Tanah di Desa Sitiadi Kecamatan Puring	258 m ²	Polsek Puring
4.	Tanah di Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen	160 m ²	Pos Lintas Kebumen
5.	Tanah di Kelurahan Wonokriyo Kecamatan Gombong	79 m ²	Pos Lintas Gombong
6.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	120 m ²	Kemenag
7.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	50 m ²	BNP

Sedangkan aset tanah Pemerintah Kabupaten Kebumen yang disewakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 antara lain sebagaimana **lampiran 17**.

Pemerintah Kabupaten Kebumen senantiasa berupaya untuk melaksanakan tertib administrasi tanah dengan senantiasa berupaya melakukan pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah. Dari 2.282 bidang tanah, sebanyak 1.209 bidang sudah memiliki bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat yang disimpan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen. Setiap tahunnya dialokasikan anggaran untuk pensertifikatan tanah. Adapun penambahan sertifikat tanah tahun 2019 sebanyak 122 sertifikat ada pada tabel sebagai berikut.

Tabel Penambahan Sertifikat Tanah Tahun 2019

No	Desa/Kelurahan/Kecamatan	Jumlah Sertifikat	Keterangan
1	Kelurahan Panjer	2	Tanah Pertanian
2	Kelurahan Panjer	2	Polres Kebumen, Puskesmas Kebumen I
3	Kelurahan Selang	2	Tanah Pertanian
4	Kelurahan Tamanwinangun	15	Tanah Pertanian
5	Kelurahan Kebumen	3	Tanah Pertanian
6	Kelurahan Bumirejo	27	Tanah Pertanian
7	Kecamatan Klirong	8	Kawasan Perikanan
8	Kelurahan Plarangan	60	Tanah Pertanian
9	Kecamatan Karanggayam	1	Puskesmas Karanggayam II
10	Kelurahan Wonokriyo	1	Tanah Pertanian
11	Kecamatan Buluspesantren	1	SMPN 2 Buluspesantren
	Jumlah	122	

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

31 Desember 2019	31 Desember 2018
Rp765.195.323.365,00	Rp659.408.299.708,00

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada masing-masing OPD adalah sebagaimana **Lampiran 18**.

Bertambah dan berkurangnya Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel Bertambah dan Berkurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin

31 Desember 2018 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	Mutasi Bersih	31-Des-19
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
659.408.299.708,00	133.121.545.999,00	27.334.522.342,00	133.114.305.998,00	765.195.323.365,00

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Penambahan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin dijelaskan sebagai berikut.

Tabel Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja Modal	99.985.234.817,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	98.434.270,00
Mutasi antar OPD	22.004.552.806,00
Perolehan dari Hibah	6.874.313.201,00
Aset yang Belum/Baru Tercatat	3.354.123.338,00
Koreksi Pencatatan	40.961.203,00
Penambahan dari Reklas	763.926.364,00
Jumlah	133.121.545.999,00

Penambahan dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2019 sebesar Rp.99.985.234.817,00 terdiri dari Belanja Modal non Dana BOS sebesar Rp.81.924.243.072,00 dan Belanja Modal Dana BOS sebesar Rp.18.060.991.745,00. Penambahan dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2019 per OPD dijelaskan sebagaimana tabel **Lampiran 19**.

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa dijelaskan sebagai berikut.

Tabel Penambahan Aset Peralatan dan Mesin dari Belanja Barang dan Jasa

No	OPD	Jumlah Barang	Nilai (Rp)
1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	4	14.000.000,00
2	SMP Negeri 3 Gombong	1	400.000,00
3	Puskesmas Klirong I	274	14.506.270,00
4	Puskesmas Ambal II	16	11.968.000,00
5	Kecamatan Karangsembung	9	46.560.000,00
6	Kecamatan Kutowinangun	1	5.600.000,00
7	Kecamatan Petanahan	4	5.400.000,00
	Jumlah	309	98.434.270,00

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena mutasi antar OPD dijelaskan sebagaimana tabel **Lampiran 20**.

Rincian penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas Perolehan dari Hibah dijelaskan sebagaimana **Lampiran 21**.

Rincian penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang baru tercatat/ditemukan yang sebelumnya belum dicatat dalam Neraca adalah berikut.

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Tabel Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang Baru Tercatat/Ditemukan

No	Nama OPD	Nilai (Rp)
1	Bagian Pengadaan Barang Jasa	4.083.200,00
2	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	15.345.000,00
3	Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan KB	595.756.700,00
4	BPKAD	4.000.000,00
5	PPKD	267.150.000,00
6	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	167.790.000,00
7	Dinas Kesehatan	290.976.688,00
8	Puskesmas Ambal II	9.191.000,00
9	Puskesmas Adimulyo	2.334.226,00
10	Puskesmas Sempor I	78.278.000,00
11	UP3	1.680.568.200,00
12	Dinas Pendidikan	86.906.789,00
17	SMP Negeri 7 Kebumen	3.024.000,00
18	SMP Negeri 1 Mirit	17.014.189,00
19	SMP Negeri 2 Pejagoan	20.333.333,00
20	SMP Negeri 2 Karanganyar	12.233.333,00
21	SMP Negeri 1 Karanggayam	39.417.188,00
22	SMP Negeri 2 Sempor	5.667.522,00
23	SMP Negeri 1 Buayan	11.803.333,00
24	Kecamatan Pejagoan	9.388.637,00
25	Kecamatan Ayah	19.100.000,00
26	Kecamatan Bonorowo	13.762.000,00
	Jumlah	3.354.123.338,00

Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin yang berasal dari Koreksi Pencatatan terdapat pada OPD sebagai berikut.

Tabel Koreksi Tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No	OPD	Nilai (Rp)
1	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	9.075.000,00
2	Dinas Pendidikan	1.886.202,00
3	SMP Negeri 2 Adimulyo	13.000.000,00
4	Kecamatan Kuwarasan	17.000.000,00
	Jumlah	40.961.202,00

Mutasi tambah Aset Peralatan dan Mesin yang berasal dari Reklas terdapat pada OPD sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Tabel Reklas Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No	OPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	201.040.000,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.700.000,00
3	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	24.000.000,00
4	Dinas Pertanian dan Pangan	450.000,00
5	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata	140.553.000,00
6	Puskesmas Ambal II	6.500.000,00
7	RSUD Prembun	5.005.000,00
8	Dinas Pendidikan	246.026.364,00
9	SMPN 2 Kebumen	33.156.000,00
10	SMPN 3 Kutowinangun	27.200.000,00
11	SMPN 1 Buluspesantren	5.000.000,00
12	SMPN 2 Pejagoan	9.490.000,00
13	SMPN 1 Klirong	7.275.000,00
14	SMPN Petanahan	5.040.000,00
15	SMPN 1 Sruweng	310.000,00
16	SMPN 2 Sruweng	7.000.000,00
17	SMPN 1 Karanganyar	1.626.000,00
18	SMPN 1 Adimulyo	7.500.000,00
19	SMPN 2 Rowokele	11.721.000,00
20	SMPN 1 Ayah	20.031.000,00
21	Kecamatan Buayan	2.303.000,00
	Jumlah	763.926.364,00

Pengurangan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2019 dijelaskan sebagai berikut.

Tabel Pengurangan Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Uraian	Jumlah (Rp)
Direklas ke Aset Lain (Diusulkan Hapus karena Kondisi Rusak Berat)	3.096.598.125,00
Mutasi antar OPD	22.004.552.806,00
Dihibahkan	99.900.000,00
Koreksi Pencatatan	883.678.647,00
Pengurangan karena Reklas	1.249.792.764,00
Jumlah	27.334.522.342,00

Mutasi kurang Aset Peralatan dan Mesin yang di reklas ke Aset Lainnya (karena kondisi rusak berat) terdapat pada OPD sebagaimana **Lampiran 22**.

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena mutasi antar OPD sama dengan penambahan karena mutasi antar OPD sebesar Rp22.004.552.806,00 secara rinci dijelaskan pada tabel penambahan karena mutasi antar OPD (lampiran 20).

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari hibah senilai Rp.99.900.000,00 berupa kendaraan roda 4 dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang diserahkan kepada Majelis Ulama Indonesia sebagaimana SK Hibah Nomor 028/199 Tahun 2019.

Mutasi Kurang Aset Peralatan dan Mesin yang disebabkan karena koreksi pencatatan terdapat pada OPD sebagai berikut

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Tabel Pengurangan Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Koreksi Pencatatan

No	OPD	Nilai (Rp)
1	Bagian Umum	7.570.090,00
2	Bagian Humas	97.076.500,00
3	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	32.326.000,00
4	Dinas Pertanian dan Pangan	2.700.000,00
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	95.000.000,00
6	DPMPSTSP	24.500.000,00
7	BPKAD	2,00
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	88.000.000,00
9	Puskesmas Puring	225.000,00
10	Puskesmas Klirong I	1.172.000,00
11	Puskesmas Mirit	2.750.000,00
12	Puskesmas Bonorowo	850.000,00
13	Puskesmas Prembun	5.140.000,00
14	Puskesmas Kutowinangun	253.500,00
15	Puskesmas Poncowarno	80.000,00
16	Puskesmas Kebumen I	1.055.000,00
17	Puskesmas Adimulyo	141.000,00
18	Puskesmas Sempor	5.410.000,00
19	Puskesmas Karangsembung	1,00
20	UP3	118.025.120,00
21	RSUD Prembun	7.500.000,00
22	Dinas Pendidikan	296.864.344,00
23	Sanggar Kegiatan Belajar	528.010,00
24	SMPN 1 Karangsembung	4.127.500,00
25	SMPN 3 Satu Atap Karangsembung	10.951.730,00
26	SMPN 2 Buluspesantren	9.000.000,00
27	SMPN 1 Karanggayam	7.062.000,00
28	SMPN 1 Adimulyo	4.938.750,00
29	SMPN 1 Kuwarasan	1.200.000,00
30	SMPN 3 Gombang	5.893.100,00
31	SMPN 1 Sempor	4.650.000,00
32	SMPN 1 Ayah	320.000,00
33	SMPN 1 Buayan	4.049.000,00
34	Kelurahan Panjer	3.520.000,00
35	Kecamatan Mirit	17.000.000,00
36	Kecamatan Klirong	17.000.000,00
37	Kecamatan Karanganyar	6.800.000,00
	JUMLAH	883.678.647,00

Rincian pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena dilakukan reklasifikasi adalah sebagaimana **Lampiran 23**.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

31 Desember 2019 31 Desember 2018

Rp1.490.101.861.928,00 Rp1.420.934.740.781,00

Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada masing-masing OPD adalah sebagaimana **Lampiran 24**.

Bertambah dan berkurangnya Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama tahun 2019 adalah sebagai berikut.

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Tabel Bertambah dan Berkurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan

31 Desember 2018 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	Mutasi Bersih	31-Des-19
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.420.934.740.781,00	105.493.557.756,00	36.326.436.609,00	69.167.121.147,00	1.490.101.861.928,00

Penambahan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan terdiri dari berikut.

Tabel Penambahan Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Modal	73.764.387.734,00
2.	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	355.651.879,00
3.	Mutasi antar OPD	26.009.944.923,00
4.	Perolehan dari Hibah	2.714.032.820,00
5.	Aset yang belum/baru tercatat	674.610.400,00
6.	Koreksi pencatatan	1.561.933.000,00
7.	Penambahan dari Reklas	412.997.000,00
	Jumlah	105.493.557.756,00

Penambahan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2019 disajikan sebagai berikut

Tabel Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2019

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	11.542.969.100,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.685.900.100,00
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan	5.008.597.000,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.700.000,00
5	Dinas Perhubungan	3.951.763.215,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan KUKM	2.223.571.500,00
7	Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga	120.572.000,00
8	Dispermades	1.115.110.534,00
9	Dinas Pertanian dan Pangan	2.179.599.784,00
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	16.361.074.858,00
11	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	9.053.245.240,00
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	152.210.000,00
13	Dinas Kesehatan	9.879.597.762,00
14	Puskesmas Ayah I	7.931.000,00
15	Puskesmas Petanahan	199.518.000,00
16	Puskesmas Klirong I	44.500.000,00
17	Puskesmas Ambal II	72.190.000,00
18	Puskesmas Kebumen I	165.587.000,00
19	Puskesmas Kebumen II	20.000.000,00
20	Puskesmas Pejagoan	56.976.000,00
21	Puskesmas Karanggayam I	175.200.000,00
22	RSUD Dr Sudirman	619.876.506,00
23	RSUD Prembun	2.310.113.000,00
24	Sanggar Kegiatan Belajar	1.333.649.700,00
25	Kelurahan Panjer	161.837.435,00
26	Kecamatan Klirong	25.000.000,00
27	Kecamatan Sadang	206.446.000,00
28	Kecamatan Padureso	88.652.000,00
	JUMLAH	73.764.387.734,00

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Penambahan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa Gedung dan Bangunan tahun 2019 disajikan sebagai berikut.

**Tabel Penambahan Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan
karena Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa**

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	BAP3DA	192.486.000,00
2.	Puskesmas Adimulyo	45.997.079,00
3.	Puskesmas Kuwarasan	17.001.000,00
4.	Puskesmas Sempor 1	50.000.000,00
5.	Kecamatan Bonorowo	50.167.800,00
	Jumlah	355.651.879,00

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari mutasi antar OPD, disajikan sebagai berikut.

Tabel Penambahan Aset tetap Gedung dan Bangunan karena Mutasi antar OPD

No.	OPD Asal	OPD Penerima	Nilai (Rp)	Keterangan
1	DPUPR	Diskominfo	3.906.950.750,00	
		Kecamatan Puring	331.511.750,00	
		Kecamatan Ayah	249.983.000,00	
2	Dinas PerkimLH	Bagian Umum	324.502.000,00	
3	PPKD	Dishub	972.115.397,00	
		Disperkim LH	324.502.000,00	
4	Diskominfo	PPKD	972.115.397,00	
5	Dinas Kesehatan	Puskesmas Ayah II	212.412.000,00	
		Puskesmas Klirong I	106.538.000,00	
		Puskesmas Ambal I	2.832.407.500,00	
		Puskesmas Alian	420.304.800,00	
		Puskesmas Kebumen II	214.325.500,00	
		Puskesmas Kuwarasan	2.981.763.500,00	
		Puskesmas Gombang I	2.379.644.000,00	
		UP3	49.662.670,00	
6	Puskesmas Gombang II	Kelurahan Wonokriyo	99.401.000,00	
7	Dinas Pendidikan	Korwil Dinas Pendidikan/SD	8.179.234.659,00	Regrouping
		SMPN 1 Karangsembung	58.327.000,00	
		SMPN 2 Karangsembung	82.511.000,00	
		SMPN 2 Pejagoan	145.495.000,00	
		SMPN 2 Karanganyar	290.990.000,00	
		SMPN 1 Karanggayam	290.990.000,00	
		SMPN 2 Sempor	290.990.000,00	
		SMPN 1 Ayah	58.089.000,00	
		SMPN 2 Ayah	31.532.000,00	
		SMPN 1 Buayan	203.647.000,00	
	JUMLAH		26.009.944.923,00	

Rincian penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari hibah yang diterima OPD sebagai berikut.

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Tabel Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Hibah

No.	OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil	760.903.000,00	Gedung Pertokoan/Koperasi
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.175.000,00	Gedung Pertokoan/Koperasi
3	Dinas Pendidikan	84.476.000,00	Gedung tempat Pendidikan (SD Negeri Minen Kutowinangun)
		60.000.000,00	Gedung tempat Pendidikan (SD Negeri Jogosimo I Klirong)
		123.325.000,00	Gedung tempat Pendidikan (SD Negeri Tambakmulyo 2 Puring)
		165.000.000,00	Gedung tempat Pendidikan (SD Negeri 2 Kaleng)
		123.325.000,00	Gedung tempat Pendidikan (SD Negeri Banyumudal 1 Buayan)
4	SMP Negeri 1 Karanggayam	513.000.000,00	Gedung tempat pendidikan
5	SMP Negeri 2 Adimulyo	843.828.820,00	Gedung tempat pendidikan
6	SMP Negeri 4 Gombong	30.000.000,00	Gedung tempat pendidikan
	Jumlah	2.714.032.820,00	

Rincian penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena baru tercatat atau ditemukan yang sebelumnya tidak tercatat dalam Neraca adalah sebagai berikut.

Tabel Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Karena Baru Tercatat/Ditemukan

No.	OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Puskesmas Gombong II	149.456.000,00	Gedung PKD Semanding
2.	SMP Negeri 1 Pejagoan	58.413.000,00	Toilet siswa
3.	SMP Negeri 1 Karanggayam	136.965.000,00	Gedung tempat pendidikan
4.	SMP Negeri 1 Sempor	292.936.000,00	Gedung tempat pendidikan
5.	Kelurahan Karanganyar	36.840.400,00	Pagar pengaman Rumah Dinas
	Jumlah	674.610.400,00	

Mutasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena koreksi pencatatan adalah sebagai berikut.

Tabel Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Karena Koreksi Pencatatan

No.	OPD	Jml Brg	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Dinas Perhubungan	16	1.466.735.000,00	
2.	SMP Negeri 4 Kebumen		40.768.000,00	
3.	Kecamatan Sruweng		54.430.000,00	
	Jumlah	16	1.561.933.000	

Mutasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena penambahan dari reklas adalah sebagai berikut.

Tabel Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Karena Penambahan dari Reklas

No.	OPD	Jml Brg	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	198.541.000,00	Reklas dari DED
2.	Dinas Kesehatan	0	148.482.000,00	Reklas dari DED
3.	Puskesmas Pejagoan	1	39.964.000,00	Reklas dari Belanja Peralatan mesin
4.	Dinas Pendidikan	1	1.010.000,00	
5.	Kelurahan Jatiluhur	1	25.000.000,00	Reklas dari aset lainnya (rusak berat)
	Jumlah	3	412.997.000,00	

Penjelasan atas Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut.

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Tabel Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Direklas ke Aset Lain-lain (diusulkan hapus karena kondisi Rusak Berat)	1.966.064.667,00
2.	Mutasi antar OPD	26.009.944.923,00
3.	Koreksi pencatatan	5.041.952.000,00
4.	Pengurangan karena Reklas	3.308.475.019,00
	Jumlah	36.326.436.609,00

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena kondisi rusak berat dan diusulkan untuk dilakukan penghapusan, (reklasifikasi ke aset lain-lain) adalah sebagai berikut.

Tabel Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Karena Diusulkan Hapus

No.	OPD	Jml Brg	Nilai (Rp)
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4	460.910.067,00
2	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2	156.687.600,00
3	Puskesmas Ayah II	4	292.362.000,00
4	Puskesmas Puring	1	53.025.000,00
5	Puskesmas Ambal I	3	425.555.000,00
6	Dinas Pendidikan	4	323.260.000,00
7	SMP Negeri 1 Prembun	1	76.000.000,00
8	SMP Negeri 2 Karanggayam	1	122.715.000,00
9	Kelurahan Tamanwinangun	1	55.550.000,00
	Jumlah	21	1.966.064.667,00

Rincian pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp26.009.944.923,00 karena mutasi antar OPD tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel Penambahan Karena Mutasi Aset Tetap Gedung Dan Bangunan Antara OPD di atas.

Pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena koreksi pencatatan secara rinci dijelaskan sebagai berikut.

Tabel Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena Koreksi Pencatatan

No.	OPD	Jumlah	Nilai (Rp)	Keterangan
1	DPU PR	1	3.429.152.000,00	Dobel catat dengan Kecamatan
2	Dinas Perhubungan	3	1.466.735.000,00	Koreksi pencatatan
4	Dinas Pendidikan		87.097.000,00	Koreksi pencatatan
5	SMP Negeri 4 Kebumen	1	40.768.000,00	Penggabungan
	SMP Negeri 2 Adimulyo		18.200.000,00	Penggabungan
	Jumlah	5	5.041.952.000,00	

Pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena reklasifikasi dijelaskan sebagai berikut.

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Tabel Pengurangan Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi

No	Nama OPD	Nama Barang	Jml	Nilai (Rp)	Reklas Ke
1	BPBD	Gedung Kantor	3	2.700.000,00	KIB B
2	Dinas Perhubungan	Rambu tidak bersuar	582	1.078.750.676,00	reklas gedung
3	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi	Gedung Kantor		24.000.000,00	reklas KIB B
4	Dinas Pertanian dan Pangan	Bangunan Kandang		450.000,00	reklas KIB B
5	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	Bangunan tempat kerja	8	1.483.527.708,00	reklas KIB D
			3	13.436.635,00	reklas gedung
			3	140.553.000,00	reklas KIB B
			4	253.133.000,00	reklas DED
6	Puskesmas Ayah I		1	7.931.000,00	reklas gedung
7	Puskesmas Ambal II		1	6.500.000,00	reklas KIB B
8	Puskesmas Pejagoan		1	6.988.000,00	reklas gedung
9	Dinas Pendidikan		10	207.994.000,00	reklas KIB B
	SMP Negeri 2 Karangsembung		1	82.511.000,00	reklas KIB D
		Jumlah	617	3.308.475.019	

5.3.1.3.4 Jalan Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2019	31 Desember 2018
Rp2.430.068.733.183,25	Rp2.300.264.078.380,25

Rincian Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan pada masing-masing OPD adalah sebagaimana **Lampiran 25**.

Bertambah dan berkurangnya Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan selama tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel Bertambah dan Berkurang Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2018 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	Mutasi Bersih	31-Des-19
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2.300.264.078.380,25	151.842.474.846,00	22.037.820.043,00	129.804.654.803,00	2.430.068.733.183,25

Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan berasal dari berikut.

Tabel Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2019

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Modal	143.814.601.168,00
2.	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	169.327.000,00
3.	Mutasi antar OPD	39.640.000,00
4.	Koreksi pencatatan	5.422.935.770,00
5.	Penambahan dari Reklas	2.395.970.908,00
	Jumlah	151.842.474.846,00

Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan tahun 2019 disajikan sebagai berikut.

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Tabel Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2019

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	122.459.862.017,00
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	10.693.745.700,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.671.917.000,00
4	Dinas Perhubungan	3.652.981.904,00
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	33.500.000,00
6	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	29.490.359,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	13.820.000,00
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.882.629.860,00
9	Puskesmas Klirong II	16.998.100,00
10	Puskesmas Karanggayam II	7.379.020,00
11	RSU Dr. Sudirman	3.029.948.208,00
12	Kecamatan Karanggayam	322.329.000,00
	JUMLAH	143.814.601.168,00

Penambahan nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan yang berasal dari kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa senilai Rp.169.327.000,00 ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa DED atas Jalan Irigasi dan Jaringan yang dibangun tahun 2019. Tabel penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dari Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa disajikan pada tabel berikut.

Tabel Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dari Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa

OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
DPU-PR	35.512.000,00	JALAN K.1 RUAS 60 Kemujan-Karangsari
	34.929.000,00	JALAN K.1 RUAS 2 (Karangsambung-Sadangwetan/JJLU)
	49.452.000,00	Jembatan Bumiagung Ruas 84 (Bumiagung-Demangsari)
	49.434.000,00	Jembatan Pejengkolan Ruas 15 (Pejengkolan-Balingasal)
JUMLAH	169.327.000,00	

Penambahan nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan karena Mutasi antar OPD tahun 2019 dijelaskan sebagai berikut.

Tabel Penambahan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan karena Mutasi antar OPD Tahun 2019

No	OPD Asal	OPD Penerima	Harga Perolehan	Keterangan
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	PPKD	19.820.000	Instalasi Listrik
2	PPKD	Dinas Perhubungan	19.820.000	Instalasi Listrik
	Jumlah		39.640.000	

Penambahan nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan karena koreksi pencatatan senilai Rp.5.422.935.770,00 ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang secara rinci disajikan pada tabel berikut.

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Tabel Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Karena Koreksi Taun 2019

No	OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	DPU-PR	26.468.260,00	JALAN K.1 RUAS 3
		103.612.515,00	JALAN K.1 RUAS 9
		37.075.896,00	JALAN K.1 RUAS 27
		37.075.896,00	JALAN K.1 RUAS 50
		53.940.155,00	JALAN K.1 RUAS 59
		37.075.896,00	JALAN K.1 RUAS 64
		120.520.602,00	JALAN K.1 RUAS 69
		270.898.600,00	JALAN K.1 RUAS 89
		66.505.084,00	JALAN K.1 RUAS 407
		49.753.330,00	JALAN K.1 RUAS 421
		44.739.952,00	JALAN K.1 RUAS 107
		103.731.473,00	JALAN K.1 RUAS 109
		75.464.643,00	JALAN K.1 RUAS 157
		370.618.140,00	JALAN K.1 RUAS 158
		80.833.852,00	JALAN K.1 RUAS 163
		198.840.000,00	JALAN K.1 RUAS 166
		103.694.173,00	JALAN K.1 RUAS 125
		195.403.000,00	JALAN K.1 RUAS 140
		105.124.703,00	JALAN K.1 RUAS 209
		1.184.760.000,00	JALAN K.1 RUAS 199
		91.250.000,00	JALAN K.1 RUAS 604
		736.416.305,00	JALAN K.1 RUAS 169
		511.651.500	SPAM Desa Rowokele
		12.452.000	SPAM Desa Donosari Sruweng
		386.460.750	SPAM Kaliputih
		418.569.045	Bangunan Sarpras Air Bersih Perdesaan Ds. Kaligending Kec.
Jumlah		5.422.935.770,00	

Penambahan nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi terdapat pada OPD sebagai berikut.

Tabel Penambahan Jalan Irigasi dan Jaringan karena Reklas

No	OPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	829.932.200,00
2	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	1.483.527.708,00
3	SMP Negeri 2 Karangsembung	82.511.000,00
	Jumlah	2.395.970.908,00

Pengurangan nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan disebabkan sebagai berikut.

Tabel Pengurangan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan

1.	Mutasi antar OPD	39.640.000,00
3.	Koreksi pencatatan	21.695.394.043,00
4.	Pengurangan karena Reklas	302.786.000,00
	Jumlah	22.037.820.043,00

Pengurangan nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan karena mutasi antar OPD sebesar Rp.39.640.000,00 secara rinci dapat dilihat pada tabel penambahan nilai karena mutasi OPD di atas.

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Mutasi Kurang Aset Jalan Irigasi dan Jaringan karena koreksi senilai Rp. 7.211.169.540,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel Pengurangan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan Karena Koreksi

No	OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	DPUPR	736.416.305,00	jalan surobayan-kradenan (ruas 169)
2	DPUPR	199.100.000,00	Koreksi double catat Ruas 80 (Rogodono-Pringtutul)
3	DPUPR	194.375.000,00	Koreksi double catat Ruas 606 Patukgaw emulyo-Patukrejomulyo
4	DPUPR	149.300.000,00	Koreksi double catat Ruas 135 (Podourip-Sugihwaras)
5	DPUPR	99.427.000,00	Koreksi double catat Ruas 63 Gombong-Kuwarasan
6	DPUPR	270.898.600,00	Koreksi gabung Jl Kedungpuji-Patemon
7	DPUPR	198.840.000,00	Koreksi gabung (Adimulyo - Duduhan 166)
8	DPUPR	195.403.000,00	Koreksi gabung Jl. Jatinegara-Tunjungseto
9	DPUPR	120.520.602,00	Koreksi gabung jalan K1 Ruas 69 (Buayan - Jladri)
10	DPUPR	105.124.703,00	Koreksi gabung jalan K1 Ruas 209
11	DPUPR	103.731.473,00	Koreksi gabung jalan K1 Ruas 109
12	DPUPR	103.694.173,00	Koreksi gabung jalan K1 Ruas 125 (Sirnobojo - Tlogopragoto)
13	DPUPR	103.612.515,00	Koreksi gabung jalan K1 Ruas 9
14	DPUPR	75.464.643,00	Koreksi gabung jalan K1 Ruas 157Jalan Bocor-Waluyo
15	DPUPR	53.940.155,00	Koreksi gabung jalan K1 Ruas 59 (Meles - Banjarej)
16	DPUPR	49.329.040,00	Koreksi gabung jalan K1 Ruas 163 (Grenggeng-Pohkumbang)
18	DPUPR	44.739.952,00	Koreksi gabung ruas 107 (Kembaran-Kedungbener)
20	DPUPR	37.075.896,00	Koreksi gabung jalan K1 ruas 27
21	DPUPR	37.075.896,00	Koreksi gabung jalan K1 ruas 50 (Purwodeso-Petanahan)
22	DPUPR	37.075.896,00	Koreksi gabung jalan K1 ruas 64 (Kuwarasan-Puring)
23	DPUPR	31.504.812,00	Koreksi gabung jalan K1 Ruas 163 (Grenggeng-Pohkumbang)
24	DPUPR	26.468.260,00	Koreksi gabung Jalan Cincin Kota
25	DPUPR	1.184.760.000,00	Koreksi gabung jalan K.1 Ruas 199(mangunweni-kertodeso)
26	DPUPR	370.618.140,00	Koreksi gabung jalan K1 Ruas 158 (rubah nama menjadi
27	DPUPR	66.505.084,00	Koreksi gabung jalan ruas 407 (Jalan Gelatik)
28	DPUPR	91.250.000,00	Koreksi gabung Jl. Menuju Kawasan Industri
29	DPUPR	2.261.353.675,00	Koreksi double catat jalan K1 Ruas 23
30	DPUPR	12.222.870.828,00	Koreksi double catat ruas Buayan Jladri dengan Buayan
31	DPUPR	511.651.500,00	Koreksi gabung SPAM Rowokele
32	DPUPR	418.569.045,00	Koreksi gabung Sarpras Air Bersih Perdesaan Ds. Kaligending
33	DPUPR	386.460.750,00	Koreksi gabung Eks SPAM Kaliputih
34	DPUPR	126.036.000,00	Koreksi double catat SPAM Desa Gunungsari
35	DPUPR	114.137.600,00	Koreksi double catat SPAM Desa Seling Karangsembung
36	DPUPR	29.804.000,00	Koreksi double catat SPAM Desa Jladri Buayan
37	DPUPR	29.777.000,00	Koreksi double catat SPAM Desa Donosari Sruweng
38	DPUPR	24.827.000,00	Koreksi double catat SPAM Desa Rowokele
39	DPUPR	883.655.500,00	Koreksi double catat Embung Desa Srti
JUMLAH		21.695.394.043,00	

Pengurangan karena reklasifikasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp. 302.786.000,00 sebagaimana rincian pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Tabel Pengurangan Karena Reklasifikasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan

No	OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	DPUPR	33.000.000,00	reklas ke peralatan dan mesin
2	DPUPR	32.450.000,00	reklas ke peralatan dan mesin
3	DPUPR	25.000.000,00	reklas ke peralatan dan mesin
4	DPUPR	24.000.000,00	reklas ke peralatan dan mesin
5	DPUPR	4.950.000,00	reklas ke peralatan dan mesin
6	DPUPR	4.500.000,00	reklas ke peralatan dan mesin
7	DPUPR	30.000.000,00	reklas ke peralatan dan mesin
8	DPUPR	21.200.000,00	reklas ke peralatan dan mesin
9	DPUPR	17.500.000,00	reklas ke peralatan dan mesin
10	DPUPR	6.940.000,00	reklas ke peralatan dan mesin
11	DPUPR	1.500.000,00	reklas ke peralatan dan mesin
12	DPUPR	45.322.000,00	reklas ke DED
13	DPUPR	28.670.000,00	reklas ke DED
14	DPUPR	27.754.000,00	reklas DED
	Jumlah	302.786.000,00	

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2019	31 Desember 2018
Rp133.561.451.585,00	Rp120.843.823.216,00

Rincian Aset Tetap Lainnya pada masing-masing OPD sebagaimana **Lampiran 26**. Bertambah dan berkurangnya Aset Tetap Lainnya selama tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel Bertambah dan Berkurang Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2018 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	Mutasi Bersih	31-Des-19
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
120.843.823.216,00	15.336.916.557,00	2.619.288.188,00	12.717.628.369,00	133.561.451.585,00

Penambahan Aset Tetap Lainnya selama tahun 2019 terdiri dari berikut ini.

Tabel Penambahan Aset Tetap Lainnya Tahun 2019

Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja Modal	14.089.486.071,00
Mutasi antar OPD	879.061.751,00
Perolehan dari Hibah	227.930.835,00
Aset yang belum/baru tercatat	27.540.000,00
Penambahan dari Reklas	112.897.900,00
Jumlah	15.336.916.557,00

Penambahan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.14.089.486.071,00 terdiri dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Non Dana BOS sebesar Rp.2.338.736.958,00 dan Belanja Modal Dana BOS sebesar Rp.11.750.749.113,00, yang secara rinci terdapat pada OPD berikut.

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Tabel Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal Tahun 2019

No	Nama OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Bagian Hukum	26.445.670,00	non BOS
2	Dinas Kearsipan Dan	190.964.000,00	non BOS
3	Dinas Pendidikan	1.795.711.637,00	non BOS
4	Dinas Perhubungan	10.890.000,00	non BOS
5	Dinas Pertanian dan Pangan	19.675.000,00	non BOS
6	Dinas Perumahan Dan	159.595.000,00	non BOS
7	RSUD Prembun	6.285.000,00	non BOS
8	Sanggar Kegiatan Belajar	112.765.651,00	non BOS
9	SMPN 2 Karangany ar	16.405.000,00	non BOS
10	Dinas Pendidikan	7.654.689.710,00	BOS
11	SMPN 1 Ay ah	82.474.200,00	BOS
12	SMPN 2 Ay ah	18.761.900,00	BOS
13	SMPN 1 Buay an	69.215.900,00	BOS
14	SMPN 2 Buay an	28.070.000,00	BOS
15	SMPN 1 Puring	66.599.000,00	BOS
16	SMPN 2 Puring	58.007.700,00	BOS
17	SMPN 1 Petanahan	89.403.900,00	BOS
18	SMPN 1 Klirong	44.613.000,00	BOS
19	SMPN 1 Buluspesantren	11.360.000,00	BOS
20	SMPN 2 Buluspesantren	43.897.700,00	BOS
21	SMPN 1 Ambal	144.740.000,00	BOS
22	SMPN 2 Ambal	68.744.860,00	BOS
23	SMPN 1 Mirit	92.688.600,00	BOS
24	SMPN 2 Mirit	45.899.700,00	BOS
25	SMPN 1 Prembun	64.000.000,00	BOS
26	SMPN 2 Prembun	78.089.700,00	BOS
27	SMPN 1 Kutow inangun	51.480.000,00	BOS
28	SMPN 2 Kutow inangun	133.461.200,00	BOS
29	SMPN 3 Kutow inangun	91.825.700,00	BOS
30	SMPN 1 Alian	49.933.000,00	BOS
31	SMPN 1 Poncow arno	42.691.700,00	BOS
32	SMPN 1 Kebumen	98.922.760,00	BOS
33	SMPN 2 Kebumen	100.774.400,00	BOS
34	SMPN 3 Kebumen	75.969.000,00	BOS
35	SMPN 4 Kebumen	72.704.400,00	BOS
36	SMPN 5 Kebumen	51.974.800,00	BOS
37	SMPN 6 Kebumen	75.026.575,00	BOS
38	SMPN 7 Kebumen	128.398.600,00	BOS
39	SMPN 1 Pejagoan	150.611.000,00	BOS
40	SMPN 2 Pejagoan	107.395.000,00	BOS
41	SMPN 1 Sruw eng	152.619.200,00	BOS
42	SMPN 2 Sruw eng	85.218.700,00	BOS
43	SMPN 1 Adimuly o	61.458.700,00	BOS
44	SMPN 2 Adimuly o	85.959.000,00	BOS
45	SMPN 1 Kuw arasan	50.954.000,00	BOS
46	SMPN 1 Row okele	86.993.300,00	BOS
47	SMPN 1 Sempor	158.469.000,00	BOS
48	SMPN 2 Sempor	46.177.875,00	BOS
49	SMPN 1 Gombong	59.939.500,00	BOS
50	SMPN 2 Gombong	83.724.200,00	BOS
51	SMPN 3 Gombong	71.722.400,00	BOS
52	SMPN 4 Gombong	51.385.300,00	BOS
53	SMPN 1 Karangany ar	92.809.000,00	BOS
54	SMPN 2 Karangany ar	89.375.000,00	BOS
55	SMPN 3 Karangany ar	100.000.000,00	BOS
56	SMPN 1 Karanggay am	75.893.000,00	BOS
57	SMPN 2 Karanggay am	112.910.300,00	BOS
58	SMPN 1 Karangsambung	50.819.750,00	BOS
59	SMPN 2 Karangsambung	33.996.200,00	BOS
60	SMPN 1 Padureso	12.009.600,00	BOS
61	SMPN 2 Row okele	52.171.500,00	BOS
62	SMPN 1 Sadang	55.000.000,00	BOS
63	SMPN 3 Satu Atap Ay ah	14.946.800,00	BOS
64	SMPN 2 Satu Atap Alian	9.477.100,00	BOS
65	SMPN 2 Satu Atap	4.986.200,00	BOS
66	SMPN 3 Satu Atap Sempor	16.861.240,00	BOS
67	SMPN 3 Satu Atap	23.228.343,00	BOS
68	SMPN 4 Satu Atap	36.522.300,00	BOS
69	SMPN 1 Bonorow o	82.697.600,00	BOS
	Jumlah	14.089.486.071,00	

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Penambahan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari mutasi antar OPD berupa buku pelajaran dari Dinas Pendidikan ke SMP dan karena *regrouping* sekolah dasar. Secara rinci penambahan aset tetap lainnya karena mutasi yang terletak pada sekolah sebagai berikut.

Tabel Penambahan Aset Tetap Lainnya Karena Mutasi antar OPD Tahun 2019

No	OPD	JB	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Korwil Dinas Pendidikan Kec Kebumen	4.722	168.969.291,00	SDN 7 Kutosari ke SD N 4 Kutosari
2	Korwil Dinas Pendidikan Kec Mirit	4.479	122.267.541,00	SD N wirogaten 1 ke SD N Wirogaten 2
3	Korwil Dinas Pendidikan Kec Kutowinangun	1.193	48.134.247,00	SDN 2 Kutowinangun ke SD 3 Kutowinangun
4	Korwil Dinas Pendidikan Kec Buluspesantren	4.819	154.562.409,00	SDN 2 Ayamputh ke SDN 1 Ayamputh
5	Korwil Dinas Pendidikan Kec Klirong	6.587	140.116.511,00	SDN Jerukagung 3 ke SDN Jerukagung 1, SDN Karanglonggong ke SD Tambakagung 2
6	Korwil Dinas Pendidikan Kec Adimulyo	4.017	95.622.776,00	SD N 2 Adikarto ke SD 1 Adikarto, SD N 2 Sidomukti ke SD N 1 Sidomukti
7	Korwil Dinas Pendidikan Kec Sempor	3.993	110.085.729,00	SD N 1 Bonosari ke SD 2 Bonosari
8	Korwil Dinas Pendidikan Kec Rowokele	1.272	20.337.247,00	SD N 1 Redisari ke SD N 2 Redisari
9	Dinas Pendidikan	300	9.483.000,00	Penerima SMPN 2 Mirit
10	Dinas Pendidikan	300	9.483.000,00	Penerima SMPN 1 Rowokele
	Jumlah	31.682	879.061.751,00	

Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya yang berasal dari perolehan hibah terletak pada OPD sebagai berikut.

Tabel Penambahan Aset Tetap Lainnya Karena Hibah Tahun 2019

No	OPD	Nilai	Keterangan
1	Dinas Kepemudaan dan Olaharaga dan Pariwisata	147.400.000,00	Hibah dari Kemenpora
2	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	51.140.835,00	Hibah dari Pemprov
3	Dinas Pendidikan (Korwil Kebumen)	21.040.000,00	Hibah dari Komite
4	SMP Negeri 2 Prembun	7.100.000,00	Hibah dari Komite
5	SMP Negeri 1 Klirong	1.250.000,00	Hibah dari Komite
	Jumlah	227.930.835,00	

Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya yang berasal dari aset yang belum/baru tercatat terletak pada SMP Negeri 1 Pejagoan berupa buku senilai Rp. 27.540.000,00.

Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya yang berasal dari reklasifikasi tahun 2019 terletak pada OPD sebagai berikut.

Tabel Penambahan Aset Tetap Lainnya Karena Reklasifikasi Tahun 2019

No	OPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan	44.203.000,00
2	SMP N 6 Kebumen	9.219.900,00
3	SMP N 1 Poncowarno	18.480.000,00
4	SMPN 2 Ambal	3.050.000,00
5	SMPN 1 Karanganyar	6.600.000,00
6	SMPN 3 Karanganyar	18.235.000,00
7	SMPN 1 Adimulyo	4.330.000,00
8	SMPN 4 Gombong	3.465.000,00
9	SMPN 1 Sadang	2.315.000,00
10	Kelurahan Jatiluhur	3.000.000,00
	JUMLAH	112.897.900,00

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Pengurangan Aset Tetap Lainnya selama tahun 2019 disebabkan oleh berikut ini.

Tabel Pengurangan Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Direklas ke Aset Lain-lain (diusulkan dihapus karena kondisi Rusak Berat)	519.954.843,00
2.	Mutasi antar OPD	879.061.751,00
3.	Koreksi pencatatan	836.618.810,00
4.	Pengurangan karena Reklas	383.652.784,00
	Jumlah	2.619.288.188,00

Mutasi kurang Aset Tetap Lainnya yang berasal dari reklasifikasi ke Aset Lainnya karena kondisi rusak berat terletak pada OPD sebagai berikut.

Tabel Pengurangan Aset Tetap Lainnya Karena Reklas ke Aset Lainnya Tahun 2019

No	OPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan	53.313.970,00
2	SMPN 4 Kebumen	33.746.420,00
3	SMPN 1 Karangsembung	50.730.212,00
4	SMPN 2 Karangsembung	4.725.000,00
5	SMPN 4 Satu Atap Karangsembung	2.725.405,00
6	SMPN 2 Prembun	17.460.750,00
7	SMPN 1 Mirit	87.824.450,00
8	SMPN 1 Ambal	18.398.279,00
9	SMPN 1 Klirong	825.000,00
10	SMPN 1 Sruweng	84.668.944,00
11	SMPN 3 Gombang	162.770.583,00
12	SMPN 2 Ayah	2.765.830,00
	Jumlah	519.954.843,00

Pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp879.061.751,00 karena mutasi antar OPD tahun 2019 secara rinci dapat dilihat pada tabel penambahan aset tetap lainnya karena mutasi antar OPD tahun 2019 di atas.

Rincian pengurangan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari koreksi terletak pada OPD sebagai berikut.

Tabel Pengurangan Aset Tetap Lainnya Karena Koreksi

No	OPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan	660.922.010,00
2	SMPN 2 Kebumen	102.000,00
3	SMPN 1 Alian	22.525.000,00
4	SMPN 1 Karangsembung	1.175.000,00
5	SMPN 2 Karangsembung	24.421.200,00
6	SMPN 1 Klirong	6.210.000,00
7	SMPN 1 Petanahan	54.151.800,00
8	SMPN 1 Sruweng	1.048.000,00
9	SMPN 2 Sruweng	13.800.000,00
10	SMPN 1 Karanggayam	(5.320.000,00)
11	SMPN 1 Sempor	55.413.000,00
12	SMPN 1 Sadang	2.170.800,00
	JUMLAH	836.618.810,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Rincian pengurangan Aset Tetap Lainnya karena reklasifikasi dijelaskan sebagai berikut.

Tabel Pengurangan Aset Tetap Lainnya Karena Reklasifikasi

No	OPD	Nilai (Rp)
1	RSUD Prembun	5.005.000,00
2	Dinas Pendidikan	232.332.784,00
3	SMP Negeri 2 Kebumen	33.406.000,00
4	SMP Negeri 3 Kutowinangun	32.200.000,00
5	SMP Negeri 1 Buluspesantren	5.000.000,00
6	SMP Negeri 2 Pejagoan	9.490.000,00
7	SMP Negeri 1 Klirong	10.591.000,00
8	SMP Negeri 1 Petanahan	5.040.000,00
9	SMP Negeri 1 Sruweng	2.710.000,00
10	SMP Negeri 2 Sruweng	7.000.000,00
11	SMP Negeri 1 Karanganyar	1.626.000,00
12	SMP Negeri 1 Adimulyo	7.500.000,00
13	SMP Negeri 2 Rowokele	11.721.000,00
14	SMP Negeri 1 Ayah	20.031.000,00
	JUMLAH	383.652.784,00

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

31 Desember 2019

Rp0,00

31 Desember 2018

Rp556.338.000,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 disajikan sebesar Rp0,00.

Pada Tahun Anggaran 2018 terdapat paket Pekerjaan Pembangunan Embung Giritirto pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dikerjakan oleh CV Mitra Sehati Kontraktor, dengan kontrak No.050/585/SPPP/VII/2018 – 011/MSK/SP/VII/2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.839.140.000,00. Namun pada saat berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan yang ditandatangani PPHP, progres fisik baru mencapai 29,8% sehingga PPHP menyatakan hasil pekerjaan tidak diterima. Dan telah dikeluarkan Surat Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan Embung Giritirto, Nomor 050/1448/XII/2018 tanggal 15 Desember 2018.

Atas pekerjaan yang tidak selesai tersebut, pada LKPD TA 2018 disajikan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan nilai tersaji sebesar Uang Muka yang telah direalisasikan dan biaya atribusi yang telah dibayarkan, dengan data KDP tersaji sebagai berikut.

Tabel Rincian Data Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Paket Pekerjaan	Rekanan	No & Tgl. Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Realisasi Pembayaran (Rp)	Nilai KDP (+atribusi) (Rp)	Progres fisik
1.	Pek Pembangunan Embung Giritirto	CV Mitra Sehati Kontraktor	050/585/SPPP/VII/2018, 011/MSK/SP/VII/2018 Tgl.30 Juli 2018	1.839.140.000,00	551.742.000,00	556.338.000,00	29,8%

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Berdasarkan keputusan kontrak tersebut, pada tanggal 27 Desember 2018 atas jaminan pelaksanaan telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp114.948.000,00. Sedangkan uang muka disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 15 Pebruari 2019 sebesar Rp551.742.000,00

Berdasarkan kronologis tersebut, saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan dilakukan koreksi kurang dan dieliminasi dari Neraca sebesar nilai tersaji pada Tahun Anggaran sebelumnya yaitu sebesar Rp556.338.000,00 sehingga saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp1.667.817.400.927,14)	(Rp1.397.328.749.056,53)

Nilai akumulasi penyusutan per masing-masing jenis akun disajikan sebagai berikut.

Tabel Nilai Akumulasi Penyusutan per Jenis Akun

No.	Uraian	Per 31 Desember 2019		
		Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1.	Tanah	777.250.679.277,45	-	777.250.679.277,45
2.	Peralatan dan Mesin	765.195.323.365,00	(510.293.913.270,00)	254.901.410.095,00
3.	Gedung dan Bangunan	1.490.101.861.928,00	(294.295.920.861,00)	1.195.805.941.067,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.430.068.733.183,25	(863.227.566.796,14)	1.566.841.166.387,11
5.	Aset Tetap Lainnya	133.561.451.585,00	-	133.561.451.585,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	556.338.000,00		556.338.000,00
	Jumlah	5.596.734.387.338,70	(1.667.817.400.927,14)	3.928.916.986.411,56

Kenaikan/penurunan Akumulasi Penyusutan selama Tahun Anggaran 2019 disajikan sebagai berikut:

Tabel Kenaikan/Penurunan Akumulasi Penyusutan

No.	Uraian	Akumulasi Penyusutan		Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
		31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)		
1.	Peralatan dan Mesin	(510.293.913.269,00)	(415.139.922.308,00)	(95.153.990.961,00)	18,65
2.	Gedung dan Bangunan	(294.295.920.862,00)	(264.644.979.386,00)	(29.650.941.476,00)	10,08
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(863.227.566.792,28)	(717.543.847.362,53)	(145.683.719.429,75)	16,88
	Jumlah	(1.667.817.400.923,28)	(1.397.328.749.056,53)	(270.488.651.866,75)	45,60

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per OPD disajikan sebagaimana lampiran 27.

5.3.1.4 Aset Lainnya

31 Desember 2019	31 Desember 2018
Rp116.762.634.581,00	Rp280.644.532.092,80

Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Kebumen disajikan secara neto setelah diperhitungkan akumulasi amortisasi, sebagai berikut.

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Tabel Aset Lainnya

Uraian	31-Des-19	31-Des-18	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	(Rp)	(Rp)		
Tagihan jangka Panjang	-	-	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	16.134.562.688,00	16.134.562.688,00	0,00	-
Aset Tidak berwujud	8.741.274.141,00	6.886.664.535,80	1.854.609.605,20	21,22
Aset Lain-lain	91.886.797.752,00	257.623.304.869,00	(165.736.507.117)	(180,37)
Jumlah	116.762.634.581,00	280.644.532.092,80	(163.881.897.512)	(140,35)

5.3.1.4.1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

31 Desember 2019
Rp16.134.562.688,00

31 Desember 2018
Rp16.134.562.688,00

Kemitraan dengan Pihak Ketiga berupa aset Bangun Guna Serah atau *Built Operate Transfer (BOT)*. Aktiva lain-lain Built Operate Transfer adalah penyertaan Pemerintah Kabupaten dalam kemitraannya dengan pihak ketiga. Adapun nilai penyertaan sampai dengan tahun 2019 dan perinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Uraian	31 Desember 2019 (Rp)
Tanah Pemkab HPL No.2, seluas 34.877m ² , di Pasar Gombang Wonokriyo	15.379.170.688,00
Tanah Pemkab HPL No.3, seluas 1.628m ² , di Pasar Gombang Wonokriyo	755.392.000,00
Jumlah	16.134.562.688,00

Nilai *Built Operate Transfer* di atas merupakan *Built Operate Transfer* pada pembangunan pasar Wonokriyo Gombang. Sesuai Surat Perjanjian Nomor 511.2.1336 dan 081.KBBP-SI/X/1995 tanggal 10 Oktober 1995 yang dikuatkan dengan Keputusan Kementrian Dalam Negeri nomor 644.133-166 tanggal 5 Maret 1996 antara Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan PT Karsa Bayu Bangun Prakasa dalam pembangunan pasar Wonokriyo Gombang, Pemerintah Kabupaten Kebumen menyertakan modal berupa tanah Milik Pemerintah Kabupaten Kebumen seluas 39.805m² (tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima meter persegi) senilai Rp4.962.112.500,00. Atas perjanjian kerjasama tersebut tidak diperoleh data nilai pembangunan Pasar Wonokriyo Gombang. Kemitraan ini disepakati sesuai dengan masa perjanjian adalah 30 (tiga puluh) tahun.

Pada tahun 2011 dilakukan koreksi penilaian atas tanah yang diserahkan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak tahun penyusunan neraca awal yaitu sebesar Rp17.552.192.000,00. Hal ini dilakukan karena tanah diserahkan sebelum neraca awal. Tahun 2014 dilakukan koreksi tambah atas aset tanah yang mitrakan sebesar Rp755.392.000,00 sehingga total nilai kemitraan dengan pihak ketiga menjadi sebesar Rp18.307.584.000,00.

Pada tahun 2018, aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dikoreksi kurang seluas 4.928m² atau senilai Rp2.173.021.312,00 direklas ke Aset Tetap Tanah, dengan adanya pelepasan hak pengelolaan yang dilakukan oleh PT Karsa Bayu Bangun Perkasa atas tanah untuk Pasar Wonokriyo Blok J, K, dan L akibat kebakaran yang terjadi pada tahun 2017.

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

5.3.1.4.2 Aset Tidak Berwujud

31 Desember 2019
 Rp8.741.274.141,00

31 Desember 2018
 Rp6.886.664.535,80

Aset Tidak Berwujud secara rinci disajikan sebagai berikut

Tabel Aset Tidak Berwujud

Uraian	31-Des-19	31-Des-18	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	(Rp)	(Rp)		
DED	10.101.732.018,00	7.608.083.868,00	2.493.648.150,00	24,69
Software	3.001.397.430,00	2.545.088.030,00	456.309.400,00	15,20
Jumlah Nilai Perolehan	13.103.129.448,00	10.153.171.898,00	2.949.957.550,00	22,51
Amortisasi	(4.361.855.307,00)	(3.266.507.362,20)	(1.095.347.944,80)	25,11
Jumlah Nilai Buku	8.741.274.141,00	6.886.664.535,80	1.854.609.605,20	21,22

Rincian aset tidak berwujud per OPD disajikan sebagai berikut.

Tabel Rincian Aset Tidak Berwujud per OPD Per 31 Desember 2019

No	OPD	DED (Rp)	Software (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	45.900.000,00		45.900.000,00
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	44.550.000,00		44.550.000,00
	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	694.384.000,00	121.110.000,00	815.494.000,00
3	Dinas Kesehatan	45.843.400,00		45.843.400,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.306.119.758,00		8.306.119.758,00
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan	41.804.000,00		41.804.000,00
6	Dinas Perhubungan	109.993.800,00	181.945.900,00	291.939.700,00
7	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	427.431.000,00		427.431.000,00
8	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan	73.623.000,00		73.623.000,00
9	Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan	33.127.500,00		33.127.500,00
10	Rumah Sakit Umum Daerah Prembun	183.635.000,00	33.000.000,00	216.635.000,00
11	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	48.070.000,00		48.070.000,00
12	Rumah Sakit Umum dr.Soedirman	47.250.560,00	772.174.000,00	819.424.560,00
13	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah		416.096.000,00	416.096.000,00
14	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		62.215.000,00	62.215.000,00
15	Badan Perencanaan, Penelitian dan		105.862.000,00	105.862.000,00
16	Bagian Hukum		80.473.300,00	80.473.300,00
17	Bagian Organisasi		54.340.000,00	54.340.000,00
18	Bagian Pembangunan		165.210.000,00	165.210.000,00
19	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		40.257.800,00	40.257.800,00
20	Dinas Komunikasi dan Informatika		350.317.150,00	350.317.150,00
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		229.338.180,00	229.338.180,00
22	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil		94.055.000,00	94.055.000,00
25	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan		35.000.000,00	35.000.000,00
26	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		194.258.100,00	194.258.100,00
27	Puskesmas Karanggayam II		4.000.000,00	4.000.000,00
28	Unit Pengobatan Penyakit Paru		3.500.000,00	3.500.000,00
29	Kecamatan Kutowinangun		5.000.000,00	5.000.000,00
30	Dinas Pendidikan (Korwil Kebumen/SD.N Sumberadi)		9.000.000,00	9.000.000,00
31	SMP Negeri 1 Ayah		3.696.000,00	3.696.000,00
32	SMP Negeri 1 Gombong		275.000,00	275.000,00
33	SMP Negeri 2 Gombong		24.454.000,00	24.454.000,00
34	SMP Negeri 1 Klirong		5.600.000,00	5.600.000,00
35	SMP Negeri 1 Petanahan		6.500.000,00	6.500.000,00
36	SMP Negeri 2 Buayan		1.520.000,00	1.520.000,00
37	SMP Negeri 1 Prembun		2.200.000,00	2.200.000,00
	JUMLAH	10.101.732.018,00	3.001.397.430,00	13.103.129.448,00

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Amortisasi Aset Tidak Berwujud per OPD disajikan sebagai berikut.

Tabel Amortisasi Aset Tak Berwujud per OPD per 31 Desember 2019

No	OPD	Nilai Perolehan (Rp)	Amortisasi (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	45.900.000,00	(27.540.000,00)	18.360.000,00
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	44.550.000,00	(13.365.000,00)	31.185.000,00
3	Disporawisata	815.494.000,00	(305.076.500,00)	510.417.500,00
4	Dinas Kesehatan	45.843.400,00	(9.764.420,00)	36.078.980,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan PR	8.306.119.758,00	(2.369.967.768,00)	5.936.151.990,00
6	Dispermades P3A	41.804.000,00	(20.902.000,00)	20.902.000,00
7	Dinas Perhubungan	291.939.700,00	(75.384.840,00)	216.554.860,00
8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	427.431.000,00	(227.066.600,00)	200.364.400,00
9	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	73.623.000,00	(22.086.900,00)	51.536.100,00
10	Dinsos PPKB	33.127.500,00	(13.251.000,00)	19.876.500,00
11	Rumah Sakit Umum Daerah Prembun	216.635.000,00	(73.244.500,00)	143.390.500,00
12	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	48.070.000,00	(24.035.000,00)	24.035.000,00
13	Rumah Sakit Umum dr.Soediman	819.424.560,00	(403.904.912,00)	415.519.648,00
14	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	416.096.000,00	(292.005.300,00)	124.090.700,00
15	BPKAD	62.215.000,00	(16.914.500,00)	45.300.500,00
16	BAP3DA	105.862.000,00	(37.829.400,00)	68.032.600,00
17	Bagian Hukum	80.473.300,00	(32.189.320,00)	48.283.980,00
18	Bagian Organisasi	54.340.000,00	(21.736.000,00)	32.604.000,00
19	Bagian Pembangunan	165.210.000,00	(66.165.600,00)	99.044.400,00
20	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	40.257.800,00	(8.051.560,00)	32.206.240,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	350.317.150,00	(130.134.505,00)	220.182.645,00
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	229.338.180,00	(87.940.872,00)	141.397.308,00
23	Disnaker KUKM	94.055.000,00	(22.820.000,00)	71.235.000,00
24	BKPPD	35.000.000,00	(17.500.000,00)	17.500.000,00
25	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	194.258.100,00	(28.067.110,00)	166.190.990,00
26	Puskesmas Karanggyam II	4.000.000,00	(400.000,00)	3.600.000,00
27	Unit Pengobatan Penyakit Paru	3.500.000,00	(700.000,00)	2.800.000,00
28	Kecamatan Kutowinangun	5.000.000,00	(1.000.000,00)	4.000.000,00
29	Dinas Pendidikan (Korwil Kebumen/SD.N Sumberadi)	9.000.000,00	(2.700.000,00)	6.300.000,00
30	SMP Negeri 1 Ayah	3.696.000,00	(1.108.800,00)	2.587.200,00
31	SMP Negeri 1 Gombong	275.000,00	(137.500,00)	137.500,00
32	SMP Negeri 2 Gombong	24.454.000,00	(2.445.400,00)	22.008.600,00
33	SMP Negeri 1 Klirong	5.600.000,00	(560.000,00)	5.040.000,00
34	SMP Negeri 1 Petanahan	6.500.000,00	(3.900.000,00)	2.600.000,00
35	SMP Negeri 2 Buayan	1.520.000,00	(1.520.000,00)	0,00
36	SMP Negeri 1 Prembun	2.200.000,00	(440.000,00)	1.760.000,00
		13.103.129.448,00	(4.361.855.307,00)	8.741.274.141,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

5.3.1.4.3 Aset Lain-lain

31 Desember 2019
Rp91.886.797.752,00

31 Desember 2018
Rp257.623.304.869,00

Aset Lain-lain disajikan sebagai berikut:

Tabel Rincian Aset lain-Lain

Uraian	31-Des-19	31-Des-18	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	(Rp)	(Rp)		
Nilai Perolehan	108.566.460.559,00	337.754.957.276,00	(229.188.496.717,00)	(211,10)
Akumulasi Penyusutan	-16.679.662.807,00	-80.131.652.407,00	(96.811.315.214,00)	580,42
Nilai Buku	91.886.797.752,00	257.623.304.869,00	(132.377.181.503,00)	(144,07)

Aset Lain-lain per OPD disajikan dengan nilai akumulasi penyusutannya dengan rincian sebagaimana **lampiran 28**.

Aset lain-lain terdiri dari Aset lainnya berupa tanah jalan (JJLS) dan jalan desa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang belum diserahkan ke desa senilai Rp.84.629.745.229,00 dan Barang Rusak Berat yang telah dihentikan penggunaannya oleh OPD namun belum dihapuskan dari daftar Barang Inventaris senilai Rp.23.936.715.330,00.

Bertambah dan berkurangnya Aset Lain-lain selama tahun 2019 sebagai berikut.

Tabel Bertambah dan Berkurang Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2018 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	Mutasi Bersih	31-Des-19
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
337.754.957.276,00	5.699.876.147,00	234.888.372.864,00	(229.188.496.717,00)	108.566.460.559,00

Penambahan Aset Lain-lain selama tahun 2019 terdiri dari mutasi dari OPD lain berupa Barang Rusak Berat senilai Rp.117.258.512,00 pada Dinas Pendidikan karena regrouping Sekolah Dasar dan penambahan barang rusak berat senilai Rp.5.582.617.635,00 berada pada OPD sebagaimana **Lampiran 28.b**.

Pengurangan Aset Lain-lain terdiri dari:

Uraian	Jumlah (Rp)
Penghapusan (terbit SK)	13.835.366.611,00
Mutasi antar OPD	117.258.512,00
Koreksi	44.454.243,00
Reklas	31.302.000,00
Penyerahan P3D	220.859.991.498,00
Jumlah	234.888.372.864,00

Pengurangan Aset Lain-lain sebesar Rp13.835.366.611,00 merupakan aset rusak berat yang sudah terbit SK Penghapusan, dan pengurangan karena mutasi antar OPD senilai Rp.117.258.512,00 sebagaimana penambahan karena mutasi OPD karena regrouping Sekolah Dasar.

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Pengurangan karena koreksi ada pada Dinas Pendidikan (Korwil Alian) senilai Rp.44.454.243,00.

Pengurangan karena reklas senilai Rp.31.302.000,00 berupa reklas barang Rusak Berat yang diperbaiki dan digunakan kembali untuk operasional ada pada Dinas Pendidikan (Korwil Ayah) senilai Rp.999.000,00, Kelurahan Jatiluhur senilai Rp.28.000.000,00 dan Kecamatan Buayan senilai Rp.2.303.000,00.

Sedangkan pengurangan Aset lain-lain karena Aset P3D yang telah diserahkan sebagaimana Berita Acara Serah Terima Nomor 137/2485.1 Tahun 2016 tentang Penyerahan P3D dan Berita Acara Serah Terima Nomor 020/1267 tahun 2019 tentang Tambahan Penyerahan P3D Pengadaan Tahun 2016.

5.3.2 Kewajiban

31 Desember 2019
 Rp28.013.032.839,83

31 Desember 2018
 Rp19.470.388.884,17

Kewajiban merupakan kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat dari transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dibagi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang, secara rinci disajikan sebagai berikut.

Tabel Rincian Kewajiban

Uraian	31-Des-19	31-Des-18	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	(Rp)	(Rp)		
Kewajiban Jangka Pendek	28.013.032.839,83	19.470.388.884,17	8.542.643.955,66	43,88
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	-	
Jumlah	28.013.032.839,83	19.470.388.884,17	8.542.643.955,66	43,88

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

31 Desember 2019
 Rp28.013.032.839,83

31 Desember 2018
 Rp19.470.388.884,17

Kewajiban Jangka Pendek secara rinci disajikan sebagai berikut.

Tabel Rincian Kewajiban Jangka Pendek

Uraian	31-Des-19	31-Des-18	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	(Rp)	(Rp)		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	130.874.639,00	398.768.690,00	(267.894.051,00)	(67,18)
Pendapatan diterima Dimuka	981.745.192,83	857.079.886,17	124.665.306,66	14,55
Utang Beban	13.590.043.826,00	5.812.201.714,00	7.777.842.112,00	133,82
Utang Jangka Pendek Lainnya	13.310.369.182,00	12.402.338.594,00	908.030.588,00	7,32
Jumlah	28.013.032.839,83	19.470.388.884,17	8.542.643.955,66	43,88

Utang Jangka Pendek dibandingkan tahun sebelumnya terdapat kenaikan sebesar 43,88%, antara lain disebabkan atas Tambahan Penghasilan PNS untuk Bulan Desember 2019 sesuai ketentuan Perbup No.2 Tahun 2019 dibayarkan di bulan Januari 2020 sehingga menambah utang beban pegawai di TA 2019.

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga

31 Desember 2019

Rp130.874.639,00

31 Desember 2018

Rp398.768.690,00

Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per OPD per 31 Desember 2019 disajikan sebagai berikut.

Tabel Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga

No.	SKPD	Uraian PFK	Jumlah Utang PFK (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) Rp	%
			2019	2018		
1	Kecamatan Rowokele		0,00	1,00	(1,00)	(100,00)
2	RSU Dr. Soedirman		0,00	16.665.000,00	(16.665.000,00)	(100,00)
3	Puskesmas Adimulyo		0,00	156.551,00	(156.551,00)	(100,00)
4	Puskesmas Ayah I		0,00	4.554.204,00	(4.554.204,00)	(100,00)
5	Puskesmas Ayah II		0,00	1.166.636,00	(1.166.636,00)	(100,00)
6	Puskesmas Bonorowo		0,00	180.428,00	(180.428,00)	(100,00)
7	Puskesmas Buluspesantren II		0,00	735.500,00	(735.500,00)	(100,00)
8	Puskesmas Gombang I		0,00	2.375.808,00	(2.375.808,00)	(100,00)
9	Puskesmas Karanganyar		0,00	633.000,00	(633.000,00)	(100,00)
10	Puskesmas Kebumen III		0,00	606.174,00	(606.174,00)	(100,00)
11	Puskesmas Klirong I		0,00	915.500,00	(915.500,00)	(100,00)
12	Puskesmas Kutowinangun	Dana Prolanis, ditarik 31 Januari 2020	855.682,00	92.600,00	763.082,00	824,06
13	Puskesmas Kuwarasan		0,00	181.636,00	(181.636,00)	(100,00)
14	Puskesmas Padureso		0,00	667.729,00	(667.729,00)	(100,00)
15	Puskesmas Petanahan	Pajak telat setor, baru disetor tgl 9 Januari 2020	50.000,00	1.959.000,00	(1.909.000,00)	(97,45)
16	Puskesmas Poncowarno		0,00	2.401.169,00	(2.401.169,00)	(100,00)
17	Puskesmas Puring		0,00	19.975,00	(19.975,00)	(100,00)
18	Puskesmas Rowokele		0,00	1.412.455,00	(1.412.455,00)	(100,00)
19	Puskesmas Sempor II		0,00	6.247.373,00	(6.247.373,00)	(100,00)
20	Puskesmas Sruweng		0,00	803.000,00	(803.000,00)	(100,00)
21	Dinas Pendidikan	Pajak telat setor, baru disetor tgl 9 Januari 2020	129.968.957,00	356.994.951,00	(227.025.994,00)	(63,59)
	Jumlah		130.874.639,00	398.768.690,00	(267.894.051,00)	(67,18)

5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

31 Desember 2019

Rp981.745.192,83

31 Desember 2018

Rp857.079.886,17

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah diterima oleh Pemerintah Daerah namun belum sepenuhnya merupakan hak Pemerintah Daerah, karena menyangkut pendapatan atas periode berikutnya, yang posisi per 31 Desember 2019 diterima OPD sebagai berikut.

A



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019**

Tabel Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per OPD

No.	OPD	Nilai (Rp)
1.	RSUD Dr Soedirman	153.496.500,00
2..	Bag Umum Setda	37.368.000,00
3..	Kec Kebumen	56.627.952,00
4.	Kec Karangany ar	93.450.300,00
5.	Kec Gombang	45.919.208,00
6.	BPKAD	360.132.660,83
7.	Bapenda	234.750.572,00
	Jumlah	981.745.192,83

Pendapatan diterima dimuka pada RSUD dr Soedirman berasal dari pendapatan kerjasama dengan pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Pendapatan Diterima Dimuka pada RSUD Dr.Soedirman

No.	Nama Pihak Ketiga	No.Perjanjian	Jangka Waktu	Masa manfaat (bln)	Sisa masa manfaat (bln)	Nilai Perjanjian	Disetor tgl	Perhitungan Pendapatan Diterima Dimuka
1.	PT MAC SARANA JAYA	026/MSD/ADD-RSUDDS/XII/2015	1 Apr'15 - 1 Apr'25	120	63	275.000.000,00	1 Peb'16	144.375.000,00
2.	BNI Cab Kebumen	Sewa/001/KBM/2/R	1 Apr'15 - 31 Mar '20	60	3	13.680.000,00	28 Des'15	684.000,00
3.	UNRIYO	445/00016.30/PKS/II/2019	2 jan'19 - 1 Jan'22	36	24	3.000.000,00	27 Mar'19	2.000.000,00
4.	Universitas Jend A.Yani Yogyakarta	445/02537/PKS/VIII/2019	1 Agust'19 - 1 agust'22	36	31	6.000.000,00	21 Sept'19	5.166.666,67
5.	SMK MA'ARIF NU Ajibarang		31 Des'18 31 Des'20	24	12	500.000,00	4 Jan'19	250.000,00
6.	AKADEMI ANALIS KESEHATA	445/00465/PKS/II/2019	13 Peb'19 - 12 Peb'22	36	25	750.000,00	22 Maret'19	520.833,33
7.	UNSOED	445/3059.4/PKS/XIV/2018	17 des'18 - 17 Des'21	36	24	750.000,00	17 Jan'19	500.000,00
							JUMLAH	153.496.500,00

Pendapatan diterima dimuka pada bagian Umum Setda Kebumen berasal dari sewa tempat untuk Kantin, Koperasi dan ATM Bank Jateng di kompleks Setda Kebumen, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Pendapatan Diterima Dimuka pada Bag.Umum Setda Kebumen

No.	Nama Pihak Ketiga	No.Perjanjian	Jangka Waktu	Masa	Sisa masa	Nilai Perjanjian	Disetor tgl	Perhitungan
1.	Koperasi SAGU	030/2424.3	16 Sept'19 - 15 Sept'20	12	9	4.428.000,00	28 Nov'19	3.321.000,00
2.	Koperasi SAGU	030/2424.5	16 Sept'19 - 15 Sept'20	12	9	5.940.000,00	29 Nov'19	4.455.000,00
3.	Dharma Wanita Kab Kebumen	030/2424.4	16 Sept'19 - 15 Sept'20	12	9	5.184.000,00	13 Des'19	3.888.000,00
4.	Dharma Wanita Kab Kebumen	030/1470	16 Sept'19 - 15 Sept'20	12	9	3.780.000,00	21 Nov'19	2.835.000,00
5.	Bank Jateng	030/2424.7	1 Juli'18 - 31 Juni'23	60	42	32.670.000,00	5 Nov'18	22.869.000,00
							JUMLAH	37.368.000,00

Pendapatan diterima dimuka pada Kecamatan Kebumen, Karanganyar dan Gombang berasal dari pendapatan sewa tanah eks bengkok kelurahan, dengan rincian sebagai berikut

Tabel Rincian Pendapatan Diterima Dimuka pada Kecamatan

No	OPD	Tgl SK Perjanjian	Jangka waktu	Pendapatan Sewa	Masa Manfaat	Sisa Masa Manfaat	Pendapatan Diterima Dimuka
1.	Kecamatan Karangany ar	25 April 2019	1 tahun	373.801.200,00	12	3	93.450.300,00
2.	Kecamatan Gombang	21 Maret 2019	2 tahun	275.515.250,00	12	2	45.919.208,33
3.	Kecamatan Kebumen	3 Mei 2019	3 tahun	169.883.857,00	12	4	56.627.952,33
						Jumlah	195.997.460,67

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Pendapatan diterima dimuka pada BPKAD Kab Kebumen berasal dari pemakaian kekayaan daerah dalam bentuk sewa, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Pendapatan Diterima Dimuka pada BPKAD Kebumen

No.	Nama Pihak Ketiga	No.Perjanjian	Jangka Waktu	Masa Manfaat (bl)	Sisa Masa manfaat (bl)	Nilai Sewa	Jml Pendapatan Diterima Di Muka
1	4	2	7	8	9	5	10= (8X5):7
1	Bank Jateng Cab.Kebumen	028/949.BIII/2015	1 April'15 - 31 Mar'20	60	3	30.240.000,00	1.512.000,00
2	PT Inti Bangun Sejahtera, Tbk	050/040/ I/2018	1 Okt 17 - 30 Sept 22	60	33	131.400.000,00	72.270.000,00
3	Nur zubaidi	031/0377, I/02/2018	19 Feb '18 - 19 Feb'21	36	14	10.800.000,00	4.200.000,00
4	BPD Jateng Cab.Kebumen	No. 500/414/2017	15 Jun '17 - 14 Jun'20	36	6	11.497.500,00	1.916.250,00
5	BPD Jateng Cab.Kebumen	No. 510.4/VI/2017	15 Jun '17 - 14 Jun '20	36	6	11.497.500,00	1.916.250,00
6	BPD Jateng Cab.Kebumen	No.	13 Jun 17 - 14 Jun 20	36	6	11.497.500,00	1.916.250,00
7	BPD Jateng Cab.Kebumen	No.0038/HT.01.02/008/2018	1 Maret 18 - 28 Feb 21	36	14	11.497.500,00	4.471.250,00
8	H.S Yudiantoro	030/1512 dan 014/HT.01.06/008/	29 Mei 19 - 30 Mei 22	36	29	12.000.000,00	9.666.666,67
9	Parmono	030/1512 dan 014/HT.01.06/008/	16 Mei 19 - 17 Mei'22	36	29	48.000.000,00	38.666.666,67
10	Margono A.Md	030/3288/TAHUN 2018 DAN	01 Jan 19 -31 Des'23	12	12	15.750.000,00	15.750.000,00
11	Murdiyati	030/3287/TAHUN 2018	01 Jan 19 - 31 des 21	36	12	9.855.000,00	3.285.000,00
12	Sutrisno, SE	030/3290 Tahun 2018	01 Jan'19 - 31 Des 23	48	36	192.172.500,00	144.129.375,00
13	Zein Mutajin, SE, MM.PFM	028/1168 Tahun 2019	01 April 19 - 31 Mar 20	12	3	1.642.500,00	410.625,00
14	Drs.H. Sholeh Said	030/032 Tahun 2019	02 Jun 19 - 01Juni'24	60	54	13.736.475,00	12.362.827,50
15	H.Nur Zubaidi	031/03771/02/2018 dan	19 Feb'18 - 18 Feb'21	36	14	10.800.000,00	4.200.000,00
16	Hendro Poerwoko	028/3547/XII/2015	01 Jan'16 - 31 Des'20	60	12	42.500.000,00	8.500.000,00
17	Moh Syukur	030/1729/ TAHUN 2019	05 Mei'19 - 4 Mei 20	12	4	912.000,00	304.000,00
18	Puji Hartono	028/2407	2019 sd 2023	60	48	35.000.000,00	28.000.000,00
19	SRI FAJARWATI	900/195.C/2019	1 Juli 2019 sd 30 Juni 2020	12	6	3.375.000,00	1.687.500,00
20	SATIYAH	900/482.3	1 Juli 2019 sd 30 Juni 2020	12	6	324.000,00	162.000,00
21	ESTHI DWI HASTUTI	900/482.3	1 Juli 2019 sd 30 Juni 2020	12	6	324.000,00	162.000,00
22	SLAMET SUSANTO	900/482.3	1 Juli 2019 sd 30 Juni 2020	12	6	324.000,00	162.000,00
23	Kantin SMPN 1 Puring	900/482.3	1 Juli 2019 sd 30 Juni 2020	12	6	324.000,00	162.000,00
24	Kantin SMPN 1 Petanahan		1 Jan'20 sd. 31 Okt'20	10	10	4.320.000,00	4.320.000,00
						Jumlah	360.132.660,83

Pendapatan diterima dimuka pada Bapenda Kab Kebumen berasal dari Pajak Reklame dengan rincian sebagaimana **lampiran 29**.

5.3.2.1.3 Utang Beban

31 Desember 2019	31 Desember 2018
Rp13.590.043.826,00	Rp5.812.201.714,00

Utang Beban merupakan kewajiban-kewajiban yang masih harus dibayar yang sampai dengan 31 Desember 2019 belum ditunaikan oleh OPD, yang disajikan sebagai berikut.

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Tabel Rincian Utang Beban

Uraian	31-Des-19	31-Des-18	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	(Rp)	(Rp)		
Utang Beban Pegawai	5.851.819.112,00	1.002.006.066,00	4.849.813.046,00	484,01
Utang Beban Barang dan Jasa	5.758.063.114,00	3.321.932.248,00	2.436.130.866,00	73,33
Utang Beban Bansos	-	-	0,00	-
Utang Beban Transfer	1.980.161.600,00	1.488.263.400,00	491.898.200,00	33,05
Jumlah	13.590.043.826,00	5.812.201.714,00	7.777.842.112,00	133,82

Utang Beban Pegawai per 31 Desember 2019 merupakan jasa pelayanan yang belum direalisasikan oleh Puskesmas dan Tambahan Penghasilan PNS Bulan Desember 2019 yang baru direalisasikan di Januari 2020.

Utang Beban Barang dan Jasa merupakan beban atas pemakaian daya dan jasa kantor dan jasa lainnya yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2019.

Utang Beban Transfer per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.980.161.600,00 merupakan Utang Beban Transfer atas penerusan Dana Desa dari APBN yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen namun sampai dengan 31 Desember 2019 belum ditransfer ke Pemerintah Desa dengan rincian sebagai berikut.

SUMBER DANA	DESA	KECAMATAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
Tahap II TA 2019	Kutowinangun	Kutowinangun	308.297.200	Sisa dana TA 2018 di RKD melebihi 30% dari DD yg diterima di TA 2018
Tahap III TA 2019	Mrinen	Kutowinangun	313.674.400	Belum memenuhi persyaratan pengajuan Tahap III yaitu realisasi penyerapan s/d Tahap II kurang dari 75%
	Ungaran	Kutowinangun	307.924.000	Belum memenuhi persyaratan pengajuan Tahap III yaitu realisasi penyerapan s/d Tahap II kurang dari 75%
	Adiwarno	Buayan	323.358.800	Belum memenuhi persyaratan pengajuan Tahap III yaitu realisasi penyerapan s/d Tahap II kurang dari 75%
	Kebakalan	Karanggayam	71.166.400	Belum memenuhi persyaratan pengajuan Tahap III yaitu realisasi penyerapan s/d Tahap II kurang dari 75%
	Kutowinangun	Kutowinangun	308.297.200	Belum memenuhi persyaratan pengajuan Tahap III yaitu realisasi penyerapan s/d Tahap II kurang dari 75%
Sisa Dana 2019			1.632.718.000	
Sisa Dana TA 2018	Kebakalan	Karanggayam	347.443.600	Belum memenuhi persyaratan pengajuan Tahap III yaitu realisasi penyerapan s/d Tahap II kurang dari 75%
Sisa Dana 2018			347.443.600	
Total Utang Beban Transfer			1.980.161.600	

Rincian Utang Beban per SKPD disajikan dalam **lampiran 30**.

5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek lainnya

31 Desember 2019	31 Desember 2018
Rp13.310.369.182,00	Rp12.402.338.594,00

Utang jangka Pendek lainnya merupakan utang jangka pendek pada RSUD Dr. Soedirman dengan rincian sebagai berikut.

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Tabel Rincian Utang Jangka Pendek RSUD Dr. Soedirman per 31 Desember 2019

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Utang BMHP ke penyedia Jasa	2.212.242.063,00
	Utang obat ke penyedia jasa	439.630.278,00
2.	Biaya yang masih harus dibayar atas jasa pelayanan	10.469.831.141,00
3.	Biaya yang masih harus dibayar atas Tenaga Harian Lepas	116.880.400,00
4.	Biaya yang masih harus dibayar atas transportasi rujukan	2.113.800,00
5.	Utang uji laboratorium, radiologi, kalibrasi dan lingkungan	69.671.500,00
	Jumlah	13.310.369.182,00

5.3.3 Ekuitas

31 Desember 2019
 Rp4.454.10.805.714,17

31 Desember 2018
 Rp4.529.217.894.028,92

Ekuitas per 31 Desember 2019 diuraikan sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai (Rp)
	Ekuitas Awal	4.529.217.894.028,92
	Surplus/defisit LO	56.814.638.732,38
	Dampak kumulatif yang menambah ekuitas:	
1	Penyesuaian atas saldo investasi permanen per 31 Desember	4.541.126.098,99
2	Reklas dari peralatan dan mesin ke aset tetap lainnya	3.716.286.422,00
3	Reklas dari aset lainnya DED ke aset tetap gedung dan bangunan	401.615.000,00
4	Koreksi dan akumulasi penyusutan aset tetap	19.724.820.304,23
5	Penyesuaian atas akumulasi penyusutan rusak berat	11.495.085.993,00
6	Penambahan karena mutasi antar SKPD	43.117.424.723,00
7	Penambahan karena hibah dari pihak lain	9.274.578.656,00
8	Penambahan aset tetap karena barang jasa menjadi aset	3.704.561.879,00
9	Penambahan aset lainnya - aset tidak berwujud	55.400.000,00
10	Penyesuaian amortisasi aset tidak berwujud	231.252.380,00
11	Penambahan baru ditemukan/baru dicatat	6.623.394.995,00
12	Penambahan aset lainnya - rusak berat	5.690.927.947,00
13	Jurnal koreksi tambah atas aset	21.626.960.992,00
14	Penyesuaian atas penyisihan piutang	11.057.109.439,00
15	Penyesuaian penghapusan aset tetap yang ada di aset lain-lain	16.062.975.365,00
16	Penyesuaian atas akumulasi penyusutan aset lainnya P3D	52.997.575.194,00
	Jumlah Koreksi Tambah	210.321.095.388,22
	Dampak kumulatif yang mengurangi ekuitas:	
1	Pengurangan aset tetap karena usul hapus	3.376.769.484,00
2	Pengurangan aset lainnya - rusak berat	15.422.014.847,00
3	Koreksi akumulasi penyusutan aset tetap	10.575.156.970,35
4	Koreksi akumulasi penyusutan rusak berat	1.669.506.190,00
5	Koreksi kurang aset tetap karena dobel cata	714.922.000,00
6	Koreksi kurang aset tetap karena mutasi antar SKPD	53.240.555.980,00
7	Pengurangan aset karena dihibahkan ke pihak lain	448.092.000,00
8	Pengurangan aset lainnya - P3D SMA SMK	220.859.991.498,00
9	Koreksi kurang karena koreksi	30.549.595.607,00
10	Reklas dari peralatan dan mesin ke aset tetap lainnya atau	4.313.220.787,00
11	Pengurangan aset tetap karena reklas ke ekstrakompatabel	316.659.072,00
12	Koreksi KDP atas pekerjaan pembangunan Embung Girierto	556.338.000,00
	Jumlah Koreksi Kurang	342.042.822.435,35
	Jumlah Koreksi Ekuitas Lainnya (Koreksi Tambah - Koreksi)	(131.721.727.047,13)
	Ekuitas Akhir	4.454.310.805.714,17

Dengan demikian bahwa kekayaan bersih yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen selama tahun 2019 berkurang sebesar Rp131.721.727.047,13 sehingga total kekayaan bersih per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.454.310.805.714,17.

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

5.4 Laporan Operasional

5.4.1 Pendapatan – LO

Tahun 2019	Tahun 2018
Rp2.414.979.239.178,82	Rp2.302.106.978.959,93

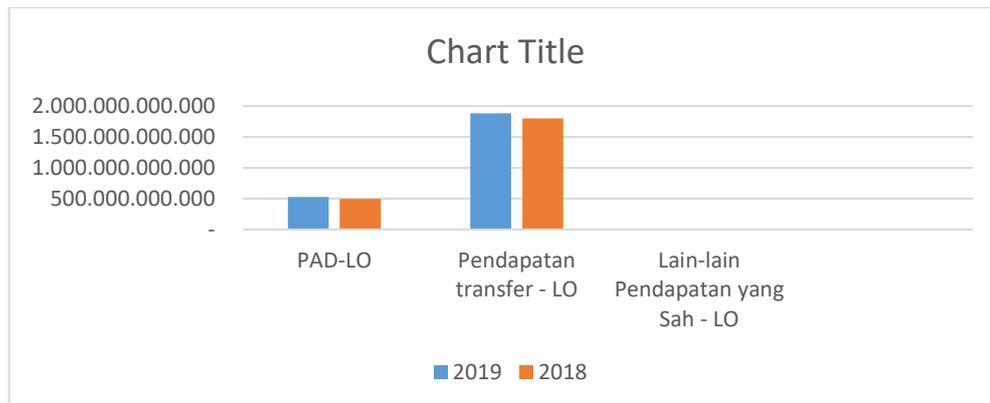
Pendapatan - LO Kabupaten Kebumen yang tersaji dalam Laporan Operasional adalah Pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Daerah Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Rincian Pendapatan – LO

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	(Rp)	(Rp)		
Pendapatan Asli Daerah –	525.341.339.804,82	495.216.565.901,93	30.124.773.902,89	6,08
Pendapatan Transfer – LO	1.882.428.936.333,00	1.801.342.909.968,00	81.086.026.365,00	4,50
Lain-Lain Pendapatan	7.208.963.041,00	5.547.503.090,00	1.661.459.951,00	29,95
Jumlah	2.414.979.239.178,82	2.302.106.978.959,93	112.872.260.218,89	4,90

Dari tabel diatas dapat diketahui pendapatan LO tahun 2019 naik sebesar Rp112.872.260.218,89 atau sebesar 4,90% dibandingkan tahun sebelumnya. Komposisi Realisasi Pendapatan – LO Kabupaten Kebumen sebagaimana tergambar pada diagram berikut.

Grafik Komposisi Pendapatan – LO Tahun 2019



5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO

Tahun 2019	Tahun 2018
Rp525.341.339.804,82	Rp495.216.565.901,93

Rincian Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2019 sebagai berikut.

Tabel Rincian Pendapatan Asli Daerah – LO

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	(Rp)	(Rp)		
Pajak Daerah – LO	103.793.194.372,00	97.976.265.302,00	5.816.929.070,00	5,94
Retribusi Daerah – LO	27.806.000.986,34	41.101.228.134,83	(13.295.227.148,49)	(32,35)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	6.297.570.767,00	15.921.082.570,00	(9.623.511.803,00)	(60,45)
Lain-lain PAD Yang Sah – LO	387.444.573.679,48	340.217.989.895,10	47.226.583.784,38	13,88
Jumlah	525.341.339.804,82	495.216.565.901,93	30.124.773.902,89	6,08

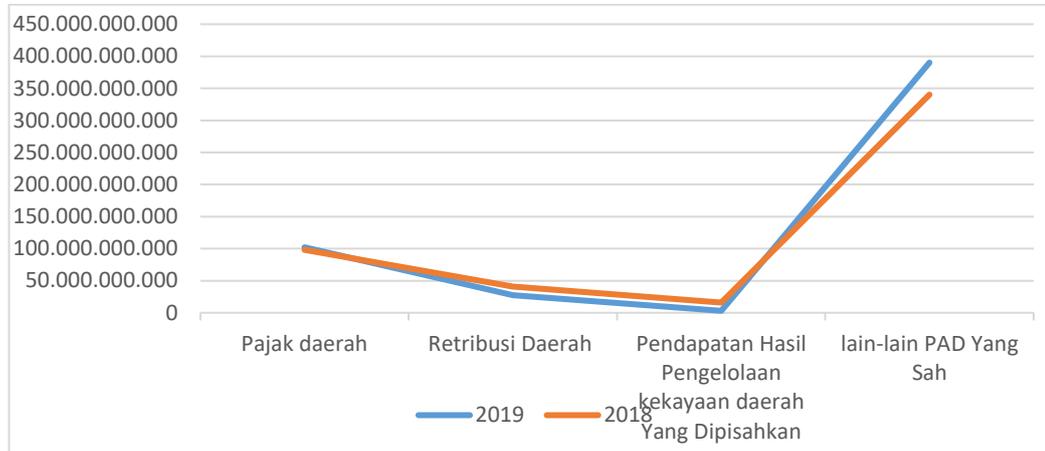
A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Perbandingan per jenis Pendapatan Asli Daerah - LO dari tahun sebelumnya tergambar pada grafik berikut.

Grafik Komposisi Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 201



5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO

Tahun 2019	Tahun 2018
Rp103.793.194.372,00	Rp97.976.265.302,00

Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2019 terdiri dari.

Tabel Pendapatan Pajak Daerah - LO

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Pajak Hotel – LO	1.879.430.319,00	1.464.457.727,00	414.972.592,00	28,34
Pajak Restoran – LO	7.873.081.522,00	5.851.009.517,00	2.022.072.005,00	34,56
Pajak Hiburan – LO	393.741.976,00	158.569.095,00	235.172.881,00	148,31
Pajak Reklame – LO	1.034.656.625,00	807.078.179,00	227.578.446,00	28,20
Pajak Penerangan Jalan – LO	32.492.302.082,00	30.319.190.840,00	2.173.111.242,00	7,17
Pajak Parkir – LO	317.271.717,00	243.732.410,00	73.539.307,00	30,17
Pajak Air Tanah – LO	380.388.950,00	230.451.398,00	149.937.552,00	65,06
Pajak Sarang Burung Walet – LO	10.050.000,00	9.350.000,00	700.000,00	7,49
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	5.218.036.259,00	5.324.860.774,00	(106.824.515,00)	(2,01)
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	41.249.455.958,00	43.457.510.894,00	(2.208.054.936,00)	(5,08)
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	12.944.778.964,00	10.110.054.468,00	2.834.724.496,00	28,04
Jumlah	103.793.194.372,00	97.976.265.302,00	5.816.929.070,00	5,94

Pendapatan Pajak – LO dikelola oleh OPD Badan Pendapatan Daerah, yang untuk tahun 2019 naik sebesar Rp5.816.929.070,00 atau sebesar 5,94% dibandingkan tahun sebelumnya.

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Tahun 2019	Tahun 2018
Rp27.806.000.986,34	Rp41.101.228.134,83

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun 2019 sebesar Rp27.806.000.986,34 terdiri dari

Tabel Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	(Rp)	(Rp)		
Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	198.745.250,00	16.228.413.717,00	(16.029.668.467,00)	(98,78)
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LO	943.905.700,00	831.355.600,00	112.550.100,00	13,54
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	1.172.679.000,00	759.535.000,00	413.144.000,00	54,39
Retribusi Pelayanan Pasar – LO	4.041.803.900,00	3.821.800.250,00	220.003.650,00	5,76
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	778.312.500,00	652.535.500,00	125.777.000,00	19,28
Retribusi Pelayanan Pendidikan – LO	60.984.000,00	60.984.000,00	0,00	0,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO	949.416.000,00	704.544.000,00	244.872.000,00	34,76
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	2.653.526.119,34	2.835.050.337,83	(181.524.218,49)	(6,40)
Retribusi Tempat Pelelangan – LO	2.127.458.032,00	1.721.874.050,00	405.583.982,00	23,55
Retribusi Terminal – LO	153.213.300,00	169.320.500,00	(16.107.200,00)	(9,51)
Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO	4.156.200.200,00	3.126.599.000,00	1.029.601.200,00	32,93
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa – LO	1.960.000,00	2.220.000,00	(260.000,00)	(11,71)
Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	27.770.000,00	34.905.000,00	(7.135.000,00)	(20,44)
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	7.698.989.900,00	8.341.922.800,00	(642.932.900,00)	(7,71)
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LO	605.412.500,00	300.522.500,00	304.890.000,00	101,45
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	2.197.519.585,00	1.462.355.880,00	735.163.705,00	50,27
Retribusi Izin Trayek – LO	38.105.000,00	47.290.000,00	(9.185.000,00)	(19,42)
Jumlah	27.806.000.986,34	41.101.228.134,83	(13.295.227.148)	(32,35)

Pendapatan Retribusi daerah – LO mengalami penurunan dibandingkan dengan pendapatan retribusi – LO tahun sebelumnya, hal ini karena RSUD Prembun sudah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, sehingga untuk pendapatan dari pelayanan kesehatan disajikan pada pendapatan Lain-lain PAD yang Sah.

Pendapatan Retribusi Daerah – LO per OPD disajikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Tabel Pendapatan Retribusi Daerah – LO per OPD

No.	OPD	Tahun 2019	Tahun 2018	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Dinas Kesehatan	198.745.250,00	180.774.500,00	17.970.750,00	9,94
2	RSUD Prembun	0,00	16.047.639.217,00	(16.047.639.217,00)	(100,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan	2.768.041.460,00	2.034.036.350,00	734.005.110,00	36,09
4	Dinas Perumahan Dan Kawasan	511.396.000,00	423.828.500,00	87.567.500,00	20,66
5	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha	113.604.000,00	114.219.000,00	(615.000,00)	(0,54)
6	Dinas Perhubungan	2.280.046.300,00	1.856.708.000,00	423.338.300,00	22,80
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	1.183.878.493,00	905.205.500,00	278.672.993,00	30,79
8	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan	8.801.799.670,00	9.850.921.310,00	(1.049.121.640,00)	(10,65)
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.414.724.832,00	1.957.100.717,00	457.624.115,00	23,38
10	Dinas Pertanian dan Pangan	705.142.000,00	388.246.000,00	316.896.000,00	81,62
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8.102.101.400,00	6.671.855.650,00	1.430.245.750,00	21,44
12	Bagian Umum	199.811.000,00	174.234.000,00	25.577.000,00	14,68
13	Kecamatan Kebumen	54.391.715,00	33.115.910,00	21.275.805,00	64,25
14	Kelurahan Kebumen	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(100,00)
15	Kecamatan Alian	2.422.000,00	1.659.000,00	763.000,00	45,99
16	Kecamatan Karangsembung	0,00	2.153.600,00	(2.153.600,00)	(100,00)
17	Kecamatan Prembun	3.061.500,00	6.580.000,00	(3.518.500,00)	(53,47)
18	Kecamatan Mirit	698.000,00	0,00	698.000,00	0,00
19	Kecamatan Kutowinangun	1.889.000,00	6.264.880,00	(4.375.880,00)	(69,85)
20	Kecamatan Ambal	10.427.000,00	691.000,00	9.736.000,00	1.408,97
21	Kecamatan Buluspesantren	1.700.000,00	2.760.000,00	(1.060.000,00)	(38,41)
22	Kecamatan Pejagoan	4.501.000,00	4.851.000,00	(350.000,00)	(7,22)
23	Kecamatan Klirong	0,00	4.865.000,00	(4.865.000,00)	(100,00)
24	Kecamatan Petanahan	906.000,00	4.647.000,00	(3.741.000,00)	(80,50)
25	Kecamatan Sruweng	1.508.000,00	5.043.500,00	(3.535.500,00)	(70,10)
26	Kecamatan Karanganyar	13.941.000,00	5.811.800,00	8.129.200,00	139,87
27	Kecamatan Karanggayam	0,00	2.782.000,00	(2.782.000,00)	(100,00)
28	Kecamatan Adimulyo	0,00	6.978.000,00	(6.978.000,00)	(100,00)
29	Kecamatan Kuwarasan	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00	0,00
30	Kecamatan Puring	560.000,00	1.390.000,00	(830.000,00)	(59,71)
31	Kecamatan Gombang	17.754.750,00	22.676.500,00	(4.921.750,00)	(21,70)
32	Kecamatan Sempor	5.310.000,00	5.357.790,00	(47.790,00)	(0,89)
33	Kecamatan Buayan	315.000,00	5.568.700,00	(5.253.700,00)	(94,34)
34	Kecamatan Rowokele	257.000,00	3.425.100,00	(3.168.100,00)	(92,50)
35	Kecamatan Ayah	1.265.000,00	5.050.000,00	(3.785.000,00)	(74,95)
36	Kecamatan Sadang	912.400,00	960.000,00	(47.600,00)	(4,96)
37	Kecamatan Poncowarno	0,00	656.000,00	(656.000,00)	(100,00)
38	Kecamatan Padureso	2.635.475,00	868.250,00	1.767.225,00	203,54
39	Kecamatan Bonorowo	3.025.000,00	2.787.000,00	238.000,00	8,54
40	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	398.198.741,34	357.517.360,83	40.681.380,51	11,38
Jumlah		27.806.000.986,34	41.101.228.134,83	(13.295.227.148,49)	(32,35)

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Tahun 2019
Rp6.297.570.767,00

Tahun 2018
Rp15.921.082.570,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Tahun 2019 sebesar Rp6.297.570.767,00 yang Dipisahkan terdiri dari.

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Tabel Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO

Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik	6.297.570.767,00	15.921.082.570,00	(9.623.511.803,00)	(60,45)
Jumlah	6.297.570.767,00	15.921.082.570,00	(9.623.511.803,00)	(60,45)

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO merupakan hak Pemerintah Daerah dari bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD sebagai berikut:

Tabel Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO

Uraian	Jumlah (Rp)
a. Apotik Luk Ulo	277.218.865,00
b. Perusda Air Minum	3.504.410.244,00
c. PD BPR Kebumen	2.515.941.658,00
Jumlah	6.297.570.767,00

5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah – LO

Tahun 2019	Tahun 2018
Rp387.444.573.679,48	Rp340.217.989.895,10

Lain-lain PAD yang Sah – LO Tahun 2019 sebesar Rp387.444.573.679,48 terdiri dari berikut.

Tabel Rincian Lain-lain PAD yang Sah LO

Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak	781.423.477,00	73.302.500,00	708.120.977,00	966,03
Penerimaan Jasa Giro – LO	7.358.931.704,00	4.601.897.200,00	2.757.034.504,00	59,91
Pendapatan Bunga – LO	17.827.703.907,00	19.662.476.965,00	(1.834.773.058,00)	(9,33)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	261.886.277,00	447.441.234,00	(185.554.957,00)	(41,47)
Pendapatan Denda Pajak – LO	320.991.288,00	687.728.206,00	(366.736.918,00)	(53,33)
Pendapatan Denda Retribusi – LO	453.321.200,00	517.246.670,00	(63.925.470,00)	(12,36)
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan –LO	0,00	345.825.650,00	(345.825.650,00)	(100,00)
Pendapatan dari Pengembalian –LO	1.374.233.566,00	1.914.077.557,00	(539.843.991,00)	(28,20)
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah – LO	0,00	360.000,00	(360.000,00)	(100,00)
Pendapatan BLUD – LO	226.793.215.999,48	187.536.331.255,52	39.256.884.743,96	20,93
Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya – LO	1.015.032.305,00	2.231.246.121,58	(1.216.213.816,58)	(54,51)
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum – LO	933.521.985,00	1.104.965.162,00	(171.443.177,00)	(15,52)
Hasil dari pengelolaan dana bergulir	35.165.000,00	49.375.000,00	(14.210.000,00)	(28,78)
Dana BOS	130.289.146.971,00	121.045.716.374,00	9.243.430.597,00	7,64
Jumlah	387.444.573.679,48	340.217.989.895,10	47.226.583.784,38	13,88

Pendapatan BLUD – LO merupakan pendapatan dari entitas yang telah menerapkan PPK-BLUD sebagaimana berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Tabel Pendapatan BLUD-LO

No.	OPD	Tahun 2019	Tahun 2018	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
		(Rp)	(Rp)		
1.	Puskesmas Adimulyo	1.582.855.525,00	1.446.688.213,00	136.167.312,00	9,41
2.	Puskesmas Alian	3.430.415.158,00	3.547.502.863,00	(117.087.705,00)	(3,30)
3.	Puskesmas Ambal I	2.131.290.168,00	1.992.456.573,00	138.833.595,00	6,97
4.	Puskesmas Ambal II	1.327.096.450,00	1.281.164.833,00	45.931.617,00	3,59
5.	Puskesmas Ayah I	2.836.605.754,00	2.209.575.598,00	627.030.156,00	28,38
6.	Puskesmas Ayah II	1.421.233.896,00	1.276.999.679,00	144.234.217,00	11,29
7.	Puskesmas Bonorowo	1.234.620.251,00	1.109.107.961,00	125.512.290,00	11,32
8.	Puskesmas Buayan	2.350.341.493,00	2.285.431.193,00	64.910.300,00	2,84
9.	Puskesmas Buluspesantren I	1.461.767.019,00	1.446.276.663,00	15.490.356,00	1,07
10.	Puskesmas Buluspesantren II	1.177.162.425,00	1.241.630.814,00	(64.468.389,00)	(5,19)
11.	Puskesmas Gombang I	1.561.439.525,00	1.368.111.969,00	193.327.556,00	14,13
12.	Puskesmas Gombang II	994.861.432,00	1.150.250.069,00	(155.388.637,00)	(13,51)
13.	Puskesmas Karanganyar	2.718.068.421,00	2.218.378.344,00	499.690.077,00	22,53
14.	Puskesmas Karanggayam I	1.950.717.337,00	2.007.538.880,00	(56.821.543,00)	(2,83)
15.	Puskesmas Karanggayam II	1.039.163.758,00	1.091.081.027,00	(51.917.269,00)	(4,76)
16.	Puskesmas Karangsambung	2.959.656.726,00	2.578.302.240,00	381.354.486,00	14,79
17.	Puskesmas Kebumen I	2.150.547.113,00	2.317.069.638,00	(166.522.525,00)	(7,19)
18.	Puskesmas Kebumen II	2.113.396.004,00	2.257.311.324,00	(143.915.320,00)	(6,38)
19.	Puskesmas Kebumen III	1.598.641.339,00	1.359.902.450,00	238.738.889,00	17,56
20.	Puskesmas Klirong I	2.148.765.612,00	1.807.058.668,00	341.706.944,00	18,91
21.	Puskesmas Klirong II	1.232.908.623,00	1.072.145.150,00	160.763.473,00	14,99
22.	Puskesmas Kutowinangun	3.085.217.165,00	3.115.170.899,00	(29.953.734,00)	(0,96)
22.	Puskesmas Kuwarasan	1.952.813.490,00	2.259.405.132,00	(306.591.642,00)	(13,57)
23.	Puskesmas Mirit	2.823.652.515,00	2.678.561.986,00	145.090.529,00	5,42
24.	Puskesmas Padureso	1.230.798.368,00	1.076.717.367,00	154.081.001,00	14,31
25.	Puskesmas Pejagoan	3.264.732.996,00	2.990.351.097,00	274.381.899,00	9,18
26.	Puskesmas Petanahan	3.067.494.027,00	2.729.661.677,00	337.832.350,00	12,38
27.	Puskesmas Poncowarno	1.002.237.448,00	1.021.904.404,00	(19.666.956,00)	(1,92)
28.	Puskesmas Prembun	1.295.513.437,00	965.312.759,00	330.200.678,00	34,21
29.	Puskesmas Puring	2.247.574.980,00	2.051.247.167,00	196.327.813,00	9,57
30.	Puskesmas Rowokele	2.046.185.453,00	2.391.903.938,00	(345.718.485,00)	(14,45)
31.	Puskesmas Sadang	1.350.928.699,00	1.031.473.673,00	319.455.026,00	30,97
32.	Puskesmas Sempor I	2.303.396.166,00	2.013.979.542,00	289.416.624,00	14,37
33.	Puskesmas Sempor II	1.099.766.467,00	1.101.928.207,00	(2.161.740,00)	(0,20)
34.	Puskesmas Sruweng	2.166.978.401,00	2.012.956.265,00	154.022.136,00	7,65
35.	Pengobatan Penyakit Paru	240.325.370,68	797.076.652,32	(556.751.281,64)	(69,85)
36.	RSUD dr. Sudirman	135.125.334.877,80	122.234.696.341,20	12.890.638.536,60	10,55
37.	RSUD Prembun	23.068.712.110,00	0,00	23.068.712.110,00	0,00
	Jumlah	226.793.215.999,48	187.536.331.255,52	39.256.884.743,96	20,93

Sedangkan Pendapatan Dana BOS merupakan penerimaan dana BOS pada masing-masing satuan pendidikan sebagaimana berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Tabel Pendapatan BOS - LO

No.	OPD	Tahun 2019	Tahun 2018	Kenaikan/	%
		(Rp)	(Rp)	(Penurunan) (Rp)	
1	Dinas Pendidikan (SDN se Kab Kebumen)	94.086.546.971,00	86.181.356.361,20	7.905.190.609,80	9,17
2	SMPN 1 Ayah	761.200.000,00	758.600.000,00	2.600.000,00	0,34
3	SMPN 2 Ayah	388.400.000,00	393.600.000,00	(5.200.000,00)	(1,32)
4	SMPN 1 Buayan	661.600.000,00	664.800.000,00	(3.200.000,00)	(0,48)
5	SMPN 2 Buayan	659.200.000,00	699.145.500,00	(39.945.500,00)	(5,71)
6	SMPN 1 Puring	667.600.000,00	666.600.000,00	1.000.000,00	0,15
7	SMPN 2 Puring	559.800.000,00	566.600.000,00	(6.800.000,00)	(1,20)
8	SMPN 1 Petanahan	762.200.000,00	769.837.600,00	(7.637.600,00)	(0,99)
9	SMPN 1 Klirong	766.000.000,00	763.000.000,00	3.000.000,00	0,39
10	SMPN 1 Buluspesantren	762.200.000,00	764.800.000,00	(2.600.000,00)	(0,34)
11	SMPN 2 Buluspesantren	540.600.000,00	557.600.000,00	(17.000.000,00)	(3,05)
12	SMPN 1 Ambal	782.600.000,00	794.800.000,00	(12.200.000,00)	(1,53)
13	SMPN 2 Ambal	544.800.000,00	557.960.062,00	(13.160.062,00)	(2,36)
14	SMPN 1 Mirit	742.200.000,00	750.800.000,00	(8.600.000,00)	(1,15)
15	SMPN 2 Mirit	570.000.000,00	570.200.000,00	(200.000,00)	(0,04)
16	SMPN 1 Prembun	759.200.000,00	758.600.000,00	600.000,00	0,08
17	SMPN 2 Prembun	640.000.000,00	668.400.000,00	(28.400.000,00)	(4,25)
18	SMPN 1 Kutow inangun	468.600.000,00	472.583.298,00	(3.983.298,00)	(0,84)
19	SMPN 2 Kutow inangun	701.600.000,00	740.000.000,00	(38.400.000,00)	(5,19)
20	SMPN 3 Kutow inangun	558.800.000,00	572.498.124,00	(13.698.124,00)	(2,39)
21	SMPN 1 Alian	766.200.000,00	784.400.000,00	(18.200.000,00)	(2,32)
22	SMPN 1 Poncow arno	618.400.000,00	639.406.636,00	(21.006.636,00)	(3,29)
23	SMPN 1 Kebumen	744.600.000,00	746.200.000,00	(1.600.000,00)	(0,21)
24	SMPN 2 Kebumen	756.800.000,00	763.200.000,00	(6.400.000,00)	(0,84)
25	SMPN 3 Kebumen	758.400.000,00	766.579.545,00	(8.179.545,00)	(1,07)
26	SMPN 4 Kebumen	749.600.000,00	753.200.000,00	(3.600.000,00)	(0,48)
27	SMPN 5 Kebumen	568.800.000,00	569.600.000,00	(800.000,00)	(0,14)
28	SMPN 6 Kebumen	750.400.000,00	750.400.000,00	0,00	0,00
29	SMPN 7 Kebumen	769.400.000,00	794.200.000,00	(24.800.000,00)	(3,12)
30	SMPN 1 Pejagoan	763.600.000,00	762.800.000,00	800.000,00	0,10
31	SMPN 2 Pejagoan	620.400.000,00	642.400.000,00	(22.000.000,00)	(3,42)
32	SMPN 1 Sruweng	760.200.000,00	761.200.000,00	(1.000.000,00)	(0,13)
33	SMPN 2 Sruweng	483.800.000,00	503.407.000,00	(19.607.000,00)	(3,89)
34	SMPN 1 Adimulyo	401.600.000,00	426.000.000,00	(24.400.000,00)	(5,73)
35	SMPN 2 Adimulyo	758.800.000,00	762.800.000,00	(4.000.000,00)	(0,52)
36	SMPN 1 Kuwarasan	755.600.000,00	754.000.000,00	1.600.000,00	0,21
37	SMPN 1 Rowokele	755.400.000,00	760.800.000,00	(5.400.000,00)	(0,71)
38	SMPN 1 Sempor	757.400.000,00	763.800.000,00	(6.400.000,00)	(0,84)
39	SMPN 2 Sempor	421.600.000,00	452.200.000,00	(30.600.000,00)	(6,77)
40	SMPN 1 Gombong	819.400.000,00	478.200.000,00	341.200.000,00	71,35
41	SMPN 2 Gombong	861.400.000,00	496.400.000,00	365.000.000,00	73,53
42	SMPN 3 Gombong	666.600.000,00	672.000.000,00	(5.400.000,00)	(0,80)
43	SMPN 4 Gombong	631.000.000,00	703.800.000,00	(72.800.000,00)	(10,34)
44	SMPN 1 Karanganyar	1.360.800.000,00	812.200.000,00	548.600.000,00	67,54
45	SMPN 2 Karanganyar	761.600.000,00	761.200.000,00	400.000,00	0,05
46	SMPN 3 Karanganyar	763.400.000,00	769.000.000,00	(5.600.000,00)	(0,73)
47	SMPN 1 Karanggayam	760.600.000,00	759.600.000,00	1.000.000,00	0,13
48	SMPN 2 Karanggayam	568.600.000,00	580.400.000,00	(11.800.000,00)	(2,03)
49	SMPN 1 Karangsambung	736.800.000,00	729.800.000,00	7.000.000,00	0,96
50	SMPN 2 Karangsambung	260.800.000,00	283.600.000,00	(22.800.000,00)	(8,04)
51	SMPN 1 Padureso	158.400.000,00	144.800.000,00	13.600.000,00	9,39
52	SMPN 2 Rowokele	662.200.000,00	392.200.000,00	270.000.000,00	68,84
53	SMPN 1 Sadang	360.200.000,00	377.400.000,00	(17.200.000,00)	(4,56)
54	SMPN 3 Satu Atap Ayah	176.000.000,00	183.800.000,00	(7.800.000,00)	(4,24)
55	SMPN 2 Satu Atap Alian	110.000.000,00	140.200.000,00	(30.200.000,00)	(21,54)
56	SMPN 2 Satu Atap Poncow arno	74.200.000,00	86.597.610,00	(12.397.610,00)	(14,32)
57	SMPN 3 Satu Atap Sempor	189.200.000,00	96.800.000,00	92.400.000,00	95,45
58	SMPN 3 Satu Atap Karangsambung	234.400.000,00	134.600.000,00	99.800.000,00	74,15
59	SMPN 4 Satu Atap Karangsambung	341.400.000,00	190.200.000,00	151.200.000,00	79,50
60	SMPN 1 Bonorowo	448.000.000,00	425.694.500,00	22.305.500,00	5,24
	Jumlah	130.289.146.971,00	121.046.866.236,20	9.242.280.734,80	7,64



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

5.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO

<u>Tahun 2019</u>	<u>Tahun 2018</u>
Rp1.882.428.936.333,00	Rp1.801.342.909.968,00

Rincian Pendapatan Transfer – LO Tahun 2019 sebesar Rp1.882.428.936.333,00 adalah sebagai berikut.

Tabel Pendapatan Transfer – LO

Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Transfer Pemerintah Pusat – LO	1.697.618.197.493,00	1.654.135.303.906,00	43.482.893.587,00	2,63
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO	34.569.662.000,00	0,00	34.569.662.000,00	0,00
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya- LO	140.304.876.840,00	123.332.849.062,00	16.972.027.778,00	13,76
Bantuan Keuangan – LO	9.936.200.000,00	23.874.757.000,00	(13.938.557.000,00)	(58,38)
Jumlah	1.882.428.936.333,00	1.801.342.909.968,00	81.086.026.365,00	4,50

Dari tabel diatas dapat diketahui pendapatan transfer LO tahun 2019 naik sebesar Rp81.086.026.365,00 atau sebesar 4,50% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan pendapatan transfer terbesar tahun 2019 yakni pada Pos Transfer Pemerintah Pusat Lainnya naik sebesar Rp34.569.662.000,00, Kenaikan lainnya ada pada Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO naik sebesar Rp16.972.027.778,00 dan Transfer Pemerintah Pusat naik sebesar Rp43.482.893.587,00.

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO

<u>Tahun 2019</u>	<u>Tahun 2018</u>
Rp1.697.618.197.493,00	Rp1.654.135.303.906,00

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2019 sebesar Rp1.697.618.197.493,00 disajikan sebagai berikut.

Tabel Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Bagi Hasil Pajak - LO	29.474.059.085,00	28.209.494.743,00	1.264.564.342,00	4,48
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	1.916.090.965,00	1.417.931.636,00	498.159.329,00	35,13
Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	1.279.681.428.000,00	1.234.003.169.000,00	45.678.259.000,00	3,70
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	386.546.619.443,00	390.504.708.527,00	(3.958.089.084,00)	(1,01)
Jumlah	1.697.618.197.493,00	1.654.135.303.906,00	43.482.893.587,00	2,63

Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO Tahun 2019 sebesar Rp29.474.059.085,00 secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO

Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
Bagi hasil PBB Sektor Pertambangan	6.754.904.922,00	8.041.348.287,00	(1.286.443.365,00)	(16,00)
Bagi Hasil PBB Sektor Perhutanan	2.129.552.578,00	0,00	2.129.552.578,00	0,00
Bagi Hasil PPH	12.539.192.904,00	12.761.712.456,00	(222.519.552,00)	(1,74)
Bagi hasil cukai tembakau	8.050.408.681,00	7.406.434.000,00	643.974.681,00	8,69
Jumlah	29.474.059.085,00	28.209.494.743,00	1.264.564.342,00	4,48



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO Tahun 2019 sebesar Rp 1.916.090.965,00 secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	(Rp)	(Rp)		
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO	259.658.626,00	336.094.572,00	(76.435.946,00)	(22,74)
Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - LO	764.460.992,00	701.234.591,00	63.226.401,00	9,02
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LO	148.235.258,00	36.346.929,00	111.888.329,00	307,83
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LO	675.297.109,00	291.237.025,00	384.060.084,00	131,87
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LO	41.402.160,00	26.570.761,00	14.831.399,00	55,82
Bagi Hasil SDA Mineral Batubara	27.036.820,00	26.447.758,00	589.062,00	2,23
Jumlah	1.916.090.965,00	1.417.931.636,00	498.159.329,00	35,13

Pendapatan Dana Alokasi Umum – LO Tahun 2019 sebesar Rp1.279.681.428.000,00 secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel Pendapatan Dana Alokasi Umum – LO

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	(Rp)	(Rp)		
Dana Alokasi Umum	1.279.681.428.000,00	1.234.003.169.000,00	45.678.259.000,00	3,70
Jumlah	1.279.681.428.000,00	1.234.003.169.000,00	45.678.259.000,00	3,70

Pendapatan Dana Alokasi Khusus – LO tahun 2019 secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel Pendapatan Dana Alokasi Khusus – LO

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	(Rp)	(Rp)		
DAK Pendidikan SD/SDLB - LO	5.611.536.400,00	8.208.345.258,00	(2.596.808.858,00)	(31,64)
DAK Pendidikan SMP - LO	1.136.545.000,00	1.012.205.942,00	124.339.058,00	12,28
SKB - LO	1.851.441.388,00	0,00	1.851.441.388,00	0,00
Perpustakaan Daerah - LO	485.127.378,00	0,00	485.127.378,00	0,00
Pelayanan Dasar - LO	2.171.579.947,00	5.459.463.119,00	(3.287.883.172,00)	(60,22)
Pelayanan Rujukan - LO	3.836.770.025,00	3.375.625.507,00	461.144.518,00	13,66
Pelayanan Kefarmasian - LO	3.777.355.737,00	4.576.588.028,00	(799.232.291,00)	(17,46)
Keluarga Berencana - LO	1.063.651.500,00	434.152.419,00	629.499.081,00	144,99
Penurunan Stunting - LO	2.491.999.300,00	0,00	2.491.999.300,00	0,00
Pendukung Peralatan Imunisasi - LO	0,00	418.684.353,00	(418.684.353,00)	(100,00)
Pengendalian Penyakit - LO	3.557.939.000,00	0,00	3.557.939.000,00	0,00
Air Minum - LO	3.492.258.000,00	6.851.192.000,00	(3.358.934.000,00)	(49,03)
Sanitasi - LO	6.492.000.000,00	8.647.878.000,00	(2.155.878.000,00)	(24,93)
Pertanian- LO	4.478.593.315,00	3.499.297.000,00	979.296.315,00	27,99
Kelautan dan Perikanan - LO	1.374.221.038,00	1.109.894.000,00	264.327.038,00	23,82
Lingkungan Hidup - LO	278.355.000,00	832.327.000,00	(553.972.000,00)	(66,56)
Sarana Perdagangan - LO	0,00	2.660.635.000,00	(2.660.635.000,00)	(100,00)
Jalan - LO	20.820.374.000,00	16.769.609.000,00	4.050.765.000,00	24,16
Infrastruktur Irigasi - LO	0,00	3.128.657.000,00	(3.128.657.000,00)	0,00
Sarpras Irigasi dan Air Minum - LO	3.409.482.000,00	0,00	3.409.482.000,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO	311.170.586.615,00	312.272.521.901,00	(1.101.935.286,00)	(0,35)
Bidang Perumahan dan Permukiman	2.972.290.000,00	9.793.070.000,00	(6.820.780.000,00)	(69,65)
Pariwisata - LO	1.061.233.650,00	1.454.563.000,00	(393.329.350,00)	(27,04)
Pasar - LO	4.714.371.000,00	0,00	4.714.371.000,00	0,00
Industri Kecil dan Menengah - LO	298.909.150,00	0,00	298.909.150,00	0,00
Jumlah	386.546.619.443,00	390.504.708.527,00	(3.958.089.084,00)	(1,01)



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO

Tahun 2019	Tahun 2018
Rp34.569.662.000,00	Rp0,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya – LO tahun 2019 secara rinci dapat dilihat berikut ini.

Tabel Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	(Rp)	(Rp)		
Dana Insentif Daerah - LO	34.569.662.000,00	0,00	34.569.662.000,00	100,00
Jumlah	34.569.662.000,00	0,00	34.569.662.000,00	100,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO tahun 2019 naik sebesar Rp34.569.662.000,00 dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan ini merupakan Dana Insentif Daerah yang diterima pemerintah kabupaten Kebumen Tahun 2019.

5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO

Tahun 2019	Tahun 2018
Rp140.304.876.840,00	Rp123.332.849.062,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah lainnya - LO Tahun 2019 sebesar Rp140.304.876.840,00 merupakan pendapatan dari.

Tabel Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LO

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	(Rp)	(Rp)		
Pendapatan Bagi hasil Pajak - LO	140.304.876.840,00	123.332.849.062,00	16.972.027.778,00	13,76
Jumlah	140.304.876.840,00	123.332.849.062,00	16.972.027.778,00	13,76

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya - LO tahun 2019 naik sebesar Rp16.972.027.778,00 atau sebesar 13,76% dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan Transfer Pemerintah daerah Lainnya merupakan hak Pemerintah daerah atas Bagi Hasil Pajak/Retribusi dari Provinsi dari Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB, PBBKB, Pajak Rokok dan Pajak Air Permukaan, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	34.990.646.828,00	31.236.672.478,00	3.753.974.350,00	12,02
Bagi Hasil dari Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	24.353.225.229,00	22.937.682.393,00	1.415.542.836,00	6,17
Bagi Hasil dari Pajak Bea Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	35.624.880.513,00	32.693.218.535,00	2.931.661.978,00	8,97
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	322.719.905,00	349.027.171,00	(26.307.266,00)	(7,54)
Bagi Hasil dari Pajak Rokok	45.013.404.365,00	36.116.248.485,00	8.897.155.880,00	24,63
Jumlah	140.304.876.840,00	123.332.849.062,00	16.972.027.778,00	13,76



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

5.4.1.2.4 Bantuan Keuangan – LO

Tahun 2019	Tahun 2018
Rp9.936.200.000,00	Rp23.874.757.000,00

Pendapatan Bantuan Keuangan - LO Tahun 2019 merupakan bantuan keuangan yang diterima Pemerintah Kabupaten Kebumen dari Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari berikut ini.

Tabel Pendapatan Bantuan Keuangan – LO

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	(Rp)	(Rp)		
FEDEP	0,00	290.000.000,00	(290.000.000,00)	(100,00)
TMMD	720.000.000,00	561.600.000,00	158.400.000,00	28,21
Bantuan Keuangan Pendidikan	77.000.000,00	0,00	77.000.000,00	100,00
Bantuan Sarana dan Prasarana	9.139.200.000,00	23.023.157.000,00	(13.883.957.000,00)	(60,30)
Jumlah	9.936.200.000,00	23.874.757.000,00	(13.938.557.000,00)	(58,38)

5.4.1.3 Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah- LO

Tahun 2019	Tahun 2018
Rp7.208.963.041,00	Rp5.547.503.090,00

Rincian Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	(Rp)	(Rp)		
Pendapatan Hibah – LO	7.208.963.041,00	5.547.503.090,00	1.661.459.951,00	29,95
Hibah Air Minum	4.452.000.000,00	2.282.000.000,00	2.170.000.000,00	95,09
Hibah Air Limbah	2.424.000.000,00	3.201.000.000,00	(777.000.000,00)	(24,27)
Hibah AIPDMIP	228.963.041,00	64.503.090,00	164.459.951,00	254,96
Hibah SAIIG	104.000.000,00	0,00	104.000.000,00	100,00
Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	7.208.963.041,00	5.547.503.090,00	1.661.459.951,00	29,95

Lain-lain pendapatan daerah yang sah LO tahun 2019 naik sebesar Rp1.661.459.951,00 atau sebesar 29,95% dibandingkan tahun sebelumnya.

Lain-lain Pendapatan daerah Yang sah – LO terdiri dari Hibah Air Minum sebesar Rp4.452.000.000,00, Hibah Air Limbah setempat sebesar Rp2.424.000.000,00, Hibah AIPDMIP sebesar Rp228.963.041,00, dan Hibah AIIG sebesar Rp104.000.000,00.

Hibah Air Minum Perdesaan diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai dana pengganti atas pelaksanaan kegiatan peningkatan akses penyediaan air minum masyarakat perdesaan yang belum memiliki akses sambungan air minum perpipaan. Dana Hibah tersebut diberikan Pemerintah Kabupaten Kebumen berdasarkan capaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan pemasangan sambungan rumah (SR) baru. Pemberian hibah Air Minum Perdesaan tersebut tertuang dalam Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen Nomor PHD-14/AMD.7/2018 tanggal 23 Mei 2018 yang disalurkan ke Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui RKUD tanggal 27 Desember 2019.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Hibah Air Limbah diberikan Pemerintah Pusat kepada .Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk Pembangunan Sanitasi yang disalurkan ke Pemerintah Kabupaten Kebumen yang tertuang dalam Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen Nomor AMA-4/AMA-42/PPH-149/PK/2018 tanggal 20 Desember 2018 melalui RKUD tanggal 27 Desember 2019.

Hibah AIPDMIP diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai dana pengganti atas pelaksanaan kegiatan Program Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Partisipatif Terpadu yang didanai terlebih dahulu oleh APBD. Hibah tersebut diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen berdasarkan capaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan irigasi. Pemberian hibah AIPDMIP tertuang dalam Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen Nomor PHD.049/IPDMIP/PK/2018 tanggal 14 Februari 2018 yang disalurkan ke Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui RKUD tanggal 20 Desember 2018.

Hibah SAIIG diberikan Pemerintah Pusat kepada .Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk Pembangunan Sanitasi yang disalurkan ke Pemerintah Kabupaten Kebumen yang tertuang dalam Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen Nomor AMA-4/AMA-42/PPH-149/PK/2018 tanggal 20 Desember 2018 melalui RKUD tanggal 30 Desember 2019.

5.4.2 Beban

Tahun 2019
 Rp2.342.754.928.558,44

Tahun 2018
 Rp2.192.875.926.171,60

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Rincian Beban

Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Pegawai - LO	1.192.143.623.118,00	1.155.821.273.694,00	36.322.349.424,00	3,14
Beban Persediaan	82.930.983.968,15	112.349.973.149,63	(29.418.989.181,48)	(26,19)
Beban Jasa	380.655.730.383,00	324.671.530.839,95	55.984.199.543,05	17,24
Beban Pemeliharaan	55.086.254.735,00	30.132.391.613,00	24.953.863.122,00	82,81
Beban Perjalanan Dinas	47.099.396.526,00	43.253.088.201,00	3.846.308.325,00	8,89
Beban Hibah	91.027.595.845,00	56.720.440.981,00	34.307.154.864,00	60,48
Beban Bantuan Sosial	41.392.080.465,00	51.842.190.750,00	(10.450.110.285,00)	(20,16)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	280.660.730.096,29	260.914.600.077,92	19.746.130.018,37	7,57
Beban Penyisihan Piutang	3.653.789.922,00	1.651.917.415,10	2.001.872.506,90	121,18
Beban Transfer	168.104.743.500,00	155.518.519.450,00	12.586.224.050,00	8,09
Jumlah	2.342.754.928.558,44	2.192.875.926.171,60	149.879.002.386,84	6,83

5.4.2.1 Beban Pegawai

Tahun 2019
 Rp1.192.143.623.118,00

Tahun 2018
 Rp1.155.821.273.694,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Beban Pegawai tahun 2019 terdiri dari.

Tabel Rincian Beban Pegawai

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	(Rp)	(Rp)		
Beban Gaji dan Tunjangan	1.010.538.087.365,00	739.369.742.590,00	271.168.344.775,00	36,68
Beban Tambahan Penghasilan PNS	65.008.231.297,00	334.632.341.322,00	(269.624.110.025,00)	(80,57)
Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kdh/WKdh	16.942.960.000,00	14.651.000.000,00	2.291.960.000,00	15,64
Beban Insentif Pajak	5.089.915.600,00	4.307.727.932,00	782.187.668,00	18,16
Beban Insentif Retribusi	638.304.885,00	830.332.099,00	(192.027.214,00)	(23,13)
Beban Lembur	5.425.585.403,00	5.512.211.926,00	(86.626.523,00)	(1,57)
Beban Pegawai BLUD	20.932.105.704,00	14.971.093.090,00	5.961.012.614,00	39,82
Beban Honorarium PNS	19.350.749.498,00	17.368.561.600,00	1.982.187.898,00	11,41
Beban Honorarium Non PNS	32.597.880.167,00	7.991.059.200,00	24.606.820.967,00	307,93
Beban Pegawai BOS	15.619.803.199,00	16.187.203.935,00	(567.400.736,00)	(3,51)
Jumlah	1.192.143.623.118,00	1.155.821.273.694,00	36.322.349.424,00	3,14

Untuk Rincian Beban Pegawai per OPD/Unit Kerja tahun 2019 sebagaimana terlampir pada **lampiran 31**

5.4.2.2 Beban Persediaan

Tahun 2019	Tahun 2018
Rp82.930.983.968,15	Rp112.349.973.149,63

Beban Persediaan tahun 2019 sebesar Rp82.930.983.968,15 secara rinci dapat dilihat berikut ini:

Tabel Rincian Beban Persediaan

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	(Rp)	(Rp)		
Beban Bahan Pakai Habis	19.222.745.358,00	18.379.941.729,13	842.803.628,87	4,59
Beban Persediaan Bahan/ Material	15.196.175.849,15	55.053.439.491,50	(39.857.263.642,35)	(72,40)
Beban Cetak dan Penggandaan	11.011.012.431,00	10.229.006.769,00	782.005.662,00	7,64
Beban Makanan dan Minuman	34.161.831.680,00	26.894.399.659,00	7.267.432.021,00	27,02
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	682.236.650,00	358.724.250,00	323.512.400,00	90,18
Beban Pakaian Kerja	1.247.022.000,00	1.025.718.751,00	221.303.249,00	21,58
Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	510.998.000,00	408.742.500,00	102.255.500,00	25,02
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	898.962.000,00	0,00	898.962.000,00	100,00
Jumlah	82.930.983.968,15	112.349.973.149,63	(29.418.989.181,48)	(26,19)

Untuk Rincian Beban Persediaan per OPD/Unit Kerja tahun 2019 sebagaimana terlampir pada **lampiran 32**

5.4.2.3 Beban Jasa

Tahun 2019	Tahun 2018
Rp380.655.730.383,00	Rp324.671.530.839,95



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Beban Jasa tahun 2019 sebesar Rp380.655.730.383,00 secara rinci dapat dilihat berikut ini:

Tabel Rincian Beban Jasa

Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Jasa Kantor	65.971.205.453,00	53.366.296.478,00	12.604.908.975,00	23,62
Beban Premi Asuransi	47.416.760,00	34.632.012,00	12.784.748,00	36,92
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.701.123.067,00	1.443.662.545,00	257.460.522,00	17,83
Beban Sewa Sarana Mobilitas	1.455.610.724,00	1.331.043.000,00	124.567.724,00	9,36
Beban Sewa Alat Berat	195.427.500,00	200.590.000,00	(5.162.500,00)	(2,57)
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.848.190.809,00	1.883.734.949,00	(35.544.140,00)	(1,89)
Beban Jasa Konsultasi	5.615.784.500,00	7.069.292.280,00	(1.453.507.780,00)	(20,56)
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	35.500.000,00	20.460.000,00	15.040.000,00	73,51
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	8.256.842.863,00	5.069.137.332,00	3.187.705.531,00	62,88
Beban Barang Dana BOS	78.552.809.463,00	53.072.124.445,00	25.480.685.018,00	48,01
Beban Jasa Pihak Ketiga	13.005.080.431,00	36.862.602.201,00	(23.857.521.770,00)	(64,72)
Beban Barang Dan Jasa BLUD	178.083.638.213,00	147.350.600.097,95	30.733.038.115,05	20,86
Beban uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	1.328.025.000,00	1.091.914.000,00	236.111.000,00	21,62
Beban Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.559.075.600,00	15.875.441.500,00	8.683.634.100,00	54,70
Jumlah	380.655.730.383,00	324.671.530.839,95	55.984.199.543,05	17,24

Untuk Rincian Beban Jasa per OPD/Unit Kerja tahun 2019 sebagaimana terlampir pada **lampiran 33**.

5.4.2.4 Beban Pemeliharaan

Tahun 2019	Tahun 2018
Rp55.086.254.735,00	Rp30.132.391.613,00

Beban Pemeliharaan tahun 2019 sebesar Rp55.086.254.735,00 secara rinci dapat dilihat berikut ini:

Tabel Rincian Beban Pemeliharaan

Beban	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	10.573.881.563,00	9.994.949.960,00	578.931.603,00	5,79
Beban Pemeliharaan	44.512.373.172,00	20.137.441.653,00	24.374.931.519,00	121,04
Jumlah	55.086.254.735,00	30.132.391.613,00	24.953.863.122,00	82,81

Untuk Rincian Beban Pemeliharaan per OPD/Unit Kerja tahun 2019 sebagaimana terlampir pada **lampiran 34**.

5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Tahun 2019	Tahun 2018
Rp47.099.396.526,00	Rp43.253.088.201,00

Beban Perjalanan Dinas tahun 2019 sebesar Rp47.099.396.526,00 secara rinci dapat dilihat berikut ini:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Tabel Rincian Beban Perjalanan Dinas

Beban	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Perjalanan Dinas	47.099.396.526,00	43.253.088.201,00	3.846.308.325,00	8,89
Jumlah	47.099.396.526,00	43.253.088.201,00	3.846.308.325,00	8,89

Untuk Rincian Beban Perjalanan Dinas per OPD/Unit Kerja tahun 2019 sebagaimana terlampir pada **lampiran 35**.

5.4.2.6 Beban Bunga

Tahun 2019	Tahun 2018
0,00	0,00

Tahun Anggaran 2019 tidak ada beban bunga.

5.4.2.7 Beban Subsidi

Tahun 2019	Tahun 2018
0,00	0,00

Tahun Anggaran 2019 tidak ada beban subsidi.

5.4.2.8 Beban Hibah

Tahun 2019	Tahun 2018
Rp91.027.595.845,00	Rp56.720.440.981,00

Beban Hibah secara rinci disajikan sebagai berikut.

Tabel Rincian Beban Hibah

Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Hibah Barang kepada Pemerintah	807.000.000,00	0,00	807.000.000,00	100,00
Hibah kepada Kelompok Masyarakat	59.928.559.845,00	26.357.092.381,00	33.571.467.464,00	127,37
Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	0,00	1.550.760.000,00	(1.550.760.000,00)	(100,00)
Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	1.612.268.000,00	0,00	1.612.268.000,00	100,00
Hibah kepada Sekolah Swasta	25.629.768.000,00	25.787.588.600,00	(157.820.600,00)	(0,61)
Hibah kepada Lembaga Keagamaan	3.050.000.000,00	3.025.000.000,00	25.000.000,00	0,83
Jumlah	91.027.595.845,00	56.720.440.981,00	34.307.154.864,00	60,48

Beban Hibah tahun 2019 yang disajikan dalam laporan operasional nilainya sama dengan Belanja Hibah tahun 2019 yang disajikan pada laporan realisasi anggaran.

- Beban Hibah-Kepada Pemerintah senilai Rp807.000.000,00 diberikan kepada Polres Kebumen dengan OPD pelaksana teknis adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Karena hibahnya berupa uang
- Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat tahun 2019 sebesar Rp59.928.559.845,00 dilaksanakan oleh OPD sebagaimana terlampir pada **lampiran 36**.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

- c. Beban Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Kemasyarakatan tahun 2019 sebesar Rp1.612.268.000,00 dilaksanakan oleh OPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Beban Hibah kepada Badan.Lembaga/Organisasi Swasta Kemasyarakatan Per OPD

No.	OPD	Uraian Hibah	Jumlah (Rp)
1.	Disporawisata	Hibah kepada KONI & NPC	1.348.800.000,00
2.	Bagian Kesra	Hibah kepada Baznas	100.000.000,00
3.	Dinas Pendidikan	Hibah kepada Dewan Pendidikan Kab Kebumen	60.000.000,00
4.	Kesbangpol	Hibah KPU	73.468.000,00
		Hibah Bawaslu	30.000.000,00
Jumlah			1.612.268.000,00

- d. Beban Hibah kepada Sekolah Swasta tahun 2019 sebesar Rp25.629.768.000,00 dilaksanakan oleh OPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Beban Hibah kepada Sekolah Swasta Per OPD

OPD	Uraian Hibah	Jumlah (Rp)
Dinas Pendidikan	Hibah Rehab Bangunan Gedung PAUD	1.650.000.000,00
	Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	18.440.700.000,00
	Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang/Berat MI	1.288.960.000,00
	Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang/Berat MTs	1.443.513.000,00
	Rehabilitasi Jamban/Sanitasi MTs	8.145.000,00
	Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan Paket A	32.500.000,00
	Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan Paket B	369.000.000,00
	Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan Paket C	2.057.400.000,00
	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Swasta	299.550.000,00
	Pengadaan Meubelair Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Swasta	40.000.000,00
Jumlah		25.629.768.000,00

- e. Beban Hibah kepada Lembaga Keagamaan tahun 2019 sebesar Rp3.050.000.000,00 dilaksanakan oleh OPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Beban Hibah kepada Lembaga Keagamaan Per OPD

OPD	Uraian Hibah	Jumlah (Rp)
Bagian Kesra	Hibah kepada Gereja	75.000.000,00
	Hibah kepada Madin	30.000.000,00
	Hibah kepada Masjid	1.800.000.000,00
	Hibah kepada Mushola	800.000.000,00
	Hibah kepada Pondok Pesantren	175.000.000,00
	Hibah kepada TPQ	120.000.000,00
	Hibah kepada MUI	50.000.000,00
Jumlah		3.050.000.000,00

5.4.2.9 Beban Bantuan Sosial

Tahun 2019	Tahun 2018
Rp41.392.080.465,00	Rp51.842.190.750,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Beban Bantuan Sosial secara rinci disajikan sebagai berikut.

Tabel Rincian Beban Bantuan Sosial

Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
Bansos kepada Organisasi Sosial Pendidikan	3.101.120.000,00	3.709.840.000,00	(608.720.000,00)	(16,41)
Bansos kepada Organisasi Sosial Pendidikan	-	9.605.692.000,00	(9.605.692.000,00)	(100,00)
Bansos kepada Masyarakat Miskin	38.130.960.465,00	38.351.658.750,00	(220.698.285,00)	(0,58)
Bansos kepada Korban Bencana Alam	160.000.000,00	175.000.000,00	(15.000.000,00)	(8,57)
Jumlah	41.392.080.465,00	51.842.190.750,00	(10.450.110.285,00)	(20,16)

Beban Bantuan Sosial tahun 2019 yang disajikan dalam laporan operasional nilainya sama dengan Belanja Bantuan Sosial tahun 2019 yang disajikan pada laporan realisasi anggaran.

- a. Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Pendidikan sebesar Rp3.101.120.000,00 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Rincian Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Pendidikan

OPD	Uraian Bansos	Nilai (Rp)
Dinas Pendidikan	Beban Bantuan Beasiswa Kurang Mampu SD/MI	1.711.200.000,00
	Beban Bantuan Beasiswa Siswa Kurang Mampu	1.389.920.000,00
Jumlah		3.101.120.000,00

- b. Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat Miskin sebesar Rp38.130.960.465,00 dilaksanakan oleh dilaksanakan oleh OPD sebagaimana terlampir pada **lampiran 37**.
- c. Beban Bantuan Sosial kepada Korban Bencana Alam sebesar Rp160.000.000,00 dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Rincian Beban Bantuan Sosial Korban Bencana Alam

OPD	Uraian Bansos	Jumlah (Rp)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bantuan sosial Korban bencana	160.000.000,00
Jumlah		160.000.000,00

5.4.2.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Tahun 2019
Tahun 2018
Rp280.660.730.096,29
Rp260.914.600.077,92

Beban penyusutan dan amortisasi merupakan penyusutan atas aset tetap dan amortisasi atas aset lainnya berupa *software* dan dokumen perencanaan yang ada di OPD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	(Rp)	(Rp)		
Beban Penyusutan Peralatan dan	96.429.637.736,00	85.618.218.215,00	10.811.419.521,00	12,63
Beban Penyusutan Gedung dan	30.035.989.778,00	28.468.866.776,00	1.567.123.002,00	5,50
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan	152.868.502.257,49	145.801.103.087,00	7.067.399.170,49	4,85
Beban Penyusutan Aset lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.326.600.324,80	1.026.411.999,92	300.188.324,88	29,25
Jumlah	280.660.730.096,29	260.914.600.077,92	19.746.130.018,37	7,57



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per OPD/Unit Kerja tahun 2019 sebagaimana terlampir pada **lampiran 38**.

5.4.2.11 Beban Penyisihan Piutang

<u>Tahun 2019</u>	<u>Tahun 2018</u>
Rp3.653.789.922,00	Rp1.651.917.415,10

Beban Penyisihan Piutang tahun 2019 sebesar Rp3.653.789.922,00 merupakan penyisihan piutang Pemerintah Kabupaten Kebumen yang terdapat pada OPD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Rincian Beban Penyisihan Piutang

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	(Rp)	(Rp)		
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	3.406.689.424,00	1.166.883.086,10	2.239.806.337,90	191,95
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	247.100.498,00	485.034.329,00	(237.933.831,00)	(49,06)
Jumlah	3.653.789.922,00	1.651.917.415,10	2.001.872.506,90	121,18

Rincian Beban Penyisihan Piutang per OPD/Unit Kerja tahun 2019 terdapat pada berikut.

Tabel Rincian Beban Penyisihan Piutang per OPD/Unit Kerja Tahun 2019

OPD	Tahun 2019	Tahun 2018	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	(Rp)	(Rp)		
RSUD dr. Soedirman	247.100.498,00	485.034.329,00	(237.933.831,00)	(49,06)
RSUD Prembun	43.455.585,00	2.842.926,00	40.612.659,00	1.428,55
Dinas Perhubungan	(28.200.000,00)	(9.500.000,00)	(18.700.000,00)	196,84
Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata	89.210.988,00	68.602.250,00	20.608.738,00	30,04
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14.609.550,00	0,00	14.609.550,00	100,00
PPKD (Bendahara Umum Daerah)	(1.040.000,00)	5.504.500,00	(6.544.500,00)	(118,89)
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.288.653.301,00	1.099.433.410,10	2.189.219.890,90	199,12
Jumlah	3.653.789.922,00	1.651.917.415,10	2.001.872.506,90	121,18

5.4.2.12 Beban Transfer

<u>Tahun 2019</u>	<u>Tahun 2018</u>
Rp168.104.743.500,00	Rp155.518.519.450,00

Rincian Beban Transfer untuk tahun 2019 terdiri dari berikut ini.

Tabel Rincian Beban Transfer

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	(Rp)	(Rp)		
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak	9.981.797.400,00	8.987.923.000,00	993.874.400,00	11,06
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.520.713.100,00	5.060.290.950,00	460.422.150,00	9,10
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	151.240.308.000,00	139.926.349.500,00	11.313.958.500,00	8,09
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi	0,00	500.000.000,00	(500.000.000,00)	(100,00)
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.361.925.000,00	1.043.956.000,00	317.969.000,00	30,46
Jumlah	168.104.743.500,00	155.518.519.450,00	12.586.224.050,00	8,09

Beban Transfer tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp12.586.224.050,00 atau 8,09% bila dibandingkan dengan transfer tahun sebelumnya.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Dari Pendapatan-LO sebesar Rp2.414.979.239.178,82 dan Beban sebesar Rp2.342.754.928.558,44 dihasilkan surplus dari operasi sebesar Rp72.224.310.620,38.

5.4.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Tahun 2019	Tahun 2018
(Rp15.409.101.888,00)	(Rp10.373.386.150,00)

Kegiatan Non Operasional merupakan kegiatan yang bersumber dari defisit penjualan aset non lancar, defisit penyelesaian kebijakan jangka panjang dan defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar (Rp15.409.101.888,00) adalah sebagai berikut.

Tabel Defisit Kegiatan Non Operasional

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	Kenaikan/	%
	(Rp)	(Rp)	(Penurunan) (Rp)	
Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	653.873.477,00	921.894.853,00	(268.021.376,00)	(29,07)
Surplus Penyelesaian Kewajiban	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional	16.062.975.365,00	11.295.281.003,00	4.767.694.362,00	42,21
Jumlah	(15.409.101.888,00)	(10.373.386.150,00)	(5.035.715.738,00)	48,54

Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO 2019 sebesar Rp653.873.477,00 secara rinci dapat dilihat berikut ini:

Tabel Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	Kenaikan/	%
	(Rp)	(Rp)	(Penurunan) (Rp)	
Hasil Penjualan Peralatan/Mesin	292.590.478,00	171.406.299,00	121.184.179,00	70,70
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	361.282.999,00	750.488.554,00	(389.205.555,00)	(51,86)
Jumlah	653.873.477,00	921.894.853,00	(268.021.376,00)	(29,07)

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO 2019 sebesar Rp16.062.975.365,00 berasal dari penghapusan aset tetap kondisi rusak berat, yang secara rinci sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Tabel Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO

No	Uraian	No SK Hapus	Jumlah (Rp)
1	Penghapusan BMD - Bongkaran Gedung dan Bangunan	SK No.028/399/KEP/2019	4.905.440.880,00
2	Penghapusan BMD - Peralatan & Mesin dan Aset Tetap Lainnya pada lingkup Korwil Bidang Pendidikan	SK No.028/398/KEP/2019	2.750.783.750,00
3	Penghapusan BMD - Peralatan & Mesin dan Aset Tetap Lainnya pada lingkup Dinas/Badan/Kantor	SK No.028/395/KEP/2019	1.921.836.887,00
4	Penghapusan BMD - Peralatan & Mesin dan Aset Tetap Lainnya pada lingkup Dinkes/RSUD/Puskesmas	SK No.028/395/KEP/2019	3.515.309.868,00
5	Penghapusan BMD - Peralatan & Mesin dan Aset Tetap Lainnya pada lingkup Kecamatan & Kelurahan	SK No.028/395/KEP/2019	410.406.300,00
6	Penghapusan BMD - Peralatan & Mesin dan Aset Tetap Lainnya pada lingkup SMPN	SK No.028/395/KEP/2019	549.709.596,00
7	Penghapusan BMD - Kendaraan Dinas	SK No.028/353/KEP/2019	2.009.488.384,00
Jumlah			16.062.975.665,00

5.4.4 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa tahun 2019 yang mempunyai karakteristik kejadian tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah. Secara rinci dapat dilihat berikut ini:

Tabel Pos Luar Biasa

Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	570.000,00	5.000.000,00	(4.430.000,00)	(88,60)
Jumlah	(570.000,00)	(5.000.000,00)	4.430.000,00	(88,60)

5.4.4.1 Pendapatan Luar Biasa – LO

Tahun 2019	Tahun 2018
Rp0,00	Rp0,00

Tahun Anggaran 2019 tidak ada pendapatan luar biasa.

5.4.4.2 Beban Luar Biasa

Tahun 2019	Tahun 2018
Rp570.000,00	Rp5.000.000,00

Beban Luar Biasa tahun 2019 merupakan Pencairan Dana Pengembalian Sewa Tanah Eks Bengkok atasnama Edi Wahyono sebesar Rp570.000,00.

Dengan demikian, surplus/defisit-LO yang dihasilkan selama Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp56.814.638.732,38.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

5.5 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menggambarkan kenaikan atau penurunan ekuitas pada periode tahun pelaporan.

Jumlah Ekuitas awal Tahun 2019 sebesar Rp4.529.217.894.028,92 merupakan ekuitas per 31 Desember 2018.

Surplus/Defisit LO sebesar Rp56.814.638.732,38 merupakan Surplus LO tahun 2019 yang dijelaskan pada Laporan Operasional tahun 2019.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2019 sebesar (Rp131.721.727.047,13) merupakan koreksi ekuitas lainnya yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel Koreksi Ekuitas Lainnya

No	Uraian	Nilai (Rp)
Koreksi Tambah		
1	Penyesuaian atas saldo investasi permanen per 31 Desember 2019 dengan metode	4.541.126.098,99
2	Reklas dari peralatan dan mesin ke aset tetap lainnya	3.716.286.422,00
3	Reklas dari aset lainnya DED ke aset tetap gedung dan bangunan	401.615.000,00
4	Koreksi dan akumulasi penyusutan aset tetap	19.724.820.304,23
5	Penyesuaian atas akumulasi penyusutan rusak berat	11.495.085.993,00
6	Penambahan karena mutasi antar SKPD	43.117.424.723,00
7	Penambahan karena hibah dari pihak lain	9.274.578.656,00
8	Penambahan aset tetap karena barang jasa menjadi aset	3.704.561.879,00
9	Penambahan aset lainnya - aset tidak berwujud	55.400.000,00
10	Penyesuaian amortisasi aset tidak berwujud	231.252.380,00
11	Penambahan baru ditemukan/baru dicatat	6.623.394.995,00
12	Penambahan aset lainnya - rusak berat	5.690.927.947,00
13	Jurnal koreksi tambah atas aset	21.626.960.992,00
14	Penyesuaian atas penyisihan piutang	11.057.109.439,00
15	Penyesuaian penghapusan aset tetap yang ada di aset lain-lain sesuai SK 2019	16.062.975.365,00
16	Penyesuaian atas akumulasi penyusutan aset lainnya P3D SMA/SMK	52.997.575.194,00
Jumlah Koreksi Tambah		210.321.095.388,22
Koreksi Kurang		
1	Pengurangan aset tetap karena usul hapus	3.376.769.484,00
2	Pengurangan aset lainnya - rusak berat	15.422.014.847,00
3	Koreksi akumulasi penyusutan aset tetap	10.575.156.970,35
4	Koreksi akumulasi penyusutan rusak berat	1.669.506.190,00
5	Koreksi kurang aset tetap karena double cata	714.922.000,00
6	Koreksi kurang aset tetap karena mutasi antar SKPD	53.240.555.980,00
7	Pengurangan aset karena dihibahkan ke pihak lain	448.092.000,00
8	Pengurangan aset lainnya - P3D SMA SMK	220.859.991.498,00
9	Koreksi kurang karena koreksi	30.549.595.607,00
10	Reklas dari peralatan dan mesin ke aset tetap lainnya atau sebaliknya	4.313.220.787,00
11	Pengurangan aset tetap karena reklas ke ekstrakompatabel	316.659.072,00
12	Koreksi KDP atas pekerjaan pembangunan Embung Giritirto Kecamatan Karanggayam	556.338.000,00
Jumlah Koreksi Kurang		342.042.822.435,35
Jumlah Koreksi Ekuitas Lainnya (Koreksi Tambah – Koreksi Kurang)		(131.721.727.047,13)

Ekuitas Akhir sebesar Rp4.454.310.805.714,17 menunjukkan bahwa kekayaan bersih yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kebumen per 31 Desember 2019 sebesar tersebut.

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2018

5.6 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode Tahun 2019 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan non anggaran.

Saldo Awal Kas atau saldo kas per 31 Desember 2018 sebesar Rp202.091.148.192,50. Terjadi kenaikan saldo kas selama tahun 2019 sebesar Rp713.299.862,68 sehingga saldo akhir Kas per 31 Desember 2019 sebesar Rp202.798.793.055,18 dengan rincian sebagai berikut.

Saldo Kas per 31 Desember 2019

Rincian Kas	2019 (Rp)	2018 (Rp)	kenaikan/(penurunan) (Rp)
Kas di Kas Daerah	150.395.584.664,00	173.202.091.321,00	(22.806.506.657,00)
Kas di Bendahara Pengeluaran	13.592.215,00	27.215.893,00	(13.623.678,00)
Kas di Bendahara Penerimaan	54.699.800,00	94.152.725,00	(39.452.925,00)
Kas di BLUD RSUD	37.137.213.276,00	18.709.656.061,00	18.427.557.215,00
Kas di BLUD Puskesmas	6.698.144.743,98	7.631.390.731,30	(933.245.987,32)
Kas Lainnya	8.499.558.356,20	2.426.641.461,20	6.072.916.895,00
Jumlah	202.798.793.055,18	202.091.148.192,50	707.644.862,68

5.6.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas bersih dari aktivitas operasi diikhtisarkan sebagai berikut.

Tabel Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
	(Rp)	(Rp)
Arus Kas Masuk	2.817.841.110.063,68	2.638.892.969.544,90
Arus Kas Keluar	2.443.708.650.599,00	2.282.043.603.852,00
Arus Kas Netto Aktivitas operasi	374.132.459.464,68	356.849.365.692,90

5.6.1.1 Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi

Arus kas masuk aktivitas operasi terdiri dari berikut:

Tabel Rincian Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi

No.	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
		(Rp)	(Rp)
1.	Pendapatan Pajak Daerah	110.614.568.810,00	96.775.593.102,00
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	27.141.726.792,00	37.339.858.915,00
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.210.376.188,00	9.734.494.832,00
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	256.542.888.062,68	207.275.250.579,90
5.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.688.387.155.843,00	1.654.135.303.906,00
6.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	429.981.020.600,00	350.023.637.000,00
7.	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	143.529.063.756,00	133.143.854.746,00
8.	Bantuan Keuangan	9.936.200.000,00	23.874.757.000,00
9.	Pendapatan Hibah	137.498.110.012,00	126.590.219.464,00
	Jumlah	2.817.841.110.063,68	2.638.892.969.544,90



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2018

Arus Kas Masuk sebesar Rp2.817.841.110.063,68 tersebut termasuk pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah dan pendapatan dari Dana Bantuan Operasional Sekolah yang diterima langsung Sekolah (SMP dan SD Negeri) pada tahun anggaran 2019.

Pendapatan dari Badan Layanan Umum sebagai berikut.

Tabel Rincian Pendapatan BLUD Tahun 2019

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Pendapatan BLUD RSUD Dr Soedirman	137.267.507.797,00
2.	Pendapatan BLUD RSUD Prembun	19.521.317.477,00
3.	Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas dan	68.957.897.011,68
Jumlah		225.746.722.285,68

Dan pendapatan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang diterima langsung melalui rekening Sekolah adalah sebesar Rp130.289.146.971,00.

5.6.1.2 Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi

Arus Kas keluar dari aktivitas operasi terdiri atas berikut.

Tabel Rincian Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi

No.	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
		(Rp)	(Rp)
1.	Belanja Pegawai	1.186.788.783.406,00	1.156.078.526.394,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	561.475.416.983,00	511.197.078.477,00
3.	Belanja Hibah	91.027.595.845,00	56.720.440.981,00
4.	Belanja Bantuan Sosial	41.392.080.465,00	51.842.190.750,00
5.	Belanja Tak Terduga	570.000,00	5.000.000,00
6.	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	9.981.797.400,00	8.987.923.000,00
7.	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.520.713.100,00	5.060.290.950,00
8.	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemda Lainnya	0,00	500.000.000,00
9.	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	546.159.768.400,00	490.608.197.300,00
10.	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.361.925.000,00	1.043.956.000,00
Jumlah		2.443.708.650.599,00	2.282.043.603.852,00

Arus kas keluar dari Aktivitas operasi sebesar Rp2.443.708.650.599,00 tersebut sudah termasuk belanja operasi pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dan UPTD Dinas Kesehatan dan belanja yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah.

Tabel Rincian Belanja BLUD Tahun 2019

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Belanja Pegawai BLUD	21.066.713.204,00
2.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	171.893.687.948,00
Jumlah		192.960.401.152,00

Sedangkan belanja yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah, yang dilaporkan oleh Satuan Pendidikan sebagai berikut:

Tabel Belanja Operasi BOS Tahun 2019

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Belanja Pegawai BOS	15.619.803.199,00
2.	Belanja Barang dan Jasa BOS	78.557.660.025,00
Jumlah		94.177.463.224,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2018

5.6.2 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset non-keuangan lainnya. Arus Kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi berkurang sebesar Rp365.186.920.551,00.

Tabel Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
	(Rp)	(Rp)
Arus Kas Masuk	653.873.477,00	921.894.853,00
Arus Kas Keluar	365.840.794.028,00	370.004.376.524,00
Arus Kas Netto Aktivitas Investasi	(365.186.920.551,00)	(369.082.481.671,00)

Jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi berkurang sebesar Rp365.186.920.551,00, menunjukkan bahwa selama Tahun 2019 dari aktivitas investasi mengurangi saldo kas sebesar Rp365.186.920.551,00.

5.6.2.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Masuk dari aktivitas investasi merupakan hasil penjualan Barang Milik Daerah sebesar Rp653.873.477,00 dari Peralatan Mesin, Bangunan Gedung dan Aset Tetap Lainnya, masing-masing sebagai berikut.

Tabel Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Investasi Tahun 2019

No.	Aktivitas Investasi	Nilai
		(Rp)
1.	Hasil penjualan Peralatan/Mesin	292.590.478,00
2.	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	361.282.999,00
3.	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00
Jumlah		653.873.477,00

5.6.2.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Arus kas keluar dari aktivitas investasi merupakan total belanja modal Tahun Anggaran 2019 yaitu sebesar Rp365.840.794.028,00, termasuk didalamnya belanja modal pada Badan Lauanan Umum daerah dan Belanja modal sumber dana Bantuan Operasional Sekolah. Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi dirinci sebagai berikut.

Tabel Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Tahun 2019

No.	Uraian	Nilai
		(Rp)
1.	Belanja Modal Tanah	33.834.086.638,00
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.985.234.817,00
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	73.764.387.734,00
4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan	143.814.601.168,00
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.089.486.071,00
6.	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	352.997.600,00
Jumlah		365.840.794.028,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2018

Arus kas keluar investasi dari Belanja Modal yang dilakukan oleh Badan Layanan Umum Daerah dirinci sebagai berikut.

Tabel Rincian Belanja Modal BLUD Tahun 2019

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Belanja Modal Tanah BLUD	733.873.170,00
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	10.115.615.861,00
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.361.778.506,00
4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD	3.054.325.328,00
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	6.285.000,00
6.	Belanja Modal Aset Tak Berwujud BLUD	4.000.000,00
	Jumlah	15.275.877.865,00

Sedangkan arus kas keluar investasi dari Belanja Modal yang bersumber dana Bantuan Operasional Sekolah yang dilaporkan Satuan Pendidikan dirinci sebagai berikut:

Tabel Rincian Belanja Modal Dana BOS Tahun 2019

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	18.060.991.745,00
2.	Belanja Modal Aset Tetap lainnya BOS	11.750.749.113,00
	Jumlah	29.811.740.858,00

5.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang dan utang pemerintah daerah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran.

Arus Kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah daerah dan klaim pemerintah daerah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Arus Kas dari aktivitas pendanaan berkurang sebesar Rp7.970.000.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pembiayaan	Tahun 2019	Tahun 2018
	(Rp)	(Rp)
Arus Kas Masuk	1.500.000.000,00	1.540.000.000,00
Arus Kas Keluar	9.470.000.000,00	11.750.000.000,00
Arus Kas Netto Aktivitas pendanaan	(7.970.000.000,00)	(10.210.000.000,00)

Jumlah arus kas bersih dari aktivitas pendanaan berkurang sebesar Rp7.970.000.000,00 menunjukkan bahwa selama tahun 2019 dari aktivitas pendanaan mengurangi saldo kas sebesar Rp7.970.000.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2018

5.6.3.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan tahun 2019 sebesar Rp1.500.000.000,00 adalah penerimaan kembali pokok pinjaman dana talangan yang dikelola Dinas Pertanian dan Pangan.

5.6.3.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp9.470.000.000,00 merupakan Penyertaan modal/Investasi Pemerintah Daerah dan penyaluran dana talangan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2019

BUMD	Nilai (Rp)
Bank Jateng	3.500.000.000,00
Perusahaan Daerah BPR BKK Kebumen	270.000.000,00
Perusahaan Daerah BKK Suweg	600.000.000,00
Perusahaan Daerah BPR Bank Kebumen	0,00
Perusahaan Daerah Apotik Luk Ulo	100.000.000,00
Perusahaan Daerah Air Minum	3.500.000.000,00
Penyaluran Dana talangan	0,00
Jumlah	9.470.000.000,00

5.6.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2019 berkurang sebesar Rp267.894.051,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Aktivitas Non Anggaran	Tahun 2018	Tahun 2017
	(Rp)	(Rp)
Arus Kas Masuk	156.164.303.603,00	157.382.500.815,00
Arus Kas Keluar	156.432.197.654,00	155.969.895.220,00
Arus Kas Netto Aktivitas	(267.894.051,00)	1.412.605.595,00

5.6.4.1 Arus Kas Masuk Aktivitas Transitoris

Arus kas masuk aktivitas transitoris sebesar Rp156.164.303.603,00 terdiri dari berikut.

Tabel Rincian Arus Kas Masuk Aktivitas Transitoris Tahun 2019

Uraian	Nilai (Rp)
Penerimaan perhitungan pihak ketiga	156.156.232.588,00
Kiriman uang masuk pendapatan 2018 disetor 2019	8.071.015,00
Jumlah	156.164.303.603,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2018

5.6.4.2 Arus Kas Keluar Aktivitas Transitoris

Arus Arus kas keluar Aktivitas Transitoris tahun 2019 sebesar Rp156.432.197.654,00 merupakan pengeluaran perhitungan fihak ketiga selama tahun anggaran 2019, uang keluar atas dana rapel gaji pegawai BLUD 2018 yang baru dibayarkan di tahun 2019 dan kiriman uang keluar atas setoran pendapatan RSUD Prembun 2018 yang disetorkan ke Rekening BLUD di 2019. Arus kas keluar aktivitas transitoris dirinci sebagai berikut:

Tabel Rincian Arus Kas Masuk Aktivitas Transitoris Tahun 2019

Uraian	Nilai (Rp)
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	156.407.461.639,00
Kiriman uang keluar atas titipan rapel gaji RSDS 2018	16.665.000,00
Kiriman uang keluar pendapatan 2018 ke BLUD	8.071.015,00
Jumlah	156.432.197.654,00

Dari keempat arus kas tersebut di atas, terjadi kenaikan saldo kas selama Tahun 2019 sebesar Rp707.644.862,68 ditambah dengan saldo awal Kas sebesar Rp202.091.148.192,50 sehingga diperoleh saldo akhir Kas sebesar Rp202.798.793.055,18.

Saldo Kas sebesar tersebut terdiri dari:

Kas di Kas Daerah	Rp.	150.395.584.664,00
Kas di Bendahara Penerimaan	Rp.	54.699.800,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.	13.592.215,00
Kas di BLUD	Rp.	43.835.358.019,98
Kas Lainnya - BOS	Rp.	8.498.408.494,00
Kas Lainnya - Lainnya	Rp.	1.149.862,20
Jumlah	Rp.	202.798.793.055,18



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan otonomi daerah yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan Keuangan Kabupaten Kebumen disusun dengan memperhatikan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah dan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diberlakukan di Indonesia yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruak pada Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan konsolidasi dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, maka ditetapkan Perda Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah agar substansinya dapat selaras dengan tujuan otonomi yang didasarkan pada asas kewenangan, intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas. Susunan Perangkat Daerah tersebut terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas;
- e. Badan; dan
- f. Kecamatan.

Susunan perangkat daerah terbagi menjadi 3 tipe :

- a. Tipe A adalah kriteria tipologi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan dengan kategori beban kerja besar.
- b. Tipe B adalah kriteria tipologi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas dan Badan dengan kategori beban kerja sedang dan Kecamatan dengan kategori beban kerja kecil.
- c. Tipe C adalah kriteria tipologi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas dan Badan dengan kategori beban kerja kecil.

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Untuk Rinciannya adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD tipe A;
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat tipe A
- d. Dinas berjumlah 17 dengan rincian tipe sebagai berikut:
 - 1) Dinas Tipe A : 5 Dinas
 - 2) Dinas tipe B : 10 Dinas
 - 3) Dinas Tipe C : 2 Dinas
- e. Badan berjumlah 4 dengan rincian tipe sebagai berikut :
 - 1) Badan Tipe A : 2 Badan
 - 2) Badan Tipe B : 2 Badan
- f. Kecamatan : 26 Kecamatan tipe A

Nomenklatur OPD pada penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2019 disajikan sesuai tabel berikut.

Tabel Nomenklatur OPD pada Penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2019

No.	Kode OPD	Nama OPD
	1.01.	BIDANG PENDIDIKAN
1.	1.01.1	Dinas Pendidikan.
	1.02.	BIDANG KESEHATAN
2.	1.02.1	Dinas Kesehatan
3.	1.02.2.1	Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soedirman
4.	1.02.2.2	Rumah Sakit Umum Daerah Prembun
	1.03	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	1.03.1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
6.	1.03.2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.04	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7.	1.04.1	Dinas Perumahan dan Kawasasn Permukiman dan Lingkungan Hidup
	1.05	BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
8.	1.05.1	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
9.	1.05.2	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.06	BIDANG SOSIAL
10.	1.06.1	Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.01	BIDANG TENAGA KERJA
11.	2.01.1	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.06	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL
12.	2.06.1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.07	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
13.	2.07.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.09	BIDANG PERHUBUNGAN
14.	2.09.1	Dinas Perhubungan
	2.10	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
15.	2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.12	BIDANG PENANAMAN MODAL
16.	2.12.1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.13	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Di Tahun Anggaran 2019 terdapat 38 entitas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yaitu 35 Puskesmas, 1 Unit Pengobatan Paru dan 2 Rumah Sakit Umum Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kode OPD	Nama OPD
1	1.02.1.1	Puskesmas Adimulyo
2	1.02.1.2	Puskesmas Alian
3	1.02.1.3	Puskesmas Ambal I
4	1.02.1.4	Puskesmas Ambal II
5	1.02.1.5	Puskesmas Ayah I
6	1.02.1.6	Puskesmas Ayah II
7	1.02.1.7	Puskesmas Bonorowo
8	1.02.1.8	Puskesmas Buayan
9	1.02.1.9	Puskesmas Buluspesantren I
10	1.02.1.10	Puskesmas Buluspesantren II
11	1.02.1.11	Puskesmas Gombong I
12	1.02.1.12	Puskesmas Gombong II
13	1.02.1.13	Puskesmas Karanganyar
14	1.02.1.14	Puskesmas Karanggayam I
15	1.02.1.15	Puskesmas Karanggayam II
16	1.02.1.16	Puskesmas Karangsambung
17	1.02.1.17	Puskesmas Kebumen I
18	1.02.1.18	Puskesmas Kebumen II
19	1.02.1.19	Puskesmas Kebumen III
20	1.02.1.20	Puskesmas Klirong I
21	1.02.1.21	Puskesmas Klirong II
22	1.02.1.22	Puskesmas Kutowinangun
23	1.02.1.23	Puskesmas Kuwarasan
24	1.02.1.24	Puskesmas Mirit
25	1.02.1.25	Puskesmas Padureso
26	1.02.1.26	Puskesmas Pejagoan
27	1.02.1.27	Puskesmas Petanahan
28	1.02.1.28	Puskesmas Poncowarno
29	1.02.1.29	Puskesmas Prembun
30	1.02.1.30	Puskesmas Puring
31	1.02.1.31	Puskesmas Rowokele
32	1.02.1.32	Puskesmas Sadang
33	1.02.1.33	Puskesmas Sempor I
34	1.02.1.34	Puskesmas Sempor II
35	1.02.1.35	Puskesmas Sruweng
36	1.02.1.36	Pengobatan Penyakit Paru
37	1.02.1.37	RSUD dr. Sudirman
38	1.02.1.38	RSUD Prembun
		Jumlah

A



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Pemerintah Kabupaten Kebumen selama tahun 2019 memperoleh beberapa prestasi diantaranya.

Rincian Penghargaan Kabupaten Kebumen Tahun 2019

No	Nama Penghargaan
1.	Piagam Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018 dari Kementerian Keuangan.
2.	Sertifikat Adipura Tahun 2018 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3.	Peringkat Madya Kabupaten Layak Anak tahun 2018 dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4.	Kategori Utama "Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2018"
5.	Sertifikat Eliminasi Malaria di Tahun 2018 dari Kementerian Kesehatan .
6.	TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Nasional , dengan inovasi Taman Proklamasi Lebah Klanceng (TAMPLEK) dan Stop Angka Kematian Ibu dan Anak melalui Pedagang Keliling (SAKINA PELING) tahun 2019 dari Kementerian PAN RB.
7.	Wana Lestari Tingkat Nasional Tahun 2018 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
8.	Proklamasi Madya tahun 2018 dari dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
9.	Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2018 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
10.	Juara I Gelar Desa Wisata Jawa Tengah Tingkat Provinsi tahun 2019
11.	2019
12.	Juara 1 IKM Pangan Award Tahun 2019 Kategori Minuman tingkat provinsi Jawa Tengah

Selain itu di Kabupaten Kebumen telah diresmikan Geopark Karangsambung – Karangbolong sebagai Geopark Nasional yang terbagi menjadi dua kawasan yaitu Kawasan cagar Alam Geologi (KCAG) Karangsambung dan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Gombang Selatan. Geopark ini juga mencakup kawasan karst yang didalamnya terdapat 182 buah Goa, 2 telaga/ danau karst, sungai bawah tanah, air terjun dan aneka mata air.

A



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019**

**BAB VII
PENUTUP**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good governance*.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019 secara keseluruhan.

